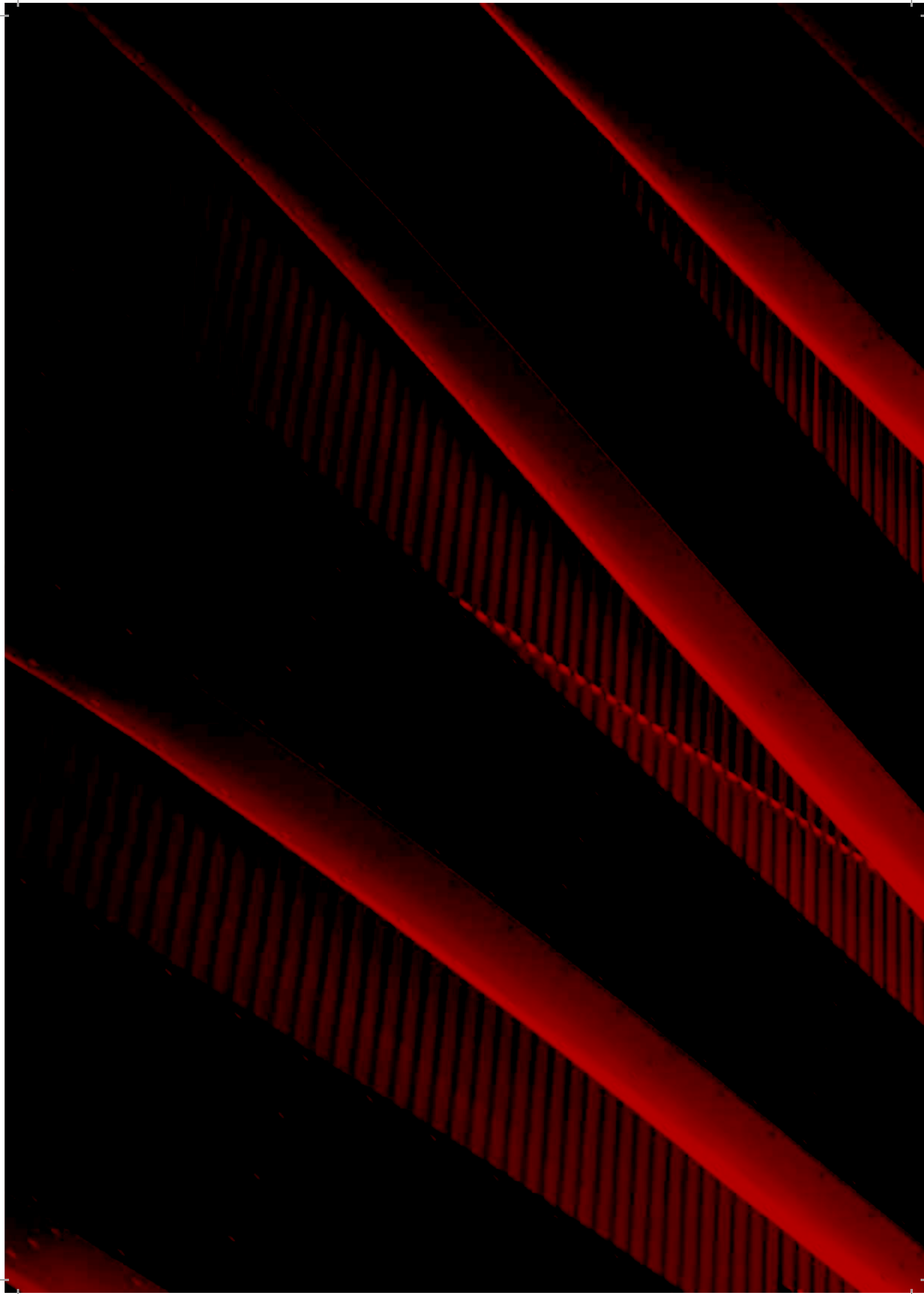


LAPORAN TAHUNAN 2019

ANNUAL REPORT —

Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas
Bring The Confidence to Move Forward and Expanding Capabilities

 **INDONESIA
SIPF**
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



IKHTISAR STATISTIK

« Statistical Highlight »

6,24% ^

Aset Pemodal yang Dilindungi

« Investors Asset Protected »

2018

Rp 4.066 Triliun
Rp 4.066 Trillion

2019

Rp 4.324 Triliun
Rp 4.324 Trillion

29,51% ^

Pemodal yang Dilindungi

« Investors Protected »

2018

1.042.396 Pemodal
1.042.396 Investors

2019

1.350.026 Pemodal
1.350.026 Investors

128 Anggota ^

Anggota Dana Perlindungan Pemodal

« Investor Protection Fund Members »

2018

125 Anggota
125 Members

2019

128 Anggota
128 Members

17,66% ^

Nilai Perlindungan Pemodal

« Investor Protection Fund »

2018

Rp 160,70 Milliar
Rp 160,70 Billion

2019

Rp 189,08 Milliar
Rp 189,08 Billion

MEMBAWA KEYAKINAN UNTUK MELANGKAH KE DEPAN DAN MEMPERLUAS KAPABILITAS

Bring The Confidence to Move Forward and
Expanding Capabilities

Terbentuk sejak akhir tahun 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPP) senantiasa mempertahankan komitmen dan kredibilitasnya dalam mengemban amanat Otoritas Jasa Keuangan dalam mengadminstrasikan serta mengelola Dana Perlindungan Pemodal guna melindungi kepentingan pemodal di Pasar Modal Indonesia dari kemungkinan adanya kehilangan aset pemodal yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan peran penting tersebut, Indonesia SIPP senantiasa selalu melakukan upaya-upaya pengembangan secara internal operasional perusahaan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di Pasar Modal Indonesia.

Tahun 2019 ini, Indonesia SIPP telah mencanangkan pengembangan strategis untuk memperluas peran dan fungsi proteksi bagi pemodal di Indonesia. Hal ini semata-mata merupakan komitmen Perusahaan untuk terus memberikan keyakinan kepada Investor bahwa berinvestasi di Pasar Modal Indonesia semakin aman dan nyaman. Berbagai kegiatan dilakukan pada tahun 2019 meliputi; Pengajuan peningkatan batasan ganti rugi bagi pemodal, penetapan kriteria Perusahaan Efek yang telah tutup dan telah dilakukan pencabutan izin oleh OJK, kajian keanggotaan PPE Daerah sebagai Anggota DPP, serta konsep simulasi penanganan klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal.

Established since late 2012, PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia or known as Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPP) has been maintaining our commitment and credibility in carrying the Financial Service Authority mission in administering and managing Investor Protection Fund to protect the investor interest in Indonesia capital market from the possibility of investor assets loss as the cause of fraud conducted by irresponsible parties. In accordance to such strategic role, as the one and only institution in Indonesia which conducting the role and function of Indonesia Capital Market investor protection, Indonesia SIPP has been undertaking some improvement efforts in company's internal operation and other supporting system by putting forward the good

corporate governance principles to embody a reliable and trusted protection

In 2019, Indonesia SIPP has launched strategic developments to expand the role and function of protection for investors in Indonesia. This is solely a commitment of the Company to continue to provide confidence to Investors that investing in the Indonesian Capital Market is increasingly safer and more comfortable. Various activities carried out in 2019 including; Submission of an increase in compensation limits for investors, determination of criteria for Securities Companies that have been closed and revoked licenses by the OJK, a study of Regional broker / dealer as an IPF Member, as well as a simulation concept for handling compensation claims for loss of investor assets.

KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

2016

Pada Tahun 2016 Perseroan menggunakan tema "Memberikan Perlindungan Lebih untuk Pemodal" dengan latar belakang bahwa P3IEI kerap melakukan upaya-upaya penyempurnaan secara internal operasional perusahaan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di pasar modal Indonesia.

In 2016 the Company used the theme "Provides Greater Protection for the Investors" with the background that P3IEI often makes efforts to improve internally the operations of the company and other support systems by promoting the principles of good corporate governance so as to create a reliable and trusted protection agency in the Indonesian capital market.

LAPORAN TAHUNAN 2016

ANNUAL REPORT

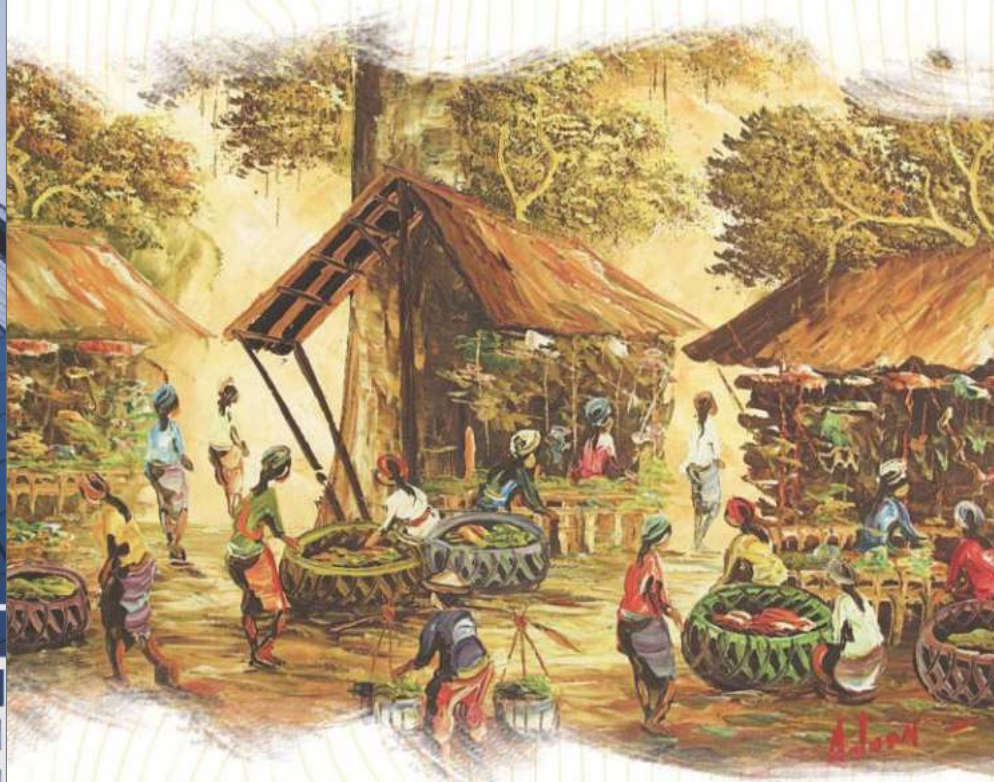
» **Memberikan Perlindungan Lebih untuk Pemodal**
Provides Greater Protection for the Investors



The Continuity of Annual Reports' Theme

LAPORAN TAHUNAN 2017

ANNUAL REPORT



Tumbuh, Menaungi & Melindungi Pemodal
 Grow, Shield & Protect Investor

INDONESIA
SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

2017

Pada Tahun 2017 Perseroan menggunakan tema “Tumbuh, Menaungi, dan Melindungi Pemodal” dengan latar belakang mengungkapkan pertumbuhan positif kinerja keuangan internal sebagai akar penunjang operasional perusahaan, komitmen tinggi dalam meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal selayaknya cabang pohon yang menjulang ke langit, menawarkan perlindungan yang berguna bagi para Pemodal seperti pohon berbuah yang bermanfaat dan menaungi para Pemodal dengan rasa aman & nyaman selayaknya dedaunan pohon yang menaungi serta menyejukan.

In 2017 the Company used the theme “Grow, Shield, and Protect Investors” with the background revealing positive growth in internal financial performance as the root of the company’s operational support, high commitment in increasing the value of the Investor Protection Fund as tree branches soar to the sky, offering useful protection for investors like a prosper flourishing trees and becoming the shield for the investors with a secured and comfortable feeling like a shady foliage.

KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

2018

Pada Tahun 2018 Perseroan menggunakan tema "Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara" dengan latar belakang bahwa sepanjang tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia, Indonesia SIPF telah melakukan berbagai kegiatan program sosialisasi, edukasi, dan literasi melalui kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam rangka penyebaran konsep perlindungan maka Indonesia SIPF juga menyebarkan informasi tentang perlindungan Pemodal dalam bentuk media cetak ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di seluruh Indonesia.

In 2018 the Company used the theme "Protecting Investors Throughout the Archipelago" with the background that throughout 2018, in order to increase understanding regarding the protection of investor assets in the Indonesian Capital Market, Indonesia SIPF has carried out various activities in the program of socialization, education and literacy through visits to various regions in Indonesia. Not only that, in order to disseminate the concept of protection, Indonesia SIPF also disseminates information about investor protection in the form of print media to Indonesian Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) throughout Indonesia.

Laporan Tahunan 2018

ANNUAL REPORT —



Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara
Protecting The Investors Throughout the Archipelago

The Continuity of Annual Reports' Theme

LAPORAN TAHUNAN 2019

ANNUAL REPORT —

2019

Pada Tahun 2019 Perseroan menggunakan tema "Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas". Tema pada tahun 2019 ini melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor. Pada tahun 2019, perseroan telah mencanangkan pengembangan strategis untuk memperluas peran dan fungsi proteksi bagi pemodal di Indonesia. Hal ini semata-mata merupakan komitmen Perusahaan untuk terus memberikan keyakinan kepada Investor bahwa berinvestasi di Pasar Modal Indonesia semakin aman dan nyaman.

In 2019 the Company used the theme "Bring the Confidence to Move Forward and Expanding Capabilities". This theme continues the theme in previous years by focusing on investor protection. In 2019, the company has launched strategic developments to expand the role and function of protection for investors in Indonesia. This is solely a commitment of the Company to continue to provide confidence to Investors that investing in the Indonesian Capital Market is increasingly safer and more comfortable.

Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas
Bring The Confidence to Move Forward and Expanding Capabilities

INDONESIA
SIPP
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Daftar Isi - Index



- 2 Ikhtisar Statistik**
» Statistical Highlight
- 3 Tema dan penjelasan**
» Theme and Explanation
- 4 Kestinambungan Tema Laporan Tahunan**
» The Continuity of Annual Reports' Theme
- 11 Ikhtisar Kinerja 2019**
» 2019 Performance Summary
- 12 Ikhtisar Keuangan**
» Financial Highlight

1

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan » Management Report

- 20 Laporan Dewan Komisaris dan Direksi**
» Board of Commissioners & Board of Directors Report
- 20 Laporan Dewan Komisaris**
» Board of Commissioners Report
- 21 Penilaian terhadap Kinerja Direksi**
» Performance Assessment of Directors
- 22 Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
» Corporate Governance
- 24 Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan**
» Views on Business Prospects
- 25 Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**
» Changes to The Composition of The Board of Commissioners
- 25 Kata Penutup**
» Closing Remarks
- 26 Laporan Direksi**
» Board of Directors Report
- 27 Analisis atas Kinerja Perusahaan**
» Analisis atas Kinerja Perusahaan
- 29 Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target**
» Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target
- 30 Kendala yang Dihadapi**
» Kendala yang Dihadapi
- 31 Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha**
» Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha
- 31 Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku**
» Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku
- 32 Pengelolaan Human Capital**
» Pengelolaan Human Capital
- 32 Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Direksi**
» Penilaian Kinerja Komite- Komite di Bawah Direksi

2

Profil Perusahaan

» Company Profile

- 40 Informasi Umum**
» General Information
- 42 Riwayat Singkat Perusahaan**
» Brief History of The Company
- 46 Kegiatan dan Bidang Usaha**
» Corporate Activities and Scope of Business
- 47 Struktur Organisasi**
» Organizational Structure
- 48 Visi dan Misi**
» Vision and Mission
- 49 Budaya dan Nilai Perusahaan**
» Corporate Culture and Value
- 50 Profil Dewan Komisaris**
» Board of Commissioners Profile
- 52 Profil Direksi**
» Board of Directors Profile
- 54 Pengelolaan Human Capital**
» Human Capital Management
- 63 Informasi Pemegang Saham**
» Shareholder Information
- 63 Wilayah Operasi Saat Ini**
» The Current Area of Operation
- 63 Produk dan Jangkauan Pasar**
» Product and Market Reach
- 64 Jejak Langkah**
» Milestones
- 68 Lembaga dan Profesi Penunjang**
» Supporting Agencies and Professions
- 69 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal**
» External Awards and Acknowledgments
- 69 Informasi Situs Perusahaan**
» Company Site Information
- 73 Transparansi Penyampaian Laporan**
» Transparency of Report Submission
- 75 Peristiwa Penting 2019**
» Important Events 2019
- 75 Hubungan Kelembagaan dengan Investor Protection Fund (IpF) Regional**
» Hubungan Kelembagaan dengan Investor Protection Fund (IpF) Regional

3

Analisis dan Diskusi Manajemen

» Management Analysis & Discussion

- 86 Gambaran Umum**
» Overview
- 87 Bisnis**
» Business
- 87 Pengelolaan DPP**
» IPF Management
- 94 Keanggotaan DPP**
» IPF Membership
- 96 Monitoring Risiko Anggota DPP**
» Risk Monitoring of IPF's member
- 100 Klaim & Pengaduan**
» Claim & Complaints
- 106 Keuangan**
» Finance
- 106 Tinjauan Umum**
» General Overview
- 106 Laba Usaha dan Laba Bersih**
» Operating Profit and Net Profit
- 112 Kas dan Setara Kas**
» Cash and Cash Equivalent
- 113 Posisi Keuangan**
» Financial Position
- 114 Pengembangan Perusahaan**
» Corporate Development
- 114 Belanja Modal**
» Capital Expenditure

4

Tata Kelola Perusahaan

» Good Corporate Governance

- 118 Capaian Penilaian Penerapan GCG**
» Achievements of GCG Assessment
- 120 GCG Milestones 2014-2019**
» GCG Milestones 2014-2019
- 121 Tahapan Implementasi GCG**
» Stage of GCG Implementation
- 122 Tujuan Penerapan Tata Kelola**
» Purpose of Good Corporate Governance Implementation
- 122 Struktur Tata Kelola Perusahaan**
» Good Corporate Governance Structure
- 125 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**
» Corporate Governance Policy
- 126 Dewan Komisaris**
» Board of Commissioners
- 127 Direksi**
» Board of Directors
- 128 Hubungan Dewan Komisaris & Direksi**
» The Board of Commissioners & The Board Of Directors
- 128 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, & Rapat Direksi**
» Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, & The Board of Directors
- 136 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi**
» Diversity In Composition of The Board of Commissioners & The Board of Directors
- 137 Assessment/Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris & Direksi**
» Assessment of Performance on Board of Commissioners & Directors
- 137 Remunerasi bagi Dewan Komisaris & Direksi**
» Remuneration for Board of Commissioners & Directors
- 138 Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, & Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali**
» Affiliate Relationship Between The Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, & The Main Shareholders and / or Controls
- 139 Organ Penunjang Dewan Komisaris**
» Board of Commissioners Supporting Organs
- 140 Organ Penunjang Dewan Direksi**
» Board of Directors Supporting Organs
- 144 Komite Good Corporate Governance, Nominasi & Remunerasi**
» Good Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee
- 145 Sistem Pengendalian Internal**
» Internal Control System
- 148 Manajemen Risiko**
» Risk Management
- 152 Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi**
» Information & Communication Technology Governance
- 153 Akuntan Publik**
» Public Accountant
- 153 Pengelolaan Benturan Kepentingan & Hubungan Dengan Pihak Berelasi**
» Management of Interest Conflicts & Relationship with Related Parties
- 154 Whistleblowing System**
» Whistleblowing System
- 154 Permasalahan Hukum Perusahaan**
» Company's Law Issues
- 155 Akses Informasi & Data Perusahaan**
» Access to Information & Company Data
- 157 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
» Corporate Social Responsibility

5

Laporan Keuangan

» Financial Statements

160 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2019

» Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2019

161 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

» The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)

162 Kriteria Annual Report Award

» Annual Report Award Criteria

Ikhtisar Kinerja 2019

- 2019 Performance Summary

... Pasar Modal Indonesia mencatat pertumbuhan pada tahun 2019. Hal ini dilihat dari nilai Kapitalisasi Pasar yang terus bertambah. Kapitalisasi Pasar pada tahun 2018 bernilai sekitar Rp7.023,5 triliun rupiah dan kemudian naik menjadi Rp7.265,02 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Pasar Obligasi Indonesia mencatatkan peningkatan Total Outstanding baik pada Obligasi dan Sukuk Pemerintah maupun Korporasi dimana pada tahun 2019 Total Outstanding Obligasi dan Sukuk Pemerintah meningkat menjadi Rp2.418,16 Triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.365,35 Triliun. Sedangkan Obligasi Korporasi dan Sukuk pada tahun 2019 memiliki Total Outstanding sebesar Rp424,11 Triliun dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar Rp411,86 Triliun.

Meningkatnya Pasar Modal Indonesia mendorong peningkatan nilai DPP pada tahun 2019. Nilai DPP pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu per tanggal 31 Desember 2019 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 17,66% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2018 menjadi Rp189,08 Miliar dari Rp160,70 Miliar. Aset Pemodal yang Dilindungi meningkat menjadi Rp4.324 Triliun dari Rp4.066 Triliun atau meningkat sebesar 6,34% dibandingkan tahun 2018. Jumlah pemodal yang Dilindungi mengalami peningkatan sebesar 29,51% atau menjadi 1.350.026 pemodal dari 1.042.396 pemodal.

Per Desember 2019, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal memiliki Anggota DPP sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 106 (seratus enam) Perantara Pedagang Efek dan 22 (dua puluh dua) Bank Kustodian. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana terdapat penambahan 4 anggota DPP baru yang terdiri atas 1 Perantara Pedagang Efek dan 3 Bank Kustodian.

The Indonesian capital market recorded growth in 2019. This growth was seen from the increasing value of Market Capitalization. Market capitalization in 2018 is worth around Rp7,023.5 trillion rupiah and then rose to Rp7,265.02 trillion in 2019. In 2019, the Indonesian Bond Market recorded an increase in Total Outstanding in both Government and Corporate Bonds and Sukuk where in 2019 the Total Outstanding Bonds and Government Sukuk increased to Rp2,418.16 Trillion compared to 2018 amounting to Rp2,365.35 Trillion. Whereas Corporate Bonds and Sukuk in 2019 had a Total Outstanding of Rp424.11 Trillion compared to 2018 of Rp411.86 Trillion.

The increase in the Indonesian Capital Market encourages an increase in the value of the IPF in 2019. The value of the IPF in 2019 has increased as of December 31, 2019 the IPF has experienced growth of 17.66% compared to the position of the IPF as of December 31, 2018 to Rp189.08 billion from Rp160.70 Billion. Protected Capital Assets increased to Rp4,324 Trillion or increased by 6.34% compared to 2018. The number of Protected Investors increased by 29.51% or to 1,350,026 investors.

As of December 2019, the Company as the Organizer of Investor Protection Funds has 128 (one hundred and twenty eight) DPP Members, consisting of 106 (one hundred and six) Securities Broker Dealer and 22 (twenty two) Custodian Banks. So that in 2019 there will be 4 new DPP members consisting of 1 Securities Broker Dealer and 3 Custodian Banks.

Ikhtisar Keuangan

- Financial Highlight

DESKRIPSI. Description

2019

2018

2017

2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN. Balance Sheet

ASET. ASSETS

Aset Lancar ● Current Assets	48,144,033,689	45,233,661,694	45,190,290,230	11,987,902,017
Aset Tidak Lancar ● Non-Current Assets	157,858,118,483	147,505,821,985	154,025,696,241	150,808,535,622
Cadangan ganti rugi pemodal Investor ● Compensation Reserve (CGRP)	157,169,300,000	146,869,995,000	153,201,555,000	150,000,000,000
Aset tetap ● Fixed Assets	688,818,483	635,826,985	604,963,881	745,260,842
Aset Pajak Tangguhan ● Deferred Tax Assets	-	-	219,177,360	63,274,842
Jumlah Aset → Total Assets	206,002,152,172	192,739,483,679	199,215,986,471	162,796,437,639

LIABILITAS DAN EKUITAS. Liabilities and Equity

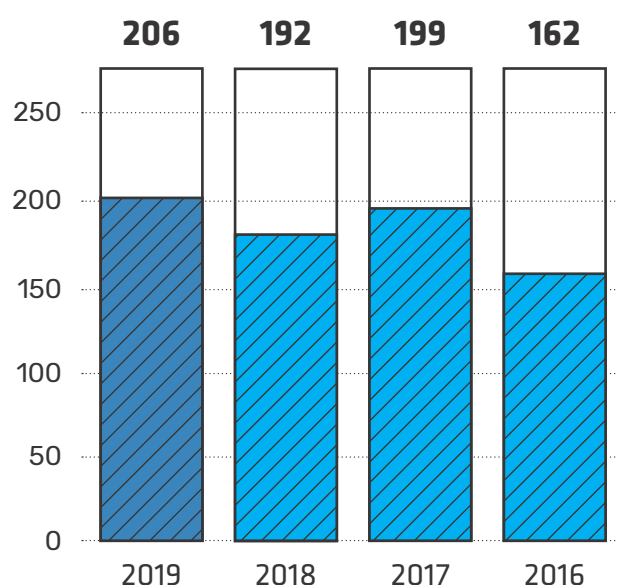
Liabilitas Jangka Pendek ● Short Term Liabilities	1,504,979,626	2,585,188,177	1,057,769,436	475,966,712
Liabilitas Jangka Panjang ● Long Term Liabilities	150,064,291,968	150,017,915,946	150,063,133,774	150,000,000,000
Jumlah Liabilitas → Total Liabilities	151,569,271,594	152,603,104,123	151,120,903,210	150,475,966,712
Jumlah Ekuitas → Total Equity	54,432,880,578	40,136,379,556	48,095,083,261	12,320,470,927
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas → Total Liabilities and Equity	206,002,152,172	192,739,483,679	199,215,986,471	162,796,437,639

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF. Statements of Comprehensive Profit or Loss

Pendapatan Usaha ● Operating Revenues	15,435,215,163	13,441,436,629	12,257,365,799	11,076,625,557
Beban Usaha ● Operating Expenses	13,413,971,445	13,056,505,222	10,224,342,367	10,777,011,632
Laba Sebelum Pajak ● Profit Before Tax	2,021,243,718	384,931,407	2,033,023,432	299,613,925
Manfaat (Beban) Pajak ● Tax Benefits (Expenses)	-17,520,334	-225,195,337	143,225,764	-4,358,305,221
Laba (Rugi) Tahun Berjalan ● Net Income (Loss)	2,003,723,385	159,736,070	2,176,249,196	-4,058,691,296
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain ● Other Comprehensive Income	12,292,777,637	-8,118,439,775	3,598,363,138	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan → Total Net Comprehensive Income	14,296,501,022	-7,958,703,705	5,774,612,334	-4,058,691,296

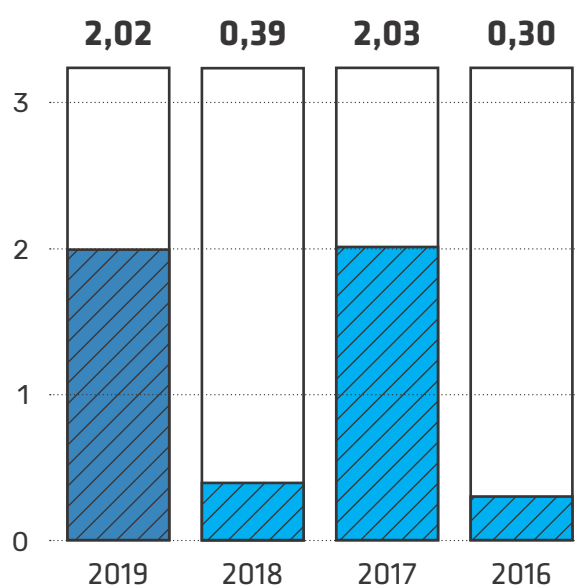
Jumlah Aset / dalam miliar rupiah

Total Assets / in billion rupiah



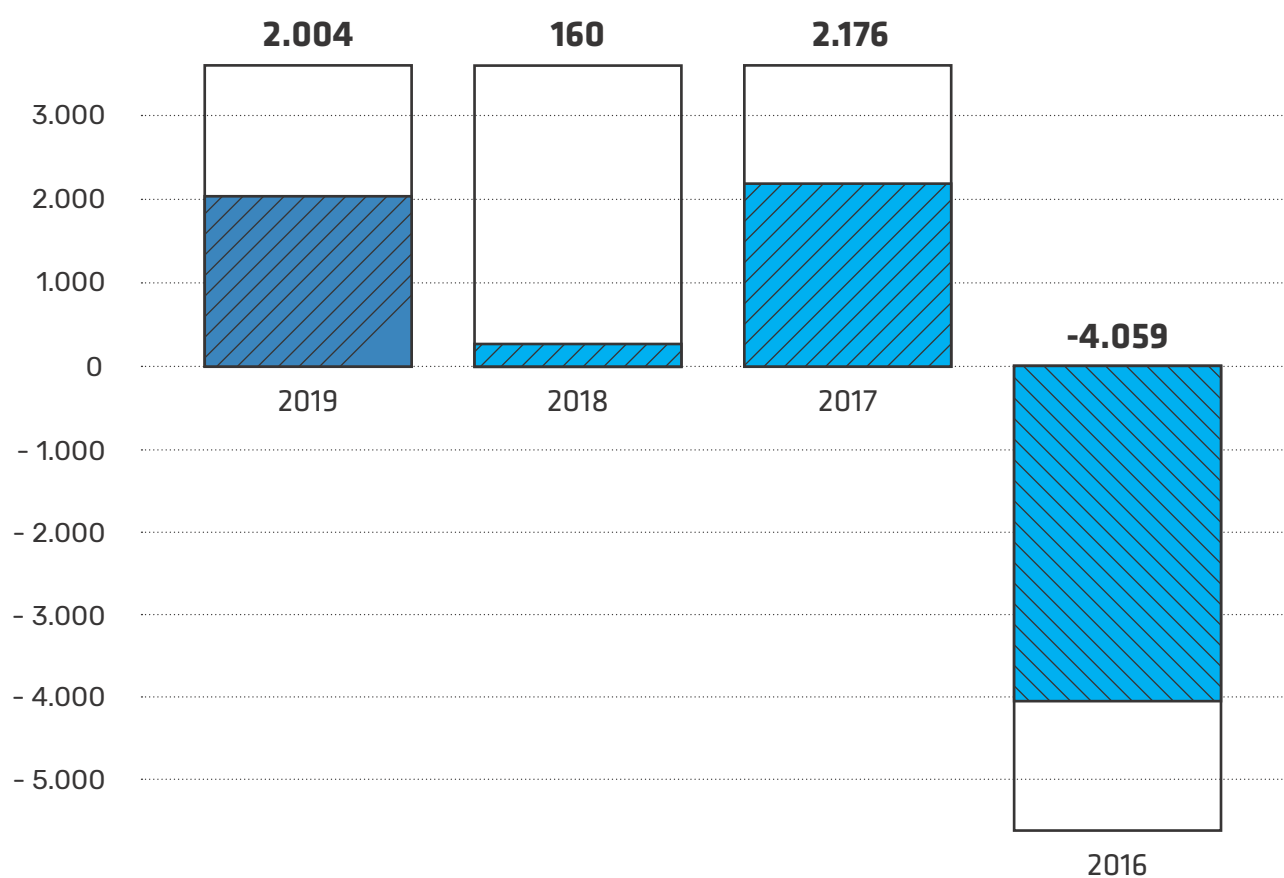
Laba Usaha / dalam miliar rupiah

Operating Profit / in billion rupiah



Laba Bersih / dalam juta rupiah

Net Profit / in million rupiah



DESKRIPSI. Description**2019****2018****2017****2016****PROFITABILITAS.** Profitability

Rasio Lancar ● Current Ratio	31.99x	17.50x	42.72x	25.19x
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha ● Operating Income to Operating Revenue	13.10%	2.86%	16.59%	2.70%
Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha ● Operating Expense to Operating Revenue	86.90%	97.14%	83.41%	97.30%
Marjin Laba Bersih ● Net Profit Margin	12.98%	1.19%	17.75%	-36.64%
Tingkat Pengembalian Aset ● Return on Equity (RoE)	0.97%	0.08%	1.09%	-2.49%
Tingkat Pengembalian Ekuitas ● Return on Equity (RoE)	3.68%	0.40%	4.52%	-32.94%
Rasio Perputaran Aset ● Total Asset Turnover	7.49%	6.97%	6.15%	6.80%
Laba (rugi) terhadap Jumlah Aset ● Profit (loss) to Total Assets	0.98%	0.20%	1.02%	0.18%
Laba (rugi) terhadap Ekuitas ● Profit (loss) to Equity	3.71%	0.96%	4.23%	2.43%
Liabilitas terhadap Ekuitas ● Debt to Equity Ratio	2.78x	3.80x	3.14x	12.21x
Liabilitas terhadap Jumlah Aset ● Debt to Total Assets	73.58%	79.18%	75.86%	92.43%

Ikhtisar PDPP

- Investor's Protection Fund Highlights

DESKRIPSI. Description**2019****2018**

Bank ● Bank	33,615,606	21,729,174
Deposito Berjangka ● Time Deposit	166,631,206,602	129,260,443,698
Surat Berharga Negara ● Government Securities	24,993,750,000	33,129,350,000
Piutang Bunga ● Interest Receivables	920,991,746	856,425,261
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal ● IPF Membership Receivables	9,327,137	-
Liabilitas ● Liabilities	-3,504,066,704	-2,569,818,043
Aset Bersih ● Net Asset	189,084,824,388	160,698,130,090

Ikhtisar Pemegang Saham

- Shares Highlight



PEMEGANG SAHAM. Shareholder

% Kepemilikan. Ownership %

Bursa Efek Indonesia (BEI) ● Indonesia Stock Exchange	33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) ● Indonesian Clearing and Guarantee Corporation	33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ● Indonesia Central Securities Depository	33.33%
JUMLAH ● Total	100.00%



Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019

... Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2019 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan.

With the blessing and grace of God, the Board of Commissioners and Directors of P3IEI delivered the 2019 Annual Report of P3IEI to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far, and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2019 P3IEI Annual Report has been published in full and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.

- Responsibility for the 2019 Annual Report



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA

• • •

President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS

• • •

Commissioner



Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA

• • •

President Director



Widodo

DIREKTUR

• • •

Directors



Laporan **1** Kepada Pemangku Kepentingan

LAPORAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

– Board of Commissioners & Board of Directors Report

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan serta nasihat atas kegiatan yang telah dijalankan oleh Manajemen Perseroan pada tahun 2019.

Dear Honored Shareholders,

On this occasion, in the capacity of the Board of Commissioners, we would like to deliver reports related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing help, input, and advice on operations undertaken by the Company's Management in 2019.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Performance Assessment of Directors

Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan berdasarkan *Key Performance Index* 2019, kami menilai Direksi Perseroan telah berusaha untuk melaksanakan Program Kerja dengan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dari berbagai indikator keuangan antara lain Laba Usaha yang meningkat sebesar 424,77% atau Rp1,63 miliar, Kenaikan laba bersih tersebut disebabkan oleh jumlah pendapatan usaha sebesar Rp15,43 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 14,81% atau sebesar Rp1,99 miliar dari tahun 2018.

Sumber pendapatan usaha Perseroan tersebut berasal dari jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan hasil investasi dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP). Pada tahun 2019, P3IEI juga telah berhasil mengembangkan DPP dengan nilai DPP meningkat sebesar 17,66% atau sebesar Rp28,38 miliar menjadi Rp189,08 miliar. Sedangkan kenaikan hasil investasi sebesar Rp2,17 miliar atau sebesar 36,28% menjadi Rp8,16 miliar dari tahun 2018.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan. Namun pastinya tidak cukup puas sampai di sini, kami yakin kedepannya Direksi akan bekerja lebih baik lagi untuk mencapai kemajuan untuk pengembangan Perseroan pada tahun mendatang, sehingga keberadaan Perseroan dirasakan kemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan.

Kami juga senantiasa mengevaluasi

Based on the assessment and supervision that has been carried out based on the 2019 Key Performance Index, we assessed that the Company's Directors have tried to implement the Work Program quite well, this is indicated by various financial indicators including Operating Income which increased by 424.77% or Rp1.63 billion. The increase in net profit was due to total operating revenues of Rp15.43 billion or an increase of 14.81% or as much as Rp1.99 billion from 2018.

The source of the Company's business income comes from the management services of the Investor Protection Fund (IPF) and the investment proceeds from the Investor Compensation Reserve (CGRP) fund. In 2019, P3IEI has also succeeded in developing IPF with the IPF value increasing by 17.66% or amounting to Rp28.38 billion to Rp189.08 billion. While the increase in investment returns by Rp2.17 billion or 36.28% to Rp8.16 billion from 2018.

The Board of Commissioners considers that the improvement in performance in the role of P3IEI as the Organizer of Investor Protection Fund should be appreciated. This is the result of the hard work of the Directors, Management Team and all Employees. However it's not the end of the journey, we are sure that in the future the Directors will work better to achieve the Company's progress and development in the coming year, so that the Company's existence shall have more advantages for the stakeholders.

We also constantly evaluate the Company's performance, which includes investment activities, financial reporting, human

- kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik. Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2019.

resource development as well as on supporting aspects of the Company's activities such as risk management and the implementation of good corporate governance. As an obligation to carry out supervision of the Company, the Board of Commissioners regularly holds meetings with the Directors through regular monthly meetings between the Board of Commissioners and the Directors of the Company.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude and appreciation to the Directors and all employees for their dedication, hard work and cooperation so that the Company can provide added value to stakeholders and show good performance in 2019.

Penerapan Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari Praktik Tata Kelola Perseroan yang baik. Dalam penilaian Praktik Tata Kelola Perseroan yang baik, P3IEI mendapatkan nilai cukup baik dengan skor 69,07 berdasarkan penilaian yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Perseroan sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa performa Praktik Tata Kelola Perseroan sudah cukup baik dilaksanakan oleh Tim Manajemen P3IEI. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* dimana hal ini tertuang dalam *Key Performance Index* 2019 dan Kontrak Kinerja Karyawan 2019. Transparansi diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha untuk mengungkapkan

informasi keuangan dan non-keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti penyampaian Laporan Keuangan DPP dan PDPP selama tahun 2019, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham Perseroan. Tidak hanya itu, pengungkapan informasi Perseroan juga tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perseroan dalam mengelola DPP, namun juga informasi yang disampaikan dalam bentuk buletin triwulanan dan *press release* kepada berbagai pihak.

Prinsip Tanggung Jawab diwujudkan Perseroan dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, juga ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Independensi diimplementasikan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas,

dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan menerapkan prinsip Kewajaran dengan pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Dari hasil pengawasan yang kami lakukan, P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG tersebut. Guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK, instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

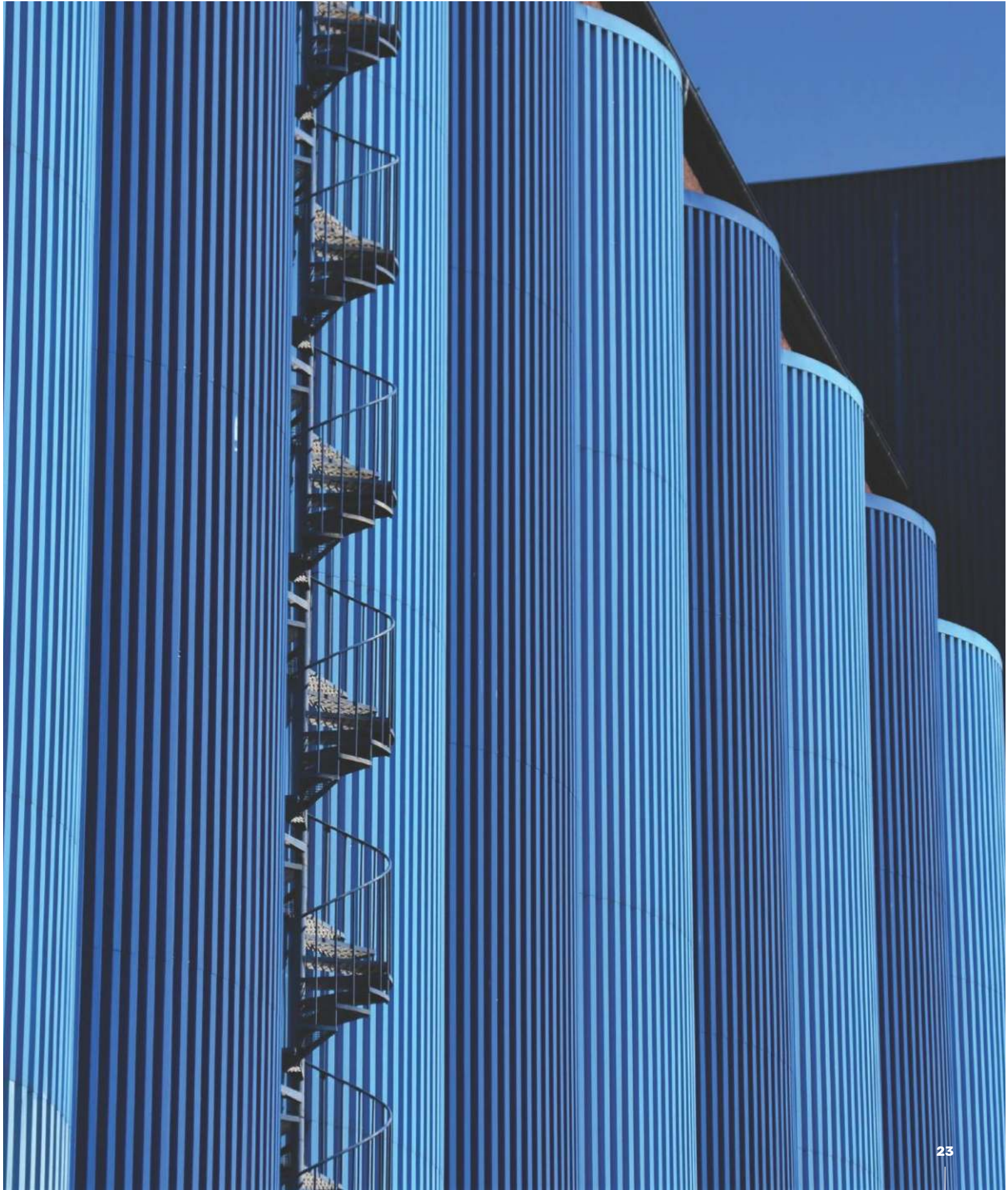
In running its business, the Company always upholds the principles of accountability, transparency, responsibility, independence and fairness which are the main aspects of Good Corporate Governance Practices. In assessing good corporate governance practices, P3IEI scored quite good with a score of 69.07 according to the self-assessment as provided on Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019. This shows that the performance of the Corporate Governance Practices is quite well implemented by the P3IEI Management Team. The Company applies the principle of accountability by formally compiling clear task and responsibility details for each position by considering the separation of checks and balances functions and mechanisms where this is stated in the Key Performance Index 2019 and the Employee Performance Contract 2019. Transparency is realized by

the Company by always seeks to disclose financial and non-financial information to various interested parties such as the submission of the IPF and IPF Institution's Financial Statements during 2019, Annual Activity Reports, and Annual Reports to the Financial Services Authority (OJK) and the Company's Shareholders. Not only that, disclosure of Company information is also not limited to mandatory information such as disclosure of the Company's performance in managing IPF in 2019 which is delivered in the form of quarterly bulletins and press releases to various parties.

The Responsibility Principle is realized by the Company by complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and so forth. Independence is implemented by the Company by always respecting the rights and obligations,

duties, responsibilities and authorities of each organ of the Company. The Company applies the principle of Fairness with the fulfillment of the rights of the Stakeholders to receive fair, equal, and free treatment of bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that have nothing to do with performance.

From our supervision, Indonesia SIPF has succeeded in developing infrastructure, both office infrastructure, and application development to support the ongoing operation of office operations. The Company will continue to strive to carry out its operational activities by always referring to the GCG Principles. In order to further improve the quality of the Company's governance and the development of the Company in the future, the Company always strives to fulfill all the provisions and regulations set by the OJK, related agencies in carrying out its operational activities.





Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Views on Business Prospects

••• Dalam menjalankan bisnis pada tahun 2020, Dewan Komisaris melihat peluang serta kendala secara umum sebagai berikut;

1. Mencari alternatif sumber pendanaan DPP dan bisnis model terkait perlindungan pemodal yang paling sesuai untuk P3IEI.
2. Memperluas cakupan jenis investasi yang dapat dilindungi oleh P3IEI.
3. Mengkaji kesiapan P3IEI menjadi Administrator *disgorgement & disgorgement fund*.

In running the business in 2020, the Board of Commissioners sees opportunities and obstacles in general as follows;

1. Looking for alternative IPF funding sources and business models related to investor protection that are most suitable for P3IEI.
2. Expand the range of investment types that can be protected by P3IEI.
3. Reviewing the readiness of P3IEI to become the administrator of disgorgement & disgorgement funds.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes to The Composition of The Board of Commissioners

Berdasarkan RUPS pada tanggal 21 Juni 2019 telah disetujui perubahan Dewan Komisaris yang dicantumkan pada Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0300448.

Based on the General Meeting of Shareholders on June 21, 2019, it was agreed that changes to the board of commissioners listed in Notarial Deed No. 5 dated June 21, 2019 made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta and also registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.03 -0300448.

Nama Jabatan. Position Name	Masa Jabatan. Length of Service	
	2016-2019 (hingga 21-6-2019) (up to 6-21-2019)	2019-2022 (mulai 21-6-2019) (starting 6-21-2019)
Komisaris Utama » President Commissioner	Bacellius Ruru	Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris » Commissioner	Hari Purwantono	Roni Gunardi

Kata Penutup

Closing Remarks

- Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our gratitude to all Shareholders and stakeholders for the support and trust mandated to the Board of Commissioners. Furthermore, we would like to thank and appreciate all parties for their participation so far, both the Management and employees, the Government of the Republic of Indonesia, OJK, the Company's Shareholders and other parties. May God always give His grace and gifts to us in order to achieve success in the coming years.


Dewi Arum Prasetyaningtyas
 KOMISARIS UTAMA
 ...
 President Commissioner


Roni Gunardi
 KOMISARIS
 ...
 Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Pemegang Saham yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan senantiasa menjaga fokusnya untuk menjalankan peran sebagai Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) di tengah berbagai perkembangan dan tantangan di Industri Pasar Modal. P3IEI berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta Program Kerja Perusahaan sesuai RKAT 2019, guna meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari risiko hilangnya aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek yang melakukan fungsi kustodian dan bank kustodian.

Dear Honored Shareholders,

Throughout 2019, the Company has always maintained its focus to carry out its role as Institution for Providing Investor Protection Fund (PDPP) amid various developments and challenges in the Capital Market Industry. Indonesia SIFP is oriented towards achieving the vision and mission and the Company's Work Program in accordance with RKAT 2019, in order to increase investor confidence in investing in the Indonesian Capital Market. As stated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning the Capital Protection Fund (DPP) and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Capital Protection Funds (PDPP), Indonesia SIFP has the authority to organize and manage DPPs formed to protect investors from the risk of loss of investor assets held at securities companies that carry out custodian and custodian bank functions.

Analisis atas Kinerja Perusahaan**\ Analysis of Company Performance****Kebijakan Strategis**

» Strategic Policy

- Berdasarkan Visi dan Misi yang dimiliki oleh Perusahaan, P3IEI merumuskan tujuan utama untuk tahun 2017-2019 yaitu:

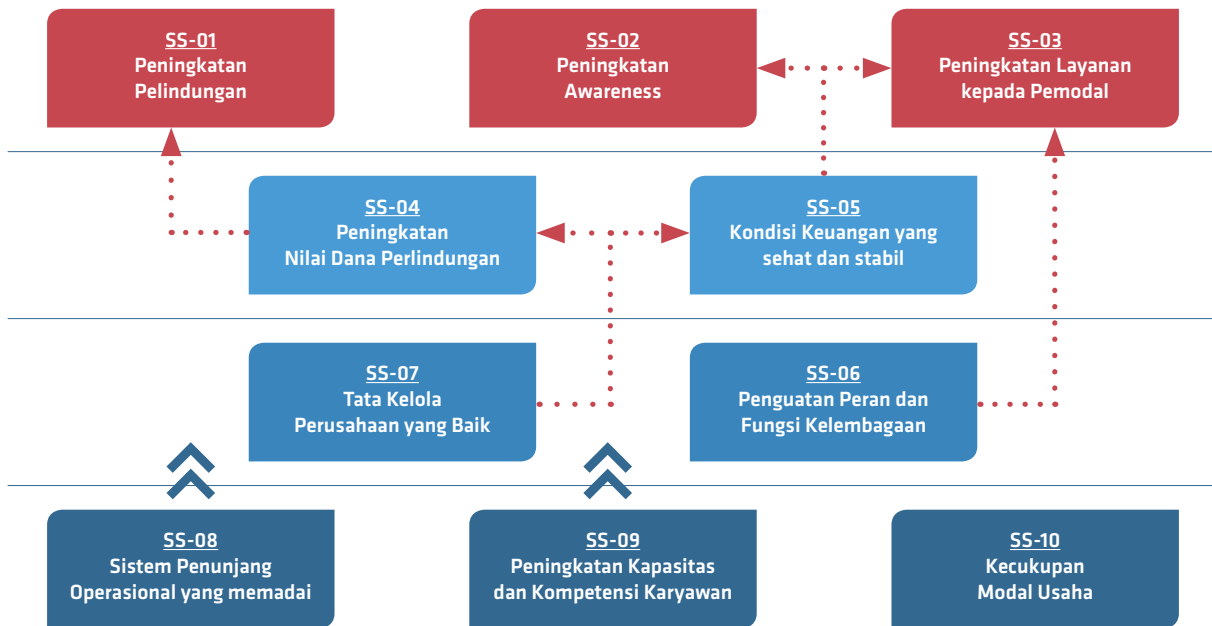
→ *"Menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan memberikan perlindungan atas risiko kehilangan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian ganti rugi sekurang-kurangnya Rp150 juta per pemodal dan/atau Rp100 miliar per Kustodian pada tahun 2019"*

Based on corporate vision and mission statement, Indonesia SIFP has established a main objective for the years 2017-2019, which is:

→ *"To become a Provider of Investor Protection Fund that is credible and able to offer coverage for the risk of loss of investor's asset in Indonesian Capital Market through distribution of compensation amounting at least Rp150 million per investor and/or Rp100 billion per custodian in 2019"*

▷▷ P3IEI kemudian merumuskan Rencana Strategis Perusahaan tahun 2017-2019 dalam bentuk empat perspektif kerja untuk mencapai tujuan utama tahun 2017-2019 tersebut, yaitu:

Indonesia SIPF subsequently formulated Corporate Strategic Plan for the years 2017-2019 in the form of four work perspectives in order to achieve said main objective, which are:



1. Perspektif Pelanggan

Kami berupaya meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan utama terhadap pelayanan Perusahaan sebagai PDP, dengan menentukan tiga target berikut:

- Peningkatan cakupan perlindungan pemodal berupa peningkatan batasan ganti rugi pemodal sebesar 50 persen (Rp150 juta per pemodal) dan per Kustodian sebesar 100 persen (Rp100 miliar per Kustodian);
- Peningkatan pemahaman mengenai isu perlindungan pemodal bagi pemangku kepentingan P3IEI, terutama Investor, calon Investor, dan Anggota DPP;
- Peningkatan layanan kepada Pemodal dan Anggota berupa tiga layanan, yaitu layanan pengaduan, layanan edukasi dan sosialisasi, dan layanan informasi anggota.

2. Perspektif Finansial

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan perlindungan Pemodal yang memadai, kami menargetkan tercapainya tujuan-tujuan berikut untuk menunjang ketahanan keuangan perusahaan:

- Peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal melalui pemungutan iuran keanggotaan serta pengelolaan yang optimal;
- Optimalisasi pendapatan usaha dan pengelolaan beban usaha yang efektif dan efisien;
- Pengelolaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), yang optimal dan akuntabel;

3. Perspektif Pembangunan Kapasitas Institusi

Kami senantiasa mengelola kapasitas institusi untuk menunjang proses pelaksanaan layanan perlindungan pemodal. Hal ini turut diterjemahkan dalam bentuk penetapan target berikut:

- Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan dengan mengembangkan layanan tambahan terkait fungsi layanan pemodal dan anggota;
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik lewat operasionalisasi organisasi yang efektif dan efisien, serta mengacu pada kaidah GCG.

1. Customer Perspectives

We strive to enhance its main stakeholders' satisfaction towards the company's service as Provider of Investor Protection Fund, through the setting of these following targets:

- Increase of investor protection coverage in the form of increase in investor compensation limit of 50 percent (Rp150 million per investor) and 100 percent per custodian (Rp100 billion)
- Increase of stakeholder comprehension regarding the issue of investor protection, especially among investors, potential investors, and members of Investor Protection Fund
- Improvement of Service for Investors and Members through three services, namely grievance services, investor notification services, and member information services

2. Financial Perspectives

In order to support the proper implementation of investor protection services, we aim to achieve these following objectives to sustain our company's financial fortitude:

- Increase of Investor Protection Fund value through the membership fee and optimum investment management;
- Optimization of effective and efficient expenses to revenue ratio;
- An optimum and accountable investment management of Investor Reserve Funds (CGRP)

3. Internal Process Perspectives

We steadfastly manage our institution's capacity to support the implementation process of investor protection services. This is also translated into the form of the following set of goals:

- Reinforcement of institutional role and function through the development of additional services regarding the functions of investor and member services
- Implementation of Good Corporate Governance through effective and efficient operationalization of organization that is compliant towards GCG guidelines

▷▷ 4. Perspektif Edukasi dan Pengembangan

Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan Perusahaan merupakan isu penting yang menjadi perhatian kami. Agar keduanya terlaksana dengan baik, kami melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya dengan target sebagai berikut:

- Terpenuhinya sistem penunjang operasional yang memadai;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan;
- Ketersediaan modal usaha Perusahaan yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan Perusahaan.

4. Learning and Growth Perspectives

The ability to execute tasks and functions and achieve organizational goals are important issues that receive our special attention. In order to ensure that both are achieved properly, we carry out fulfilment of resource requirement through the Learning and Growth perspective with these following targets:

- Fulfilment of proper operational support system
- Increase of employee capacity and competence
- Sufficiency of organizational Capital through increase of Authorized Capital and Issued Capital

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan Target

Comparison between The Results to The Target

- Masing-masing perspektif kerja yang dimiliki oleh P3IEI memiliki rincian target yang harus dicapai. Target-target tersebut merupakan indikator penentu keberhasilan Perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan layanannya. Tercapainya target-target tersebut juga membantu Perusahaan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan lebih baik.

Dari segi Perspektif Pelanggan, Perusahaan menetapkan target berupa Usulan Peningkatan Besaran Nilai Ganti Rugi Pemodal, Nilai Dana Perlindungan Pemodal, Tingkat Pemahaman Pemangku Kepentingan, dan Implementasi Portal Anggota DPP. Usulan Peningkatan Besaran Nilai Ganti Rugi Pemodal sudah mencapai tahap 80 persen pada bulan Desember 2019, yang mana kajiannya sedang dalam tahap finalisasi oleh Direksi dan akan disampaikan kepada OJK pada Semester I 2020. Nilai Dana Perlindungan Pemodal per 31 Desember 2019 sudah mencapai Rp189,08 miliar, atau tumbuh sebesar 17,66 persen dibandingkan posisi DPP per 31 Desember 2018. Tingkat Pemahaman Pemangku Kepentingan diukur dalam bentuk survei, dimana per 31 Desember 2019 tingkat pemahaman Anggota DPP mengenai fungsi dan peran Perseroan yaitu sebesar 100 persen, sedangkan dari Calon Investor sebesar 61 persen dan Investor sebesar 81 persen. P3IEI juga sudah menyelesaikan Portal Anggota DPP di website Indonesia SIPP, yang mana per 31 Desember 2019 sudah siap untuk dilanjutkan dengan implementasi program layanan perlindungan pemodal yang akan dijalankan di tahun 2020. Terakhir, P3IEI juga mencatatkan pencapaian dalam kinerja penggunaan media sosial perusahaan yaitu akun Instagram @indonesiaSIPP. Per bulan Desember 2019, akun Instagram @indonesiaSIPP sudah memiliki jumlah pengikut sebesar 3.342 akun, dengan jumlah impression pada periode tersebut sebesar 404.983 poin dan jumlah *engagement* sebanyak 9.845 kali.

P3IEI menetapkan tiga target untuk mengukur Perspektif Finansial. Target yang menjadi indikator keberhasilan Perusahaan dalam Perspektif Finansial adalah peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal dan kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal sendiri telah mencapai angka Rp189,08 miliar, atau 17,66 persen lebih tinggi dari nilai Dana Perlindungan Pemodal tahun 2018. Angka ini secara terus-menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2013, yaitu dari Rp46,27 miliar di tahun 2013, menjadi Rp84,60 miliar di tahun 2014, Rp98,82 miliar di tahun 2015, Rp120,52 miliar di tahun 2016, Rp139,18 miliar di tahun 2017, Rp 160,70 miliar di tahun 2018, dan menjadi Rp 189,08 miliar pada tahun 2019. Adapun kondisi keuangan yang sehat dan stabil diukur dari pengelolaan rasio beban usaha terhadap pendapatan usaha, dimana P3IEI berhasil mencapai rasio sebesar 85 persen, lebih efisien dibandingkan target yang

Each of the work perspectives that we have determined possess details of targets to be achieved. The targets are indicators that ascertain our success in developing our business and improving our services. Furthermore, the achievements of said targets enable us to better accommodate the needs of each stakeholder.

From the Customer Perspective, our targets are Proposal for Increase in Investor Compensation Value, Amount of Investor Protection Fund, Level of Stakeholder Comprehension, and Implementation of Investor Protection Fund Members' Portal. The Proposal for Increase in Investor Compensation Value has achieved 80 percent of completion per December 2019, with the study of which currently being finalized by the Directors and will be handed to the Financial Services Authority in the 1st Semester of 2020. Moreover, The Amount of Investor Protection Fund per December 31, 2019 has reached Rp189,08 billion, increasing by 17,66 percent compared to the Investor Protection Fund position per December 31, Further. Next, the Level of Stakeholder Comprehension is measured through survey, in which per December 31, 2019, the sample collection process of Investor Protection Fund Members has been 100 percent completed, while the progress of sample collection from Potential Investors has reached 61 percent and from Investors has reached 81 percent. We also have completed Investor Protection Fund Members' Portal located within the Indonesia SIPP Website, with the portal already prepared to operate per December 31, 2019. Lastly, Indonesia SIPP has recorded an achievement in corporate social media use performance, namely the Instagram account titled @indonesiaSIPP. Per December 2019, the @indonesiaSIPP Instagram account has amassed a follower count of 3.342 accounts, with the total impression for the period numbered 404.983 points and total engagement amounting to 9.845 times.

We have established three targets to measure the achievements of Financial Perspectives. The targets being used as indicators of organizational success in Financial Perspectives are the increase of amount of Investor Protection Fund and overall financial health and stability. The amount of the Investor Protection Fund itself has reached Rp189,08 billion, 17,66 percent higher than the 2018 amount, and has also exceeded the initial target of Rp189,04 billion. This amount has continuously increase on a yearly basis since 2013, from Rp46.27 billion in 2013 to Rp84.60 billion in 2014, Rp98.82 billion in 2015, Rp120.52 billion in 2016, Rp139.18 billion in 2017, Rp160.70 billion in 2018, and become Rp189.08 billion in 2019. As for overall financial health and stability, the indicator is measured through managing the ratio of operating expense to operating revenue, with our achievement being successfully reaching an 85 percent of operating expense to operating revenue ratio,

- ▷▷ ditetapkan sebesar 95 persen. Selain kedua target tersebut, Perusahaan juga mencetak pencapaian berupa peningkatan nilai Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), yaitu dana cadangan dalam hal DPP tidak mencukupi dalam pembayaran klaim, yang meningkat menjadi Rp157,17 Miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp146,87 Miliar. P3IEI juga berhasil menghimpun luran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp 18,23 miliar pada tahun 2019, meningkat dari jumlah tahun 2018 yakni sebesar Rp 17,08 miliar. Terakhir, penambahan 4 Anggota DPP baru turut memberikan kontribusi terhadap luran keanggotaan awal pada tahun 2019 sebesar Rp400 juta.

Untuk Perspektif Pembangunan Kapasitas Institusi, P3IEI menetapkan target berupa penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan dengan mengembangkan layanan tambahan terkait fungsi layanan pemodal dan anggota dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik lewat operasionalisasi organisasi yang efektif dan efisien, serta mengacu pada kaidah GCG. Target ini diukur lewat indikator berupa Nilai Hasil Evaluasi Tata Kelola, Pemenuhan Kewajiban Pelaporan, dan Jumlah Penyelesaian Sistem Penunjang Operasional. Perusahaan telah meraih skor sebesar 69,07 persen dari target 70 persen untuk Nilai Hasil Evaluasi Tata Kelola. Selain itu, Perusahaan juga telah menyelesaikan kewajiban Pelaporan secara penuh, dengan pemaparan laporan yang dilaksanakan pada Januari 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perspektif terakhir yang menjadi fokus P3IEI adalah Perspektif Edukasi dan Pengembangan. Pencapaian untuk Perspektif ini diukur antara lain dari jumlah penyelesaian sistem penunjang operasional, di mana P3IEI telah menyelesaikan 100 persen dari rencana jumlah yang diselesaikan, yaitu sebanyak 4 buah sistem. Indikator selanjutnya yang digunakan adalah nilai dari gap kompetensi karyawan, di mana Perusahaan menargetkan identifikasi atas gap kompetensi karyawan dengan kompetensi minimum untuk masing-masing jabatan sudah terselesaikan per 31 Desember 2019. Identifikasi ini telah terlaksana dan menghasilkan temuan adanya gap kompetensi sebesar 3,56 persen dari kompetensi masing-masing yang dibutuhkan. Kemudian, kami juga untuk pertama kali menetapkan Indikator Tingkat Kematangan Perilaku Karyawan, yaitu untuk mengukur perilaku karyawan dalam bersosialisasi dan berorganisasi dengan target level 3 dari 5

more efficient than initial target of 95 percent. Beside said two targets, Indonesia SIPF has also managed to achieve an increase of Investor Compensation Reserve, a reserved fund to overcome the insufficiency of IPF, which increased to Rp157.17 billion compared to the 2018 amount of Rp146.87 billion. P3IEI has also successfully collected the 2019 Annual Membership Contribution of Rp18.23 billion, an increase compared to the 2018 amount of Rp17.08 billion. Lastly, the new admission of 4 IPF Members has contributed the Initial Membership Contribution in 2019 at the amount of Rp400 million.

For Internal Process Perspectives, we set the targets of reinforcement of institutional role and function through the development of additional services regarding the functions of investor and member services and implementation of Good Corporate Governance through effective and efficient operationalization of organization that is compliant towards GCG guidelines. These targets are measured through indicators of Corporate Governance Scoring Outcome, Fulfillment of Reporting Obligation, and Completed Amount of Operational Support Systems. We have reached the score of 69.07 percent of the targeted 70 percent for Corporate Governance Scoring Outcome. In addition, we have also fulfilled our reporting obligation in entirety, with the disclosure of reports planned to take place in January 2020 in accordance with ratified regulations.

The final perspective receiving our focus is the Learning and Growth Perspective. The achievements of this perspective are measured from indicators such as Completed Amount of Operational Support System, which has reached 100 percent completion rate from our targeted amount of 4 systems. The next indicator that is used is the score of employee competency gap, the target of which is set to contain the identification of bare minimum competency of each job title and be completed per December 31, 2019. This identification process has been completed and produced the outcome of an existing 3.56 percent of competency gap in the area of English proficiency competency. Furthermore, we have also established an indicator of Employee Behavior Maturity Level, with an initial target of level 3 out of 5.

Kendala yang Dihadapi

Obstacles Encountered

- Sepanjang tahun 2019, P3IEI tidak menghadapi kendala yang berarti dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sebagai Perusahaan yang bergerak di Industri Pasar Modal dengan fokus bisnis pada kegiatan investasi, P3IEI menghadapi tantangan berupa fluktuasi dinamika pasar. Sentimen pasar, perkembangan terbaru, dan dampak dari dinamika pasar modal terhadap kinerja perusahaan efek merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh P3IEI dalam menjalankan fungsi investasi, pencatatan, dan manajemen risiko perusahaan. Selain itu, P3IEI menghadapi tantangan berupa dinamika kebutuhan pemangku kepentingan yang mengharuskan Perusahaan untuk senantiasa mengembangkan dan menyesuaikan rencana kerja sesuai urgensi yang muncul dari dinamika tersebut. P3IEI juga menghadapi tantangan dalam menangani pengaduan dan konsultasi yang diajukan oleh pemodal maupun Anggota DPP. Meskipun dihadapkan kepada tantangan-tantangan tersebut, P3IEI berhasil menorehkan hasil pencapaian yang baik pada tahun 2019 dalam berbagai indikator. Pengelolaan DPP dan penyesuaian strategi dengan kondisi pasar pada tahun 2019 bisa dijalankan dan ditangani secara optimal. Keberhasilan

Throughout the year of 2019, Indonesia SIPF did not face significant obstacles in daily operational activities. As a company that operates in the capital market industry with main business focus on investment activities, Indonesia SIPF faces daily threats in the forms of fluctuating market dynamics. Market sentiments, recent developments, and effects of capital market dynamics on securities companies' performance are several challenges that Indonesia SIPF faces in executing its investment, recording and bookkeeping, and risk management functions. Furthermore, Indonesia SIPF also faces the challenge of stakeholder needs' dynamics that require constant development and adjustment of work plans according to urgencies that stem from said dynamics. Indonesia SIPF also encounters challenges in handling grievances and claims from both investor and Investor Protection Fund members. Despite facing the challenges stated beforehand, Indonesia SIPF has succeeded in achieving positive outcomes in different indicators throughout 2019. Both Investor Protection Fund management and adjustment of business strategy with respect to market condition in 2019 were able to be properly executed and handled. This success is a manifestation of

- ▷▷ ini merupakan wujud dari komitmen P3IEI untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan masa depan seraya memperluas kapabilitas perusahaan.

Indonesia SIFP's commitment to provide the best service for entire stakeholders, alongside giving confidence to face future challenges while expanding organizational capabilities at the very same time.

Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha

\\ Description and Analysis of Business Prospects

- Kami menilai prospek usaha P3IEI di masa depan secara umum memiliki beberapa peluang serta tantangan yang perlu dimanfaatkan dan diantisipasi dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan pesat Industri Pasar Modal Indonesia dari sisi jumlah investor serta jenis instrumen membutuhkan perlindungan yang lebih. Hal tersebut menimbulkan peluang untuk memperluas cakupan perlindungan dan sumber pendanaan milik P3IEI. Oleh sebab itu, kami mempersiapkan peninjauan ulang model bisnis dalam bentuk perluasan cakupan investor yang dilindungi, perluasan kewenangan lembaga, serta peluang untuk menjadi administrator *disgorgement & disgorgement fund (DDF)*. Hal ini juga sejalan dengan rencana OJK untuk meningkatkan kualitas administrasi DDF, yang mana menciptakan peluang bagi P3IEI untuk turut ambil bagian di dalamnya. Pemanfaatan dan antisipasi yang baik atas peluang dan tantangan tersebut memungkinkan P3IEI untuk memajukan Industri Pasar Modal Indonesia melalui perannya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Our general view of future business prospects of Indonesia SIFP deem several opportunities and threats that should be properly capitalized and anticipated upon.

The rapid growth and development of Indonesian Capital Market Industry in terms of number of investors and types of instruments calls for the needs of increased protection. This has brought an opportunity to widen Indonesia SIFP's scope of protection and source of funding. Therefore, we are preparing a business model review in the forms of expansion of protected investors, institutional authority, and opportunity to become an administrator of disgorgement & disgorgement funds. This is in line with the Financial Services Authority's blueprint of quality increase in disgorgement & disgorgement fund administration, which provides an opportunity for Indonesia SIFP to partake in. In summary, proper capitalization and anticipation of said opportunities and threats would enable Indonesia SIFP to strengthen Indonesian Capital Market Industry through its role as Investor Protection Fund Provider.

Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku

\\ Corporate Governance Development in The Book Year

- Perseroan selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Sejak tahun 2017 Perseroan telah melakukan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku. Penilaian tersebut meliputi 6 (enam) aspek pokok antara lain:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lain.

Di tahun 2019, Perusahaan kembali melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut. Secara keseluruhan hasil penilaian implementasi GCG memperoleh Kualifikasi Penerapan GCG "Cukup Baik".

Selain itu guna menjaga aspek transparansi dalam tata kelola perusahaan, kegiatan audit telah dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun (internal dan eksternal). Laporan Keuangan P3IEI untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dengan Laporan Keuangan DPP untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material.

The Company is always fully committed to implementing all aspects of good corporate governance (GCG). The effort was carried out by evaluating the implementation of the GCG manual which has been available since 2017 as a reference for Management and Indonesia SIFP employees in their behavior. The assessment covers 6 (six) main aspects, such as:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Board of Commissioners
4. Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other aspects.

In 2019, The Company has re-evaluated the implementation of GCG principles. The overall results of the assessment obtained the GCG Qualification of "Pretty Good".

In addition to maintaining transparency in corporate governance, audit activities have been carried out twice a year (internal and external). Indonesia SIFP Financial Statements for the Years Ended 31 December 2019 and 2018 with the DPP Financial Statements for the Year Ended 31 December 2019, having the auditor's opinion for each report is unqualified opinion, in all material respects.

Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

- Salah satu aset Perusahaan yang memiliki nilai dan keunikan yang tinggi adalah sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena adanya karakteristik dan kompetensi individu tenaga kerja perusahaan yang berbeda-beda, yang dapat menyokong perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan.

Pada tahun 2019, Perusahaan memiliki 11 orang karyawan. Tercatat bahwa 5 orang di antaranya atau sekitar 45 persen merupakan lulusan dari program magister (S2), sedangkan 6 orang sisanya atau sekitar 55 persen merupakan lulusan dari program S1. Adapun secara demografis, 3 orang atau sekitar 27 persen karyawan Perusahaan adalah wanita.

Guna menunjang fungsi pengelolaan *Human Capital*, Perusahaan mengembangkan *Human Resource Information System* pada tahun 2019 untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang dimiliki oleh Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengelolaan dari segi pengembangan *Human Capital*, yaitu dengan melakukan analisis gap kompetensi karyawan terhadap standar kompetensi yang diharapkan. Analisis gap kompetensi ini ditindaklanjuti dengan program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan pada *Training Needs Analysis*, sehingga kompetensi yang dipelajari oleh karyawan adalah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan untuk menjalankan fungsinya di Perusahaan.

One of the company's assets that is considered highly valuable and unique is Human Capital. This is caused by individual differences in characteristics and competency, which could in turn support the company in improving its overall performance.

In 2019, SIPP had 11 employees. It is recorded that 5 employees out of 11 or about 45 percent of its employees possess a master degree, whereas the other 6 employees or about 55 percent possess undergraduate degrees. Demographically, 3 employees or about 27 percent of the company's workforce are women.

In order to support Human Capital management function, the Company developed a Human Resource Information System in 2019 with the objective of integrating the employment data possessed by the Company. Furthermore, the Company also conducted the Human Capital management process through its development aspects, namely by analyzing the gap between employee's actual competencies and the expected standards of competency. This competency gap analysis was followed by training and development programs founded upon Training Needs Analysis, in order to ensure that the competencies acquired by the employees are those that are best suited with their needs in order to fulfil their roles in the Company.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Human Capital Management

••• Komite Klaim

Selama tahun 2019 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Komite Investasi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2019, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

Pada tahun 2019 secara spesifik, Komite Investasi Perseroan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP, CGRP, dan Modal Perusahaan sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan.

Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2019 dibukukan sebesar Rp680,28 Juta. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal(CGRP) hingga Desember 2019 adalah sebesar Rp11.640.911.487 atau 103,73 persen dari target RKAT 2019 sebesar Rp11.222.767.123. Selanjutnya, per akhir 2019, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp10 Miliar atau 6,67 persen dari total portofolio CGRP dengan rate 7,95 persen p.a tenor 3 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp140 Miliar atau 93,33 persen dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,20 persen dan tenor 7,25 tahun. Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2019 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp3.196.217.995 atau 104,22 persen dari target RKAT 2019 sebesar Rp3.066.941.137. Selain itu, per akhir Desember 2019, komposisi portofolio Modal PDPP terdiri dari instrumen

Claim Committee

Throughout the year of 2019, there was no event of loss of investor assets that requires compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Investment Committee

In carrying out its duties and responsibilities, as stipulated in the Investment Committee Charter that the Investment Committee holds Committee Meetings regularly every month, throughout 2019, Indonesia SIPP has held 12 (twelve) Committee Meetings.

Specifically in the year of 2019, the Company's Investment Committee in carrying out its role and function will always maintain the diversity of investment instruments in IPF management in accordance with the corridors of the Investment Policy Guide owned by the Company.

While the average monthly net investment return of the IPF in the year 2019 was booked at Rp680.28 Million. The realization from gain of Investor Compensation Reserve investment until December 2019 has amounted to Rp11,640,911,487 or 103,73 percent from the targeted 2019 Annual Work Plan and Budget amount of Rp11,222,767,123. In addition, per the end of 2019, the composition of Investor Compensation Reserve (CGRP) portfolio is comprised of timed deposit instrument amounting to Rp10 billion and 6.67 percent of CGRP portfolio with 7.95 percent rate p.a and 3 months of tenor, and private obligation instrument amounting to Rp140 billion or 93.33 percent of CGRP portfolio with 9.20 percent weighted average of coupon and 7.25 years of tenor. The realization of Interest and Current Account Service Income of Investor Protection Fund Provider capital investment until



Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan investasi, pada tahun 2019 hasil investasi bersih mencatatkan pencapaian peningkatan DPP sebesar 36,33% dari Rp5,99 Miliar pada tahun 2018 menjadi Rp8,16 Miliar pada tahun 2019.

By prioritizing aspects taken into consideration in managing the IPF, the net investment return of the IPF this year increased 36.33% from Rp5.99 Billion in 2018 to Rp8.16 Billion in 2019.

- ▷▷ deposito berjangka sebesar Rp5,2 Miliar atau 12,94 persen dari total portofolio dengan rate 7,87 persen p.a tenor 2,15 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp35 Miliar atau 87,06 persen dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,45% dan tenor 4,37 tahun.

Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal & Hukum

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas yang dimilikinya terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan P3IEI. Beberapa capaian dalam eksekusi tersebut mencakup kegiatan hubungan dengan media, hubungan internasional, sosialisasi lembaga, dan pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pada tahun 2019, capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan meliputi pembuatan rilis pers kepada media dan masyarakat, pembangunan hubungan kelembagaan dengan lembaga *Investor Protection Fund* (IPF) regional yaitu *Securities Investor Protection Corporation* (SIPC) - Amerika, *Japan Investor Protection Fund* (JIPF) - Jepang dan *Securities Exchange Guarantee Corporation* (SEGC) - Australia, sosialisasi kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media (buletin triwulan, situs web, pembuatan Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan), serta pengembangan layanan portal pemodal dalam rangka peningkatan proteksi dan keterbukaan informasi.

December 2019 has amounted to Rp3,196,217,995 or 104.22 percent of targeted 2019 Annual Work Plan and Budget amount of Rp3,066,941,137. Furthermore, per the end of December 2019, the composition of Investor Protection Fund Provider Capital Portfolio is comprised of timed deposit instrument amounting to Rp5.2 billion or 12.94 percent of total portfolio with 7.87 percent rate p.a and 2.15 months of tenor, and private obligation instrument amounting to Rp35 billion or 87.06 percent of total portfolio with weighted average of coupon amounting to 9.45 percent and 4.37 years of tenor.

Corporate Secretary, Investor Protection & Law

Throughout the year of 2019, the Corporate Secretary has carried out relevant functions and tasks related to the needs of Indonesia SIPP's stakeholders. Several achievements in regards to its execution cover media relations, international relations, institutional socialization, and management of stakeholder relations. In 2019, the milestone of events carried out by Corporate Secretary includes formation of press release for media and society at large, establishment of institutional relations with regional Investor Protection Fund (IPF) firms, namely Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - US, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan, and Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia, socialization towards stakeholders throughout various forms of media (trimonthly bulletin, website, creation of Annual Report and Activities Report), and development of investor portal services in relation to increase of protection and information transparency.

Pengawasan Internal dan Kepatuhan

Internal Control System

- Sebagai bentuk komitmen kami untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anggota DPP, kami melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal di tahun 2019. Keberhasilan utama kami dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan kepatuhan mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan dengan metode *Balanced Scorecard*, serta Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Aspek kedua adalah peningkatan sistem penunjang maupun pedoman kerja perusahaan, yaitu pengembangan sistem penunjang operasional berbasis teknologi informasi dan pelaksanaan evaluasi dan pembaruan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan serta kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG). Aspek terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, baik melalui rapat koordinasi pemantauan kinerja maupun kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

As a manifestation of our commitment to provide the best protection and service for members of the Investor Protection Fund, we have conducted an evaluation on our internal control system in 2019. Our major milestones in improving internal control systems consist of three aspects. The first aspect is drafting of Strategic Plan and Corporate Work Plan based on the Balanced Scorecard Method, alongside Performance Standard and Performance Assessment Evaluation for Employees based on Key Performance Indicator (KPI). The second aspect is the improvement of corporate supporting system and work guidelines, namely the development of IT-based operational supporting systems and renewal of Corporate Standard Operating Procedure and Good Corporate Governance activities. The last aspect in the milestone is supervision and evaluation, both through performance supervision coordination meetings and internal investigative activities conducted by Internal Supervision and Compliance Unit.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Board of Directors and The Reasons of Changes

- Pada tahun buku 2019, tidak ada perubahan komposisi anggota Direksi.

In fiscal year 2019, there was no change in the composition of the members of the Board of Directors.

Ucapan Terimakasih

Thank-You Note

- Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

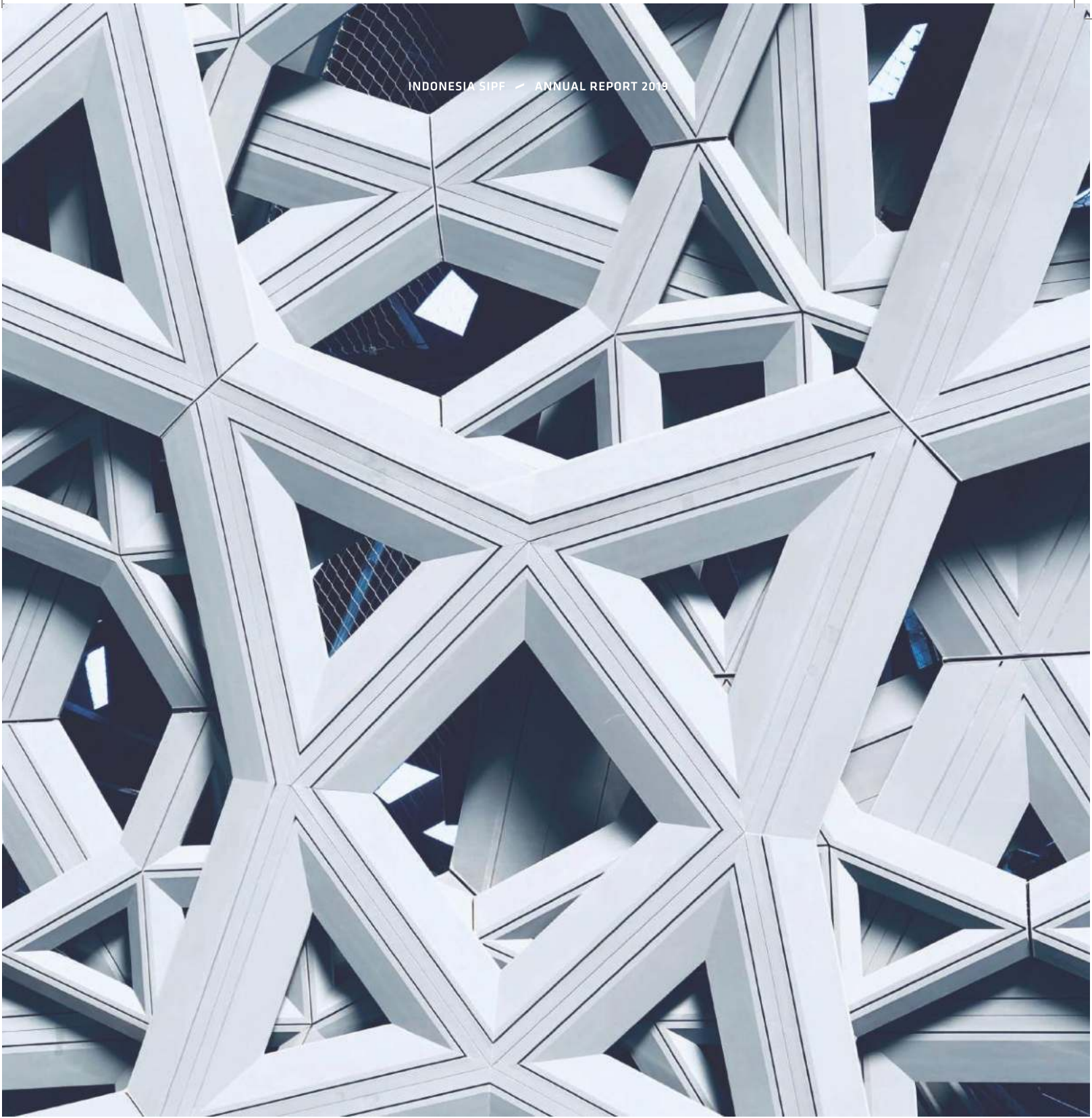
Kami menyadari bahwa segala pencapaian pada tahun 2019 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para Pemangku Kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Terima kasih kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

We are grateful for all the abundance of grace and gifts from God, so that Indonesia SIPP can become an Investor Protection Fund Operator in accordance with the applicable regulations.

We realize that all achievements in 2019 can not be separated from the support of all levels of Indonesia SIPP and the Stakeholders. We thank all the Parties who have provided support to us in carrying out the Company's operations. Thank you to OJK as the Capital Market regulator in Indonesia, to BEI, KPEI and KSEI as shareholders of the Company, Board of Commissioner and to all parties for their cooperation in realizing a trustworthy Investor Protection Fund Operator. We would like to thank all the Company's employees who have worked optimally so we can realize our shared ideals, namely increasing confidence in the security of investing in the Indonesian capital market through the formation of an IPF.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIPP will be able to be a part in increasing investor confidence in investing in the Indonesian Capital Market.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ignatius Girendroheru', written over a thin horizontal line.

Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA



President Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Widodo', written over a thin horizontal line.

Widodo

DIREKTUR



Directors



Profil 2 Perusahaan

Informasi Umum

General Information

Nama dan Domisili Perusahaan

\ Company Name and Domicile

PT. Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek Indonesia
(PT P3IEI)

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

» Based in Jakarta, Indonesia

Alamat Perusahaan

\ Company Address

Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

» Phone +6221 - 5155553

» Fax +6221 - 5155556

» Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id

» www.indonesiasipf.co.id

Tanggal Pendirian

\ Date of Establishment

7 Desember 2012 » December 7, 2012

Modal Dasar

\ Authorized Capital

Rp 120 Miliar » Rp 120 Billion

Modal Ditempatkan

\ Issued Capital

Rp 60 Miliar » Rp 60 Billion

Kepemilikan

\ Ownership

33.33%

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
» Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

33.33%

Bursa Efek Indonesia (BEI)
» Indonesia Stock Exchange

33.33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
» Indonesia Central Securities Depository

Jumlah Pegawai

\ Number of Employees

Per Desember 2019 sebanyak 11 orang

» As of December 2019 there were 11 people



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - » Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Markets

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal

- » Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

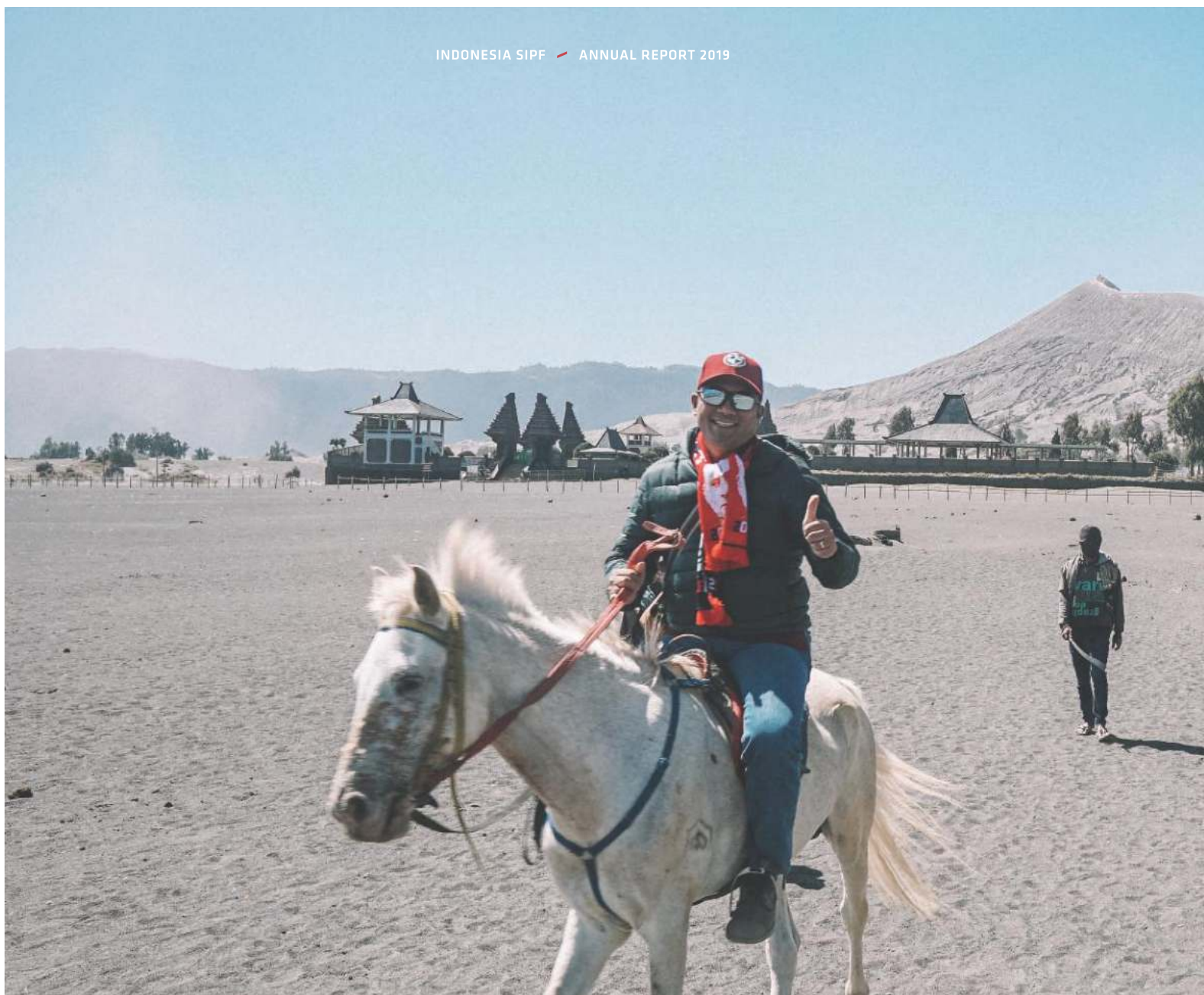
- » Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds

Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik

- » Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

- » Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia



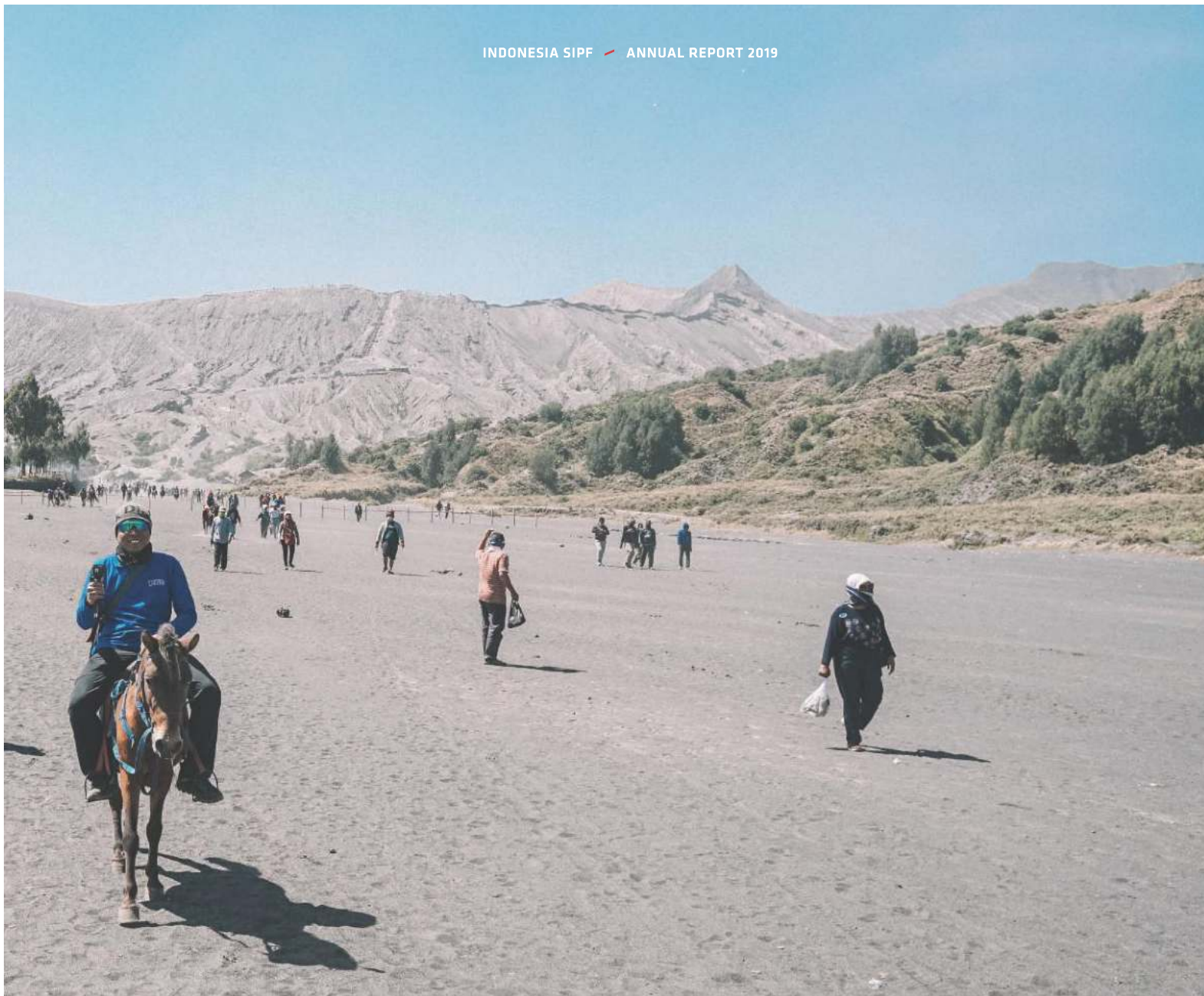
Riwayat Singkat Perusahaan

••• Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK") in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended the establishment of the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure which comprises regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.



Brief History of The Company

... Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, *Technical Assistant* dari *Asian Development Bank* (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5

In the period of 2010 to 2012, further research was carried out to prepare the Establishment of Investor Protection Funds by the Indonesia Stock Exchange Team on the feasibility of Establishing Investor Protection Funds. Subsequently on September 23, 2012, Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) recommended the establishment of a new company or institution as a place for investor protection.

Based on the needs and studies mentioned above, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) was established as a company that will conduct the Investor Protection Fund Program. With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman

- Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2019 telah terdapat 106 (seratus enam) Perantara Pedagang Efek dan 22 (dua puluh dua) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang dititipkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has been converted to Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2019 there have been 106 (one hundred and six) Brokers and 22 (twenty two) Custodian Banks that administered Securities Accounts that were members of the IPF.

In order to increase investors' confidence in the Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve funds to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permits to compensate for the loss of Investors' assets as referred to in POJK No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use of ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

With regards to the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted pursuant to the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulted at 0.23 (zero point two three) was obtained which then outlined by Indonesia SIPF Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Amount of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.

In 2015, precisely on August 10, 2015 to coincide with the 38th anniversary of the reactivation of the Indonesian Capital Market, which was attended by President Joko Widodo, the highest limit for investor compensation was set at Rp 100 million per Investor or an increase of 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per custodian as stated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.

Pada 2015, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 bertepatan dengan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. 46/D.04/2015.



Kegiatan dan Bidang Usaha

Corporate Activities and Scope of Business

... Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik. Pasal 3 berhubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

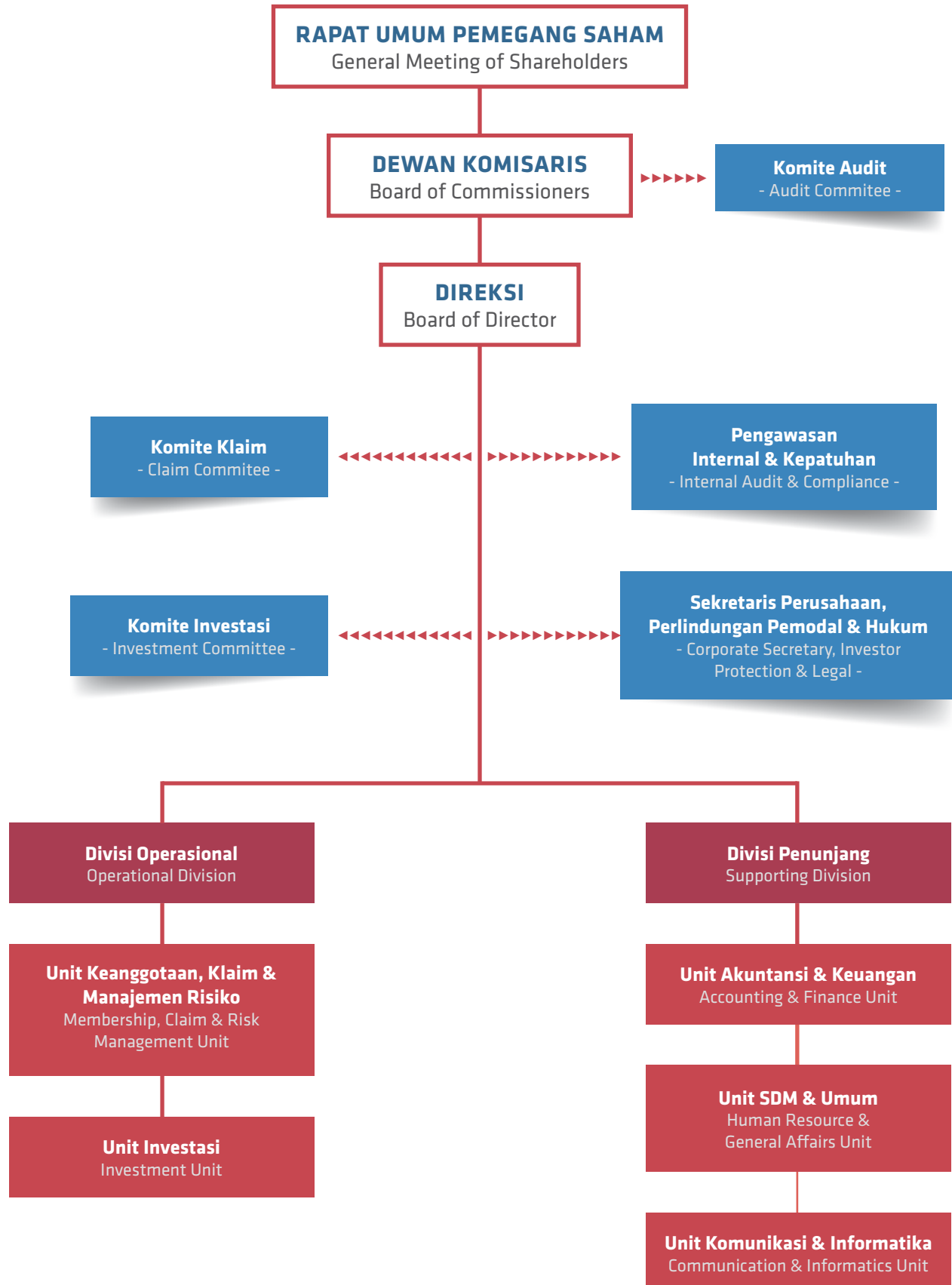
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:
 - a. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - b. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisis atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim;
 - d. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - e. Melakukan tindakan untuk pembelian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

In accordance with Company Establishment Deed No. 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary. Article 3 relates to the Purpose and Objectives and Business Activities mentioned:

1. The purpose and objective of the Company is to engage in the field of administration and management of funds used to protect investor assets in the Indonesian Capital Market.
2. To achieve the aims and objectives above the Company can carry out business activities, namely:
 - a. Administer and manage capital asset protection funds in the Indonesian Capital Market;
 - b. Invest in funds to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - c. Examining, verifying, analyzing claims filed by investors in the Indonesian Capital Market and paying claims;
 - d. Receive additional funds and / or collect fees in connection with activities to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - e. Take action to purchase funds that have been issued from the Investor Asset Protection Fund for payment of claims and participate in legal proceedings both inside and outside the Court.

Struktur Organisasi

Organizational Structure



Visi dan Misi

Vision and Mission

VISION

Vision

MENJADI
PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA
YANG TERPERCAYA.

*To be the trusted Investor Protection
Fund Institution in Indonesia.*

MISSION

Mission

MENINGKATKAN
KEAMANAN
BERINVESTASI DI
PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN
PEMODAL.

*To improve the safety in investing
at the Capital Market through the
establishment of Investor Protection
Fund.*

Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Value

- ... P3IEI memiliki nilai-nilai, budaya dan norma perilaku yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari oleh segenap pimpinan dan karyawan Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Nilai inti dari Perusahaan adalah sebagai berikut:

P3IEI has values, culture and norms of behavior that must be obeyed and applied in the daily work environment by all leaders and employees of the company in order to realize the company's vision, mission and goals. The core values of the company are as follows:

I - P R O T E C T

Integritas. Integrity

- ... Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

Professionalism. Profesionalisme

- ... Selalu menampilkan hasil kinerja yang terbaik sesuai dengan tuntutan profesi serta selalu mengembangkan diri untuk menjaga kualitas profesi.

Always show the best performance results in accordance with the demands of the profession and always develop themselves to maintain the quality of the profession.

Team Work. Kerjasama

- ... Selalu mengedepankan kepentingan bersama sebagai tim untuk mencapai tujuan perusahaan melalui sinergi dan mengoptimalkan potensi setiap anggota tim.

Always prioritizing shared interests as a team to achieve company goals through synergy and optimizing the potential of each team member.

Customer Focus. Fokus pada Pelanggan

- ... Selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi tingkat kepuasan yang diharapkan oleh mitra kerja maupun pelanggan.

Always strive to provide the best service to meet the level of satisfaction expected by partners and customers.

Profil Dewan Komisaris

Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

••• Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Sleman, 8 Mei 1969. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya memulai karir sebagai Kepala Urusan Personalia dan Umum PT Bursa Efek Surabaya (BES) (April 1992-1994), Kepala Seksi Personalia PT BES (1994-Juli 1996), Asisten Manajer Surveillance & Compliance PT BES (Juli 1996-1997), Asisten Manajer Divisi Hukum PT BES (1997-Juni 1999), Kepala Divisi Hukum PT BES (Juni 1999-Oktober 2007), dan Anggota Komisaris PT Indonesia Capital Market Electronic Library (Desember 2015-Juni 2019). Beliau meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005) serta gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991

Appointed as President Commissioner of P3IEI since June 2019. Born in Sleman, May 8, 1969. She currently serves as Head of the Legal Division of the Indonesia Stock Exchange (BEI). Previously started her career as Head of Personnel and General Affairs of PT Surabaya Stock Exchange (BES) (April 1992- 1994), Head of Personnel Section of PT BES (1994-July 1996), Assistant Manager of Surveillance & Compliance of PT BES (July 1996-1997), Assistant Manager of PT BES Legal Division (1997-June 1999), Head of PT BES Legal Division (June 1999-October 2007), and Member of the Commissioners of PT Indonesia Capital Market Electronic Library (December 2015-June 2019). She holds a Masters in Business Law from Universitas Airlangga, Surabaya (2005) and a Bachelor's degree from the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 1991.



Board of Commissioners Profile



Roni Gunardi

KOMISARIS
Commissioner

- Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Jakarta, 3 Desember 1967. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebelumnya memulai karir sebagai Payment Settlement Officer di PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (Maret 1994-September 1997), Kepala Unit Ekuiti di KPEI (Oktober 1997-Agustus 2009), dan Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko di KPEI (September 2009-Januari 2018).

Appointed as Commissioner of PT P3IEI since June 2019. Born in Jakarta, 3 December 1967. He currently serves as the Head of the Human Resources and General Affairs Division of the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). Previously started his career as Payment Settlement Officer at PT Indonesia Clearing Depository (KDEI) (March 1994-September 1997), Head of Equity Unit at KPEI (October 1997-August 2009), and Head of the Risk Guarantee and Management Division at KPEI (September 2009- January 2018).

Profil Direksi

Board of
Directors
Profile



Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA
President Director

... Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Sungai Gerong, 19 Februari 1969. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia dan berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, Peneliti Senior, Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang, Kepala Divisi Pengawasan sejak Tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang (merangkap Koordinator Strategic Business Unit Surat Utang), Manajer Divisi Pencatatan (spesialisasi Industri Pertambangan) dan asisten Manajer Divisi Pencatatan di BES sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc) Geofisika dari The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) dan Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).

Appointed as the P3IEI President Director based on the P3IEI Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2016. Born in Sungai Gerong, February 19, 1969. He has held the position of President Director of PT Penilai Harga Efek Indonesia and various positions on the IDX including the Head of Real Sector Recording Division, Senior Researcher, Head of Bond Market Division, Head of Surveillance Division since 2000. He has also served as Head of Bond Market (concurrently Coordinator of Bond Unit Business Strategic), Manager of Recording Division (specialization in Mining Industry) and Assistant Manager of Recording Division in BES since 1996. Graduated as Bachelor of Science (B.Sc) in Geophysics from The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) and Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).

Widodo

DIREKTUR
Director

••• Menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1963. Beliau Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Proyek Khusus, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Proyek, Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Peneliti Senior, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi sejak tahun 1997. Beliau juga pernah bekerja sebagai Business Development Staff, Application Development Staff, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan di PT Bank Niaga pada tahun 1995. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia (1987) serta pernah memperdalam Manajemen Keuangan pada tahun 1995.

Appointed as the P3IEI Director based on the P3IEI Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2016. Has held various positions at IDX, such as Head of Specific Project, Head of Strategic Planning and Project Management, Head of Internal Auditor, Senior Researcher, Head of Information and Technology Division since 1997. He has also worked as Business Development Staff, Application Development Staff, Head of Networking Management Section in PT Bank Niaga in 1995. Graduated as Sarjana Teknik from Universitas Indonesia (1987) and studied Financial Management in 1995.



Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

- Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, pengembangan SDM pada tahun 2019 juga masih difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi, pengembangan kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan.
- Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseoran telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun soft skill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

The implementation of P3IEI functions and tasks is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). Similar to the previous year, HR development in 2019 was also still focused on organizational development in a number of functions, competency development that refers to job competency standards and enhancing the company's work culture that supports the vision, mission, goals, strategic objectives and the company's code of ethics.

To create a conducive work environment, the company has implemented an HR Development System as part of its HR policies including improving employee competencies both for technical and soft skills, as well as related to employee performance appraisal.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Gender Equality and Employment Opportunities

- Pengelolaan sumber daya manusia di P3IEI dalam hal penerimaan, penilaian kinerja, sistem balas jasa, pengembangan karir dan pembagian tugas pekerjaan dilakukan secara profesional tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, gender dan kondisi fisik.

Human resource management at P3IEI in terms of acceptance, performance appraisal, remuneration systems, career development and job distribution is done professionally without distinguishing race, ethnicity, religion, class, gender and physical condition.

Kesetaraan Gender

Gender Equality

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Status Kepegawaian » Periode Desember (2016-2019)

Number of Employees Based on Gender & Employment Status » December (2016-2019)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status (Tetap, Kontrak) Employee Composition Based on Status (Permanent, Contract)	2016		2017		2018		2019	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap (Permanent)	5	2	8	3	8	3	6	3
Status Kontrak (Contract)	5	1	2	-	2	-	2	-
TOTAL	10	3	10	3	10	3	8	3

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia » Periode Desember (2016-2019)

Number of Permanent Employees by Age » December (2016-2019)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee Age Group	2016		2017		2018		2019	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
< 25 Thn (Years Old)	-	-	-	-	1	-	-	-
25-35 Thn (Years Old)	4	2	6	3	5	3	5	3
36-45 Thn (Years Old)	1	-	2	-	2	-	1	-

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan » Periode Desember (2016-2019)

Number of Permanent Employees Based on Education Level » December (2016-2019)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee Age Group	2016		2017		2018		2019	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
SMA (High School)	-	-	1	-	1	-	-	-
S1 (Bachelor)	4	2	5	2	4	2	3	2
S2 (Master)	1	-	2	1	3	1	3	1

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai**Employment Opportunities and Employee Levels**

- Pengadaan karyawan dilakukan berlandaskan transparansi, selektif, daya guna dan hasil guna dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Manpower Planning* (perencanaan kebutuhan SDM) sebagai proses untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu atau sebagai proses pengadaan karyawan yang disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan Perusahaan. Unit SDM & Umum melakukan proses pengadaan karyawan yang dilakukan dengan cara seleksi melalui serangkaian tahapan, yaitu administrasi, tes tertulis, wawancara dengan Kepala Divisi Penunjang & User, psikotes minimal lulus dapat disarankan, tes kesehatan dan tes lain yang dianggap perlu. Pengumuman pengadaan karyawan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam pengumuman pengadaan karyawan dicantumkan antara lain: jenis lowongan pekerjaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat tempat pengajuan surat lamaran, dan batas waktu pengajuan surat lamaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan untuk menduduki suatu jabatan. Dengan tetap memperhatikan struktur organisasi Perusahaan, maka untuk kepentingan/kebutuhan operasional Perusahaan, Perusahaan juga dapat melakukan mutasi karyawan. Mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan serta pemenuhan kualifikasi dan persyaratan posisi.

Employee procurement is done based on transparency, selectivity, efficiency and effectiveness based on the Annual Budget Work Plan (RKAT) and manpower planning as a process for planning the fulfillment of HR needs that will occupy certain positions or as a process for procurement of employees that is adjusted with the formation and needs of the Company. The HR & General Unit conducts the process of employee procurement which was carried out by using selection through a series of stages, namely administration, written tests, interviews with the Head of Support & User Division, a minimum of psychological testing passed can be recommended, medical tests and other tests deemed necessary. Announcement of employee procurement is done by taking into account the needs effectively and efficiently. In the announcement of the procurement of employees included, among others: the type of job vacancies, the requirements that must be fulfilled by each applicant, the address where the application letter is submitted, and the deadline for application letter submission.

Based on the provisions in the Company Regulations, the Company provides equal opportunities to every employee who meets the requirements and criteria that have been determined to occupy a position. By keeping in mind the Company's organizational structure, for the interests / operational needs of the Company, the Company can also transfer employees. mutation is carried out taking into account the Company's needs and meeting the qualifications and position requirements.

Keikutsertaan dalam Program Bpjs Kesehatan

\\ Participation in The Health Insurance (BPJS) Program

- Perusahaan wajib mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh Pemerintah sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan.

The company is obliged to include all its employees in the BPJS Program as stipulated in the Company Regulations. This is because BPJS is a form of social security regulated by the Government as covered by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. In addition, based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency also regulates the administration of administrative sanctions for employers who do not include all their employees in the BPJS Program.

Peserta BPJS Kesehatan PT P3IEI tahun 2019

\\ BPJS Participants at PT P3IEI 2019

- Dewan Komisaris beserta keluarga tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan P3IEI. Direksi dan karyawan beserta keluarganya masing-masing wajib diikutsertakan dalam besaran iuran BPJS Kesehatan P3IEI dengan besaran iuran yang ditanggung Direksi dan karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta besaran iuran tidak dibagi per Direksi dan karyawan atau anggota keluarga. Total jumlah Direksi yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 2 orang beserta 4 orang total anggota keluarga Direksi, dengan total iuran tahun 2019 sebesar Rp7,680,000. Adapun total jumlah Karyawan yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 11 orang beserta 12 orang total anggota keluarga Karyawan, dengan total iuran sebesar Rp44,201,744.

The Board of Commissioners and their families were not included in the P3IEI BPJS program. Directors and employees and their families must be included in the amount of P3IEI BPJS contributions with the amount of contributions borne by Directors and employees in accordance with the applicable law provisions and the contribution rates are not shared per Directors and employee or family member. The total number of Board of Directors members included in the BPJS program is 2 people with a total of 4 family members of the Board of Directors, with the 2019 total contributions of Rp7,680,000. Meanwhile, the total number of employees included in the BPJS program is 11 people alongside a total of 12 family members of the employees, with the 2019 total contributions of Rp44,201,744.

PESERTA. Participant

Jumlah Total

Total Iuran Tahun 2019 Total Contributions for 2019

Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	Tidak diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan PT P3IEI Not included in the PT P3IEI BPJS Program
Keluarga Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Family	4	Tidak diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan PT P3IEI Not included in the PT P3IEI BPJS Program
Direksi Board of Directors	2	Rp7,680,000
Keluarga Direksi The Board of Directors' Family	4	
Pegawai tetap dan Pegawai Kontrak Permanent employees and contract employees	11	Rp44,201,744
Keluarga Pegawai Employees' Family	12	

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

- SDM yang berkualitas dan profesional merupakan dua kunci utama guna mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perseroan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, dengan detail sebagai berikut:

Qualified and professional human resources are two of the main keys to supporting and building the Company into a reliable and credible entity. Therefore, the Company's development process cannot be separated from the process of coaching and developing human resources that are tailored to the needs of the Company.

In improving the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development, with the following details:

Pengembangan Kompetensi Karyawan PT P3IEI 2019

» PT P3IEI 2019 Employee Competency Development

PELATIHAN. Training

Workshop on evidence –based management systems oleh Hari Sudarmadji

Semua karyawan
All Employees

Workshop terkait coaching and counselling oleh Mirna Kurniawati

Semua karyawan
All Employees

Seminar Mitigasi Risiko Bisnis Korporasi
Corporate Business Risk Mitigation Seminar

18 persen dari total karyawan
18 percent of total employees

SERTIFIKASI. Certification

Ijin WMI diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
WMI permission is granted by the Financial Services Authority (OJK)

9 persen dari total karyawan
9 percent of total employees

- Fungsi-fungsi di Perseroan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perseroan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

i. Ketersediaan Rumusan Kamus Kompetensi Teknis Generik dan Rumusan Kamus Kompetensi Teknis di Masing-Masing Fungsi Jabatan Dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan identifikasi kompetensi teknis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDM di tahun 2018, maka Unit SDM & Umum perlu tindak lanjut dalam melakukan penyusunan kamus kompetensi teknis. Oleh karena itu, di tahun 2019 ini, disediakannya rumusan kamus kompetensi teknis yang dibagi atas 2 yaitu rumusan kamus kompetensi teknis generik dan rumusan kamus kompetensi teknis di masing-masing fungsi jabatan. Rumusan kamus kompetensi teknis ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan assessment atas kompetensi teknis yang ditetapkan untuk masing-masing posisi jabatan dalam struktur organisasi saat ini.

The functions in the Company are always adjusted to meet the Company's development in achieving its vision and mission and carrying out its operational activities.

i. Availability of Generic Technical Competency Dictionary and Technical Competency Dictionary in Each Job Function in Organizational Structure

Based on the identification of technical competencies that have been carried out in the implementation of HR management in 2018, the HR & General Unit needs to follow up in preparing the technical competency dictionary. Therefore, in 2019, a technical competency dictionary is divided into 2 namely generic technical competency dictionary and technical competency dictionary in each office function. The technical competency dictionary is needed to facilitate the assessment of the technical competencies established for each position in the current organizational structure.

••• ii. Program Rutin Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi

Perusahaan tetap melanjutkan serangkaian aktivitas rutin program internalisasi budaya setiap tahunnya. Di tahun 2019 ini, Perusahaan masih tetap menerapkan tema Teamwork sebagai tema nilai budaya. Dimana pelaksanaannya sama dengan yang telah diimplementasikan di tahun 2018, dengan program kegiatannya terdiri dari values teamwork dengan 3 indikator perilaku, yaitu Program (H) Angket untuk indikator perilaku Mengedepankan Kepentingan Bersama, Program Juara (Jumat Bersih Bagi Kita Semua) untuk indikator perilaku Proaktif dan Program Perjaka (Peninjauan Kinerja Secara Berkala) untuk indikator perilaku berfokus pada peran akan dilakukan.

iii. Pelaksanaan dan Ketersediaan Buku Monitoring Perilaku Karyawan

Monitoring perilaku ini dibuat sebagai program tindak lanjut dari internalisasi nilai-nilai budaya Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui monitoring perilaku ini diharapkan seluruh karyawan dapat mengimplementasikan dalam keseharian aktivitas yang di monitoring secara berkala baik oleh karyawan sendiri (*self assessment*) dan oleh Atasan Langsung karyawan. Pelaksanaan monitoring perilaku ini dilakukan mengacu pada panduan monitoring yang telah disediakan dilengkapi dengan bukti pendukung dalam setiap indikator perilaku yang diharapkan, dimana masing-masing nilai (*values*) yang ditetapkan terdapat indikator perilaku yang menjadi *mandatory* sebagai perilaku yang wajib dijalankan oleh seluruh karyawan.

iv. Ketersediaan Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam *Learning & Growth Perspectives* adalah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Karyawan. Salah satu inisiatif strategis yang diperlukan adalah menyusun program pelatihan dan pengembangan di tahun 2019 dengan melakukan *Training Needs Analysis* (TNA). Berdasarkan hasil TNA tersebut disusun program pelatihan dan pengembangan baik secara organisasi maupun per individu karyawan.

ii. Routine Internalization of Organizational Cultural Values

The company continues to carry out a series of routine cultural internalization program activities each year. In 2019, the company still applies the theme of Teamwork as a theme of cultural values. Where the implementation is the same as the implementation in 2018, the activity program consists of values teamwork with 3 behavioral indicators, namely the (H) Questionnaire Program for behavioral indicators Promoting Common Interests, Juara Program (Clean Friday for All of Us) for Proactive behavior indicators and The Perjaka Program (Periodic Performance Review) for behavioral indicators focusing on roles that will be carried out.

iii. Implementation and Availability of Employee Behavior Monitoring Books

This behavior monitoring was made as a follow-up program to internalize the Company's predetermined cultural values. Through this behavior monitoring, it is expected that all employees can implement the suitable behavior in daily activities that are monitored regularly both by the employees themselves (*self assessment*) and by the Employer's Direct Supervisor. Behavior monitoring is carried out referring to the monitoring guidelines that have been provided, supplemented with supporting evidence in each expected behavioral indicator, where each of the values specified there are behavioral indicators that become mandatory as behaviors that must be carried out by all employees.

iv. Availability of Employee Development and Training Programs

One of the strategic targets set by the Company in Learning & Growth Perspectives is Capacity Building and Employee Competency. One of the strategic initiatives needed is to develop a training and development program in 2019 by conducting Training Needs Analysis (TNA). Based on the results of the TNA, a training and development program was developed, both organizationally and per individual employee.

Remunerasi

Remuneration

••• P3IEI berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan. Struktur remunerasi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Struktur dan Skala Upah P3IEI, Surat Keputusan Direksi tentang Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan keadaan keuangan Perusahaan, Perusahaan melakukan penyesuaian Upah Karyawan setiap tahun, dengan tujuan untuk penyesuaian taraf hidup (*Cost of Living Adjustment* - COLA) karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran persentase COLA tersebut adalah sama untuk setiap Karyawan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI ditentukan berdasarkan struktur jabatan. Penetapan ini didasarkan atas jenis industri, size business serta faktor lainnya yang dianggap relevan. Penetapan gaji untuk karyawan harus dikonsultasikan kepada Divisi Penunjang, sehingga tidak diperkenankan setiap Divisi/Satuan Kerja menetapkan gaji dengan sendirinya. Adapun penetapan gaji (*offering*, promosi, dan lain-lain) harus berdasarkan pada struktur gaji yang ditetapkan. Agar struktur gaji dalam P3IEI

P3IEI is committed to paying attention to the welfare of all employees. The remuneration structure is determined based on the provisions stipulated in the Decree of the Board of Directors regarding the Structure and Wage Scale of P3IEI, the Decree of the Board of Directors on the Adjustment of Allowances Outside the Main Salary of P3IEI and refers to the provisions of Company Regulations. By considering and prioritizing the Company's financial situation, the Company makes adjustments to the Employee Wages every year, with the aim of adjusting the cost of living (COLA) of employees by referring to changes in the Consumer Price Index (CPI) officially determined by the Central Statistics Agency (BPS). The percentage of COLA is the same for every employee.

The salary structure applicable at P3IEI is determined based on the position structure. This determination is based on the type of industry, business size and other factors that are considered relevant. Determination of salaries for employees must be consulted to the Supporting Division, so that it is not permissible for each Division / Work Unit to set salaries by themselves. The stipulation of salaries (*offering*, promotion, etc.) must be based on the stipulated salary structure. So that the salary structure in P3IEI remains competitive with similar



- ▷▷ tetap kompetitif dengan industri sejenis, maka Divisi Penunjang secara berkala melakukan review terhadap struktur gaji.

Selain itu penetapan kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi dari internal dan eksternal Perusahaan seperti kondisi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, kondisi perekonomian Indonesia, kondisi Pasar Modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis.

industries, the Supporting Division regularly reviews the salary structure.

In addition, the stipulation of remuneration policy also considers internal and external conditions of the company such as the condition of the company, the Company's Long-Term Plan, the condition of the Indonesian economy, the condition of the Indonesian and world capital markets, and the business environment.

Komponen Remunerasi untuk Pegawai

» Remuneration Component for Employees

- Dalam sistem remunerasi P3IEI baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap menerima empat komponen dasar yakni upah, tunjangan tidak tetap, tunjangan di luar upah, serta manfaat. Komponen upah terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan komponen tunjangan tidak tetap terdiri atas uang lembur atau uang penugasan, tunjangan di luar upah berisi apresiasi kerja maupun tunjangan hari raya. Serta berbagai manfaat yang diterima karyawan P3IEI meliputi; BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa, maupun DPLK.

In the P3IEI remuneration system, both permanent and non-permanent employees receive four basic components, namely wages, temporary benefits, non-wage benefits, and benefits. The wage component contains of basic salary and fixed allowances, while the non-permanent benefit component consists of overtime pay or assignment money, allowances other than wages containing work appreciation or holiday allowances. As well as various benefits received by P3IEI employees, including; BPJS Health and Employment, Life Insurance, and Financial Institution Pension Fund (DPLK).

Hubungan Industrial

Industrial Relations

- Saat ini dengan kondisi karyawan P3IEI hanya berjumlah kurang dari 20 orang, P3IEI belum diwajibkan untuk mengatur tentang keberadaan serikat pekerja dalam Perusahaan. Namun jika merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana di dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa kehadiran serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian di dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan mengenai larangan bagi siapapun yang menghalangi terbentuknya serikat pekerja dan adanya denda bagi Perusahaan yang melakukan pemecatan serta ancaman bagi yang menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja yang tercantum dalam Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000. Dengan keberadaan serikat pekerja yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang, Berdasarkan hal tersebut, maka, Perusahaanpun mengakui adanya kebebasan pegawai untuk bergabung dalam serikat pekerja.

At present, with the condition that P3IEI's employees are only less than 20, P3IEI has not been required to regulate the existence of unions within the Company. However, if referring to Law Number 21 of 2000 which regulates Trade Unions / Labor Unions, where in Article 5 of Law No. 21 of 2000 states that the presence of trade unions is protected by law, then in Article 28 of Law no. 21 of 2000 stipulates the prohibition for anyone who prevents the formation of trade unions and the existence of fines for companies that make dismissals and threats for those who are members or become union officials listed in Article 43 of Law no. 21 of 2000. With the existence of trade unions that are protected and regulated in the Act, Based on this, the Company also recognizes the freedom of employees to join trade unions.

Sinergi PT P3IEI dan Serikat Pekerja

Synergy of PT P3IEI and Units of Workers

- P3IEI tidak membentuk dan memiliki hubungan dengan serikat pekerja. P3IEI mengelola hubungan yang serasi dengan karyawan sebagai upaya dalam pencapaian suasana kerja yang harmonis, perlindungan dan keamanan kerja, ketenangan dan kepuasan kerja yang mendukung produktivitas kerja melalui ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 2280 Tahun 2019, per 31 Juli 2019 yang disetujui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta sebagai kaidah-kaidah umum Perusahaan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan.

P3IEI does not form trade unions nor has relations with trade unions. P3IEI manages harmonious relations with employees as an effort to achieve a harmonious work atmosphere, work protection and security, peace of mind and job satisfaction that can supports work productivity through the provisions regulated in the Company Regulations No. 2280 of 2019, as per 31st July 2019 approved by Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta which explain the rights and obligations of the Company and employees.

Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai

Relationship and Satisfaction of Employees

- Berdasarkan survei internal yang dilakukan terhadap pegawai P3IEI berikut merupakan rangkuman dari hasil survei tersebut;

Kepuasan Karyawan:

1. Karyawan merasa cukup puas dengan gaji yang diterima saat ini dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Karyawan merasa puas dengan bonus dan insentif yang diberikan Perusahaan
3. Karyawan merasa puas dengan sistem perlindungan Perusahaan terhadap karyawannya dengan menggunakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
4. Karyawan merasa puas karena Perusahaan memberikan kepastian kerja (jam kerja, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan)
5. Karyawan merasa puas dengan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan Perusahaan
6. Karyawan merasa puas dengan kenyamanan dan kebersihan tempat kerja
7. Karyawan merasa puas bekerja dalam kondisi kerja yang baik dan diberi fasilitas yang mencukupi

Based on an internal survey conducted on P3IEI employees, the following is a summary of the results of the survey;

Employee Satisfaction:

1. Employees feel quite satisfied with the salary currently received and can meet their daily needs
2. Employees feel satisfied with bonuses and incentives given by the Company
3. Employees are satisfied with the Company's protection system for their employees by using K3 (Occupational Safety and Health)
4. Employees are satisfied because the company provides certainty of work (working hours, job descriptions and job specifications)
5. Employees are satisfied with the employee's performance appraisal conducted by the Company
6. Employees are satisfied with the comfort and cleanliness of the workplace
7. Employees are satisfied to work in good working conditions and are given adequate facilities

••• Motivasi Karyawan:

1. Karyawan merasa termotivasi dengan adanya pemberian tunjangan dan bonus
2. Karyawan termotivasi karena atasan mereka memperhatikan ide (gagasan) stafnya
3. Bersedia menerima sanksi apabila secara nyata melakukan kesalahan dan bersedia memperbaiki
4. Bersedia mengikuti pelatihan yang diberikan Perusahaan untuk peningkatan keterampilan karyawan
5. Bersedia mengikuti pelatihan diluar jam kantor untuk meningkatkan kemampuan dan menyelesaikan pekerjaan

Kepemimpinan:

1. Atasan memperlakukan setiap bawahan dengan hormat
2. Atasan mendorong setiap bawahan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
3. Atasan meminta pandangan dan pendapat bawahan dalam menyelesaikan permasalahan di tempat kerja
4. Atasan menekankan pentingnya norma dan etika dalam bekerja

Budaya Organisasi:

1. Terjalin kerja sama yang erat antar karyawan maupun antar karyawan dan atasan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari
2. Saling memperhatikan dan memberikan dorongan antar karyawan maupun antar karyawan maupun antar atasan dan karyawan demi kemajuan bersama menjadi sesuatu yang lazim di Perusahaan ini
3. Kritik antar sesama karyawan maupun antara atasan dan karyawan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka
4. Karyawan mematuhi setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan

Employee Motivation:

1. Employees feel motivated by the provision of benefits and bonuses
2. Employees are motivated because their superiors pay attention to the ideas of their staff
3. Willing to accept sanctions if it is they are proven to be wrong and willing to correct the action
4. Willing to attend training provided by the Company to improve employee skills
5. Willing to attend training outside office hours to improve skills and complete work

Employee Motivation:

1. Bosses treat each subordinate with respect
2. Superiors encourage each subordinate to develop their potential
3. Bosses ask subordinates for their views and opinions in solving problems at work
4. Bosses emphasize the importance of norms and ethics in work

Organizational culture:

1. There is close cooperation between employees and between employees and superiors in carrying out daily work
2. Mutual attention and encouragement between employees and between employees as well as between superiors and employees for mutual advancement is common in this company
3. Criticism between fellow employees and between superiors and employees can be done freely and openly
4. Employees comply with all policies and regulations that apply in the Company



Produktivitas Pegawai

\ Employee Productivity

- Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam Perusahaan. Peningkatan produktivitas pegawai dapat dicapai apabila terdapat pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Produktivitas pegawai diukur melalui berapa besar tingkat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai.

Human resource is one of the most important factors in the company. Increased employee productivity can be achieved if there is good human resource management. Employee productivity is measured by how much the level of income received by the company compared to the number of employees.

DESKRIPSI. Description	2019	2018	2017	2016
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. Employee Productivity Level				
Pendapatan (Rp) ● Revenue (Rp)	15,435,215,163	13,441,436,629	12,257,365,799	11,076,625,557
Jumlah Karyawan (orang) ● Number of Employees (people)	11	13	13	13
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) ● Productivity per employee (Rp / person)	1,403,201,378	1,033,956,664	942,874,292	852,048,120

- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai P3IEI semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa P3IEI telah semakin baik pengelolaan sumber daya manusianya.

Based on the table above it can be seen that the productivity of P3IEI employees is increasing every year. This could indicate that P3IEI has improved human resource management.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

\ Employment Complaints Mechanism

- Sebagai perwujudan dari hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, maka karyawan mempunyai hak dalam menyampaikan keluhan, pengaduan maupun saran-saran yang menyangkut dengan pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, maka pada dasarnya penyampaian keluhan maupun penanganannya dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 - Karyawan dapat mengungkapkan keluhan-keluhannya serta membahasnya dengan atasan maupun dengan Divisi Penunjang;
 - Apabila penanganan masih dirasakan belum memuaskan bagi Karyawan tersebut, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan persoalannya kepada Direksi untuk memperoleh keputusan atau jawaban terakhir atas permasalahannya; dan
 - Apabila keluhan Karyawan masih belum terselesaikan, maka Karyawan tersebut dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk menengahi masalah tersebut.

As an embodiment of a harmonious relationship between the Company and Employees, employees have the right to submit complaints, complaints and suggestions relating to work. As stipulated in the provisions of the applicable Company Regulations, basically the submission of complaints and their handling is carried out in stages, namely:

- Employees can express their complaints and discuss them with superiors or with the Support Division;
- If the handling is still felt unsatisfactory to the employee, the person concerned can continue the matter to the Board of Directors to obtain a final decision or answer to the problem; and
- If the employee's complaint is still not resolved, the employee can submit a request for settlement assistance to the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office to mediate the matter.

Informasi Pemegang Saham

Shareholder Information

PEMEGANG SAHAM. Shareholder

% Kepemilikan. Ownership %

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
● Indonesian Clearing and Guarantee Corporation

33.33%

Bursa Efek Indonesia (BEI)
● Indonesia Stock Exchange

33.33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
● Indonesia Central Securities Depository

33.33%

JUMLAH
● Total

100.00%

Wilayah Operasi Saat Ini

The Current Area of Operation

- Perusahaan mencakup seluruh wilayah Indonesia walaupun hanya memiliki kantor di Jakarta
- The company covers all regions of Indonesia even though it only has an office in Jakarta

Produk dan Jangkauan Pasar

Product and Market Reach

- P3IEI menyediakan jasa penyelesaian dan pembayaran klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian dana atau Perantara Pedagang Efek melalui pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

P3IEI provides settlement services and payment of compensation claims for lost capital assets administered by Custodian Banks or Securities Broker Dealers through the management of Investor Protection Funds used to protect investor assets in the Indonesian Capital Market.

Jejak Langkah

Milestones

2007

→ Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

The Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of a Capital Protection Fund in the Indonesian Capital Market Industry.

2010

→ Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance plans to establish a program to establish a Capital Protection Fund in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, in Strategy 5 program 2 regarding the establishment of a Capital Protection Fund.

2012

→ Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian New Company sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

→ Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

→ Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

P3IEI Establishment Deed number 16 from Notary Ashoya Ratam as a company that runs the Investor Protection Fund program.

→ SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Decree of the Minister of Law and Human Rights number: AHU-64709.AH.01.01. 2012 concerning the Company's Legal Entity.

2013

→ Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

The granting of a business license for the Provider of Capital Protection Fund (IPF Institution) to P3IEI has the authority as a IPF Institution based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 43 / D.04 / 2013.

→ Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Inauguration of P3IEI by Mrs. Nurhaida as the Chief Executive of the OJK Capital Market Supervisor.

→ Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK Regulation number VI.A.4 regarding Financing Protection Funds and VI.A.5 concerning Providers of Investor Protection Funds.

2014

- P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

P3IEI began to operate fully as an IPF Institution.

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) P3IEI in the framework of approval of the increase in paid up capital and approval of the 2015 RKAT

2015

- Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Agreement on the Provision of Investor Compensation Reserves (CGRP) between PT Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and PT Indonesian Securities Investor Protection Program Provider (P3IEI). The realization of the use of CGRP is only carried out by P3IEI if the IPF is insufficient to pay the Investor compensation amounting to Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

Decree of OJK Board of Commissioners No. 46 / D.04 / 2015 concerning the Determination of the Highest Limit for Each Investor and Each Custodian in the context of Payment of Compensation to the Investor by Using the Capital Protection Fund. The highest limit of investor compensation is set at Rp100 million per Investor or an increase of 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

2016

- Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

The joining of the Custodian Bank as a IPF Member and the scope of protection in the form of Securities and Funds.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds.

- Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perseroan.

Restructuring of Investor Compensation Reserves for the Company's business continuity.

- Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Increase management fees for investment in IPF from 10% (ten percent) to 30% (percent) of the net income from investment.

2018

- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP (Dana Perlindungan Pemodal)

Completion of proposals related to IPF (Investor Protection Fund) Strategy

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)

Completion of proposals related to the Strategy for Expansion of CGRP Investment Instruments

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP

Completion of proposals related to the IPF Maximum Limitation Compensation Strategy

- Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I – PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

Determination of the Company's new cultural values, namely "I - PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

- Kunjungan dan sosialisasi ke 49 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang bekerjasama dengan APEI dan KP BEI.

Visitation and socialization to 49 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, West Sumatra and Riau Islands in collaboration with APEI and KP BEI.

- Distribusi materi sosialisasi dan literasi perlindungan Pemodal melalui DPP ke 30 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan 150 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.

Distribution of information dissemination and investor protection through IPF to 30 Indonesian Stock Exchange Representative Offices and 150 Investment Galleries throughout Indonesia.

- Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan (self assessment GCG) pertama kali

First corporate governance assessment (GCG self assessment)

2017

- Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal

Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection

- Restrukturisasi organisasi perusahaan P3IEI/ Indonesia SIPF

P3IEI / Indonesia SIPF company organization restructuring

- Pengesahan Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance

Ratification of the Improvement of Good Corporate Governance Guidelines

- Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (Helpdesk)

Procedures for Consultation and Investor Complaints (Helpdesk)

2019

→ Penambahan Anggota Baru DPP, menjadi 128 anggota yang terdiri atas 106 PPE dan 22 Bank Kustodian. Pada tahun 2019 terdapat penambahan empat anggota DPP yang terdiri atas satu PPE dan tiga Bank Kustodian yakni;

- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
- PT Bank Syariah Mandiri (BK)
- PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

Addition of New IPF Members, to 128 members consisting of 106 Securities Broker Dealers and 22 Custodian Banks. In 2019 there were an additional four IPF members consisting of one Securities Broker Dealer and three Custodian Banks namely;

- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
- PT Bank Syariah Mandiri (BK)
- PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

→ Nilai DPP pada tahun 2019 mencapai Rp189,08 miliar.

IPF value in 2019 reached Rp189.08 billion.

→ Kunjungan dan sosialisasi ke 38 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, dan Makassar. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama APEI, KSEI, SPM BEI, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Visitation and socialization to 38 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) in Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, and Makassar. Then there is also the joint socialization of APEI, KSEI, SPM BEI, and PT Indo Premier Sekuritas.

→ Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS), dan Sistem Monitoring

Implementation of operational support systems namely Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Letter Archive Management Information System (SIPAS), and Monitoring System

→ Evaluasi penerapan tata kelola Perusahaan (self assessment GCG)

Evaluate the implementation of corporate governance (GCG self-assessment)

→ Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Jepang dan Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

Building institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan and the Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

→ Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP

Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members



Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Agencies and Professions

AUDITOR. External Auditor

KAP Heliantono & Rekan.

Alamat
● Address

Aminta Plaza Building 7th Floor Suite 704
Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310

Jasa yang Diberikan
● Service Description

Audit Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
Audit of Financial Statements for Financial Years end-
ed December 31, 2019 and 2018

Biaya
● Fee

Rp93,500,000

Periode Penugasan
● Work Period

2019-sekarang
2019-present

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

External Awards and Acknowledgments

- Sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak menerima penghargaan dan pengakuan eksternal apapun atas kinerja Perusahaan.

Throughout 2019, the Company did not receive any external awards and recognition for the Company's performance.

Informasi Situs Perusahaan

Company Site Information

- PT P3IEI selalu berusaha untuk memberikan informasi terkait perusahaan yang akurat, transparan dan handal kepada seluruh para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perusahaan juga berusaha untuk menyampaikan informasi yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui situs perusahaan.

PT P3IEI always strives to provide accurate, transparent and reliable company-related information to all shareholders and other stakeholders. In addition, the company also strives to convey information that is easily accessed anytime and anywhere through the company's website.



- Selain melalui website, informasi juga disampaikan melalui facebook, youtube, twitter, dan instagram resmi perusahaan yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary.

Besides through the website, information is also conveyed through Facebook, YouTube, Twitter, and the company's official Instagram managed by the Corporate Secretary Division.

Peta Situs www.indonesiasipf.co.id» Site Map www.indonesiasipf.co.id**••• Beranda**

- Layanan yang diberikan
- Statistik Dana Perlindungan Pemodal
- Highlight Pasar
- Kegiatan Indonesia SIPF
- Deskripsi singkat SIPF
- Alamat dan logo perusahaan

Tentang Kami

- Latar Belakang
- Visi & Misi Perusahaan
- Management
- DPP
- Tata Kelola Perusahaan

Perlindungan Pemodal Anggota DPP

- PPE
- Bank Kustodian

Publikasi

- Kegiatan
- Pengumuman
- Berita
- Laporan Tahunan
- Regulasi
- Bulletin
- Marketing Kit
- Statistik

Home

- Our Service
- Statistics of Investor Protection Funds
- Market Highlights
- Indonesian SIPF Events
- A Brief Description of SIPF
- Company Address and Logo

About Us

- History
- Vision & Mission
- Organization
- Investor Protection Fund
- Good Corporate Governance

Investor Protection IPF member

- Broker Dealer (PPE)
- Custody Bank

Publication

- Events
- Announcement
- News
- Annual report
- Regulation
- Bulletins
- Statistics
- FAQ

Pendistribusian materi edukasi telah pula dilakukan ke seluruh Galeri Investasi (GI) yang tersebar pada 29 Kantor Perwakilan BEI di Indonesia, dengan menggunakan platform publikasi berupa media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube), Website, dan Videotron BEI

Distribution of educational material has also been distributed to Investment Gallery dispersed among 29 Indonesia Stock Exchange Representative Offices in Indonesia, using publication platforms such as social media (Instagram, Twitter, Facebook, and Youtube), Website, and Indonesia Stock Exchange's Videotrons

- P3IEI memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI seperti kegiatan sosialisasi maupun *fun fact* yang berkaitan dengan investasi sehingga dapat menarik minat dari para investor maupun calon investor untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia dengan aman serta dapat mendorong keterikatan pengikut media sosial untuk dapat mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai investasi dan Pasar Modal Indonesia. Selain itu P3IEI menggunakan platform media sosial untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai konsep perlindungan pemodal.

Pada akhir tahun 2019 merupakan pertama kalinya P3IEI melakukan pengukuran untuk keterikatan di media sosial. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh media sosial P3IEI serta keefektifan media sosial P3IEI dalam memberikan informasi kepada publik, per bulan Desember 2019 angka keterikatan media sosial SIPF 9.845 kali, dengan jumlah pengikut pada akun Instagram sebanyak 3.342 akun, dengan jumlah impresi pada periode tersebut sebesar 404.983 poin. Angka impresi tersebut meningkat sebesar 42,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Indonesia SIPF utilizes social media as a platform to publish corporate activities such as socialization programs or investment-related fun fact in order to attract the interest of investors and future investors to safely invest in Indonesian Capital Market Industry and to encourage the engagement of social media followers so that they are able to get the most recent information regarding investment and Indonesian Capital Market Industry. In addition, Indonesia SIPF also uses social media as a platform to educate the Indonesian society regarding the concept of investor protection.

At the end of 2019 marks the very first time Indonesia SIPF conducted a measurement on social media engagement. This measurement is done in order to ascertain the impact that has been given by the social media accounts belonged to Indonesia SIPF as well as its effectiveness in informing the public. Per December 2019, the social media engagement metric has reached 9.845 points, with the number of Instagram followers amounting to 3.342 accounts, and the number of impression per that period reaching the tally of 404.983 points. This impression metric has increased in 42,4 percent compared to the previous period.

**e-money
GIVEAWAY**

Seandainya kamu punya uang 5 juta rupiah, saham apa saja yang akan kamu beli dan apa alasannya?

1. Follow
Follow Instagram @IndonesiaSIPP
2. Answer
Jawab pertanyaan di atas, dan mention @IndonesiaSIPP untuk ikut di Instagram @IndonesiaSIPP
3. Fill the form
Isi form survey yang dapat diakses melalui link di Instagram @IndonesiaSIPP

Yuk belajar
**ANALISA
SAHAM**

**APA ADA ASET
YANG TIDAK DILINDUNGI DPP?**

**PENYELENGGARA
DPP DI NEGARA LAIN**

sudah HEMAT tapi belum KAYA?

**ADA SILENT KILLER
YANG KAMU
BELUM TAHU!**

**BAGAIMANA
INDONESIA SIPP
TERBENTUK?**

9 Oktober 2019

Kunjungan ke PT Dwidana Sakti Sekuritas dalam rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

**INDONESIA
SIPP**

8 Oktober 2019

Kunjungan ke PT Indo Premier Sekuritas dalam rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

**INDONESIA
SIPP**

7 Oktober 2019

Kunjungan ke PT Indosurya Barsinar Sekuritas dalam rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

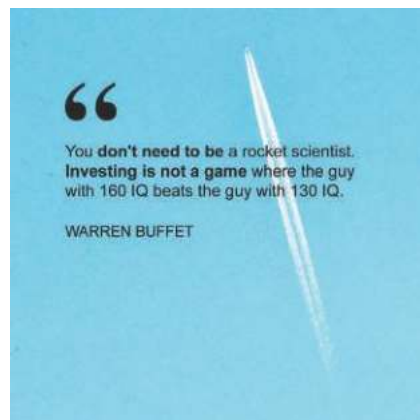
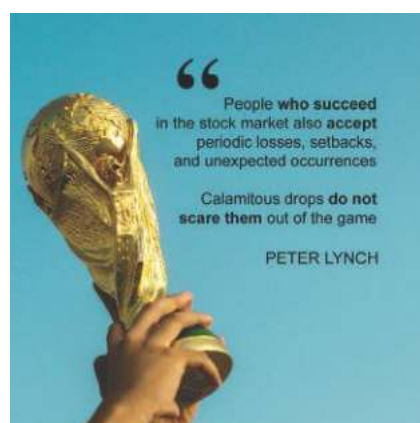
**INDONESIA
SIPP**

**BAGAIMANA ALUR
PERLINDUNGAN PEMODAL?**

**JENIS-JENIS
INVESTASI**

TIME IS MONEY

3 zona waktu ini untuk bisa sukses di pasar saham



Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency of Report Submission

... P3IEI senantiasa selalu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan keterbukaan informasi, P3IEI mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Bentuk penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham yang dikirimkan melalui surat.

P3IEI always applies the principles of transparency and accountability. Related to information disclosure, P3IEI refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness also Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds. The form of submission of company information disclosure is carried out routinely and periodically to the Financial Services Authority (OJK) and shareholders sent by mail.

Penyampaian Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Submission of Information Disclosure to the Public

Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan DPP » IPF Monthly Financial Position and Activity Report	Tanggal Penyampaian » Submission Date	Penyampaian Coverage Analysis Terkait DPP » Submission of Coverage Analysis Related to IPF	Tanggal Penyampaian » Submission Date
Januari » January	13 Februari 2019 » February 13, 2019	Januari » January	13 Februari 2019 » February 13, 2019
Februari » February	14 Maret 2019 » March 14, 2019	Februari » February	14 Maret 2019 » March 14, 2019
Maret » March	12 April 2019 » April 12, 2019	Maret » March	12 April 2019 » April 12, 2019
April » April	14 Mei 2019 » May 14, 2019	April » April	14 Mei 2019 » May 14, 2019
Mei » May	17 Juni 2019 » June 17, 2019	Mei » May	17 Juni 2019 » June 17, 2019
Juni » June	12 Juli 2019 » July 12, 2019	Juni » June	12 Juli 2019 » July 12, 2019
Juli » July	13 Agustus 2019 » August 13, 2019	Juli » July	13 Agustus 2019 » August 13, 2019
Agustus » August	12 September 2019 » September 12, 2019	Agustus » August	12 September 2019 » September 12, 2019
September » September	14 Oktober 2019 » October 14, 2019	September » September	14 Oktober 2019 » October 14, 2019
Oktober » October	12 November 2019 » November 12, 2019	Oktober » October	12 November 2019 » November 12, 2019
November » November	12 Desember 2019 » December 12, 2019	November » November	12 Desember 2019 » December 12, 2019
Desember » December	14 Januari 2020 » January 14, 2020	Desember » December	14 Januari 2020 » January 14, 2020

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan

» Submission of Subsidiary Monthly Report

Tanggal Penyampaian

» Submission Date

Januari » January	20 Februari 2019 » February 20, 2019
Februari » February	15 Maret 2019 » March 15, 2019
Maret » March	12 April 2019 » April 12, 2019
April » April	10 Mei 2019 » May 10, 2019
Mei » May	17 Juni 2019 » June 17, 2019
Juni » June	9 Juli 2019 » July 9, 2019

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan

» Submission of Subsidiary Monthly Report

Tanggal Penyampaian

» Submission Date

Juli » July	9 Agustus 2019 » August 9, 2019
Agustus » August	10 September 2019 » September 10, 2019
September » September	8 Oktober 2019 » October 8, 2019
Oktober » October	8 November 2019 » November 8, 2019
November » November	10 Desember 2019 » December 10, 2019
Desember » December	10 Januari 2020 » January 10, 2020

Laporan Realisasi RKAT Triwulanan PT P3IEI

» PT P3IEI Quarterly RKAT Realization Report

Tanggal Penyampaian

» Submission Date

Q1	12 April 2019 » April 12, 2019
Q2	12 Juli 2019 » July 12, 2019
Q3	11 Oktober 2019 » October 11, 2019
Q4	13 Januari 2020 » January 13, 2020
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited » Submission of the Audited Annual Financial Statements	17 Maret 2020 » March 17, 2020
Laporan Kegiatan Tahunan PT P3IEI » PT P3IEI Annual Activity Report	
Penyampaian Laporan Tahunan PT P3IEI 2018 » Submission of PT P3IEI 2018 Annual Report	
Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT P3IEI » Submission of Deed of Decree of PT P3IEI Annual GMS	
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT P3IEI » Submission of Deed of Decree of PT P3IEI Annual General Meeting	
Laporan Hasil RUPS Tahunan PT P3IEI » PT P3IEI Annual GMS Results Report	
Penyampaian Laporan Hasil RUPSLB PT P3IEI » Submission of PT P3IEI Extraordinary GMS Results Report	
Penyampaian Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT P3IEI » Submission of a Copy of Deed of Minutes of PT P3IEI Extraordinary GMS	
Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Atas Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik PT P3IEI » Report of the Evaluation Results of the Board of Commissioners of the Public Accountant and or PT P3IEI Public Accountant Office	
Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik PT P3IEI » Report of the Recommendations of the Board of Commissioners in Appointing a Public Accountant and or PT P3IEI Public Accountant Office	

Peristiwa Penting 2019

Important Events 2019

08

Januari 2019

» January 8, 2019



- Kunjungan ke Kiwoom Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Kiwoom Sekuritas Indonesia for the occasion of Investor Protection Fund Socialization program

14

Januari 2019

» January 14, 2019



- Kunjungan ke Surya Fajar Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Surya Fajar Sekuritas Indonesia for the occasion of Investor Protection Fund Socialization program

29

Januari 2019

» January 29, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber pada Pertemuan Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Participation as a Guest Speaker in Indonesian Securities Company Association's Members Meeting

15

Februari 2019

» February 15, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam kegiatan Investor Gathering yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BEI Jawa Barat

Participation as a Guest Speaker in Indonesia Stock Exchange West Java Representative Office's Investor Gathering

02

Maret 2019

» March 2, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar dan Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Barat dan Komunitas Studi Pasar Modal Universitas Tanjungpura Pontianak

Participation as a Guest Speaker in Seminar and Guest Lecture conducted by Indonesia Stock Exchange West Borneo Representative Office and Capital Market Studies Community Universitas Tanjungpura Pontianak

30

Maret 2019

» March 30, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam Seminar Nasional Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 2 dan Komunitas Studi Pasar Modal Universitas Sebelas Maret Surakarta

Participation as a Guest Speaker in National Seminar of Capital Market conducted by Indonesia Stock Exchange Representative Office Central Java 2 and Capital Market Studies Community Universitas Sebelas Maret Surakarta

08

April 2019

» April 8, 2019



- Berpartisipasi dalam launching Galeri Investasi dan Seminar Pasar Modal di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Participation in the events of Investment Gallery Launching and Capital Market Seminar in UIN Ar-Raniry Banda Aceh



April 2019
» April, 2019

- Berpartisipasi dalam Seminar Asia-Pacific Central Securities Depository Group (ACG) yang diselenggarakan KSEI
Participation in Asia-Pacific Central Securities Depository Group (ACG) conducted by Indonesia Central Securities Depository



26
April 2019
» April 26, 2019

- Narasumber dalam Acara Literasi Keuangan Bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Participation as Guest Speaker in Financial Literacy Event featuring Indonesia Securities Companies Association



26
April 2019
» April 26, 2019

- Berpartisipasi dalam kegiatan Forum Investor Sumatera Selatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BEI Sumatera Selatan
Participation in South Sumatra Investors Forum conducted by Indonesia Stock Exchange South Sumatra Representative Office



29
April 2019
» April 29, 2019

- Berpartisipasi kegiatan Capital Market Summit & Expo 2019 di Surabaya yang diselenggarakan OJK bersama SRO
Participation in Capital Market Summit & Expo 2019 in Surabaya conducted by Financial Services Authority and SRO



Indonesia Stock Exchange
member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

April 2019
» April, 2019

- Narasumber dalam acara Sharing Session Compliance Officer yang diselenggarakan BEI
Participation as Guest Speaker in Sharing Session Compliance Officer conducted by BEI



14
Mei 2019
» May 14, 2019

- Kunjungan ke Bank Syariah Mandiri dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to Bank Syariah Mandiri for the event of Investor Protection Fund Socialization Program



15
Mei 2019
» May 15, 2019

- Kunjungan ke Bank KEB Hana Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to Bank KEB Hana Indonesia for the event of Investor Protection Fund Socialization Program



Mei 2019
» May, 2019

- Menghadiri undangan pertemuan dengan OJK terkait pembahasan wacana penyelenggaraan Disgorgement Fund
Attendance in meeting with Financial Services Authority in regards to Disgorgement Fund implementation plan

23

Juni 2019

» June 23, 2019



- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 dengan salah satu agenda pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi masa jabatan 2019-2022

Appointment of Board of Commissioners and Directors for the 2019-2022 period in Annual General Meeting of Shareholders Meeting 2019

25

Juni 2019

» June 25, 2019



- Narasumber dalam seminar Yuk Nabung Saham yang diselenggarakan Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Guest Speaker in Yuk Nabung Saham (Stocks Investment Accumulation) seminar conducted by the students of Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

23

Juli 2019

» July 23, 2019



- Kunjungan ke UOB Kay Hian Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to UOB Kay Hian Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

24

Juli 2019

» July 24, 2019



- Kunjungan ke Yulie Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Yulie Securities Indonesia for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

25

Juli 2019

» July 25, 2019



- Kunjungan ke Mahakarya Artha Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Mahakarya Artha Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

25

Juli 2019

» July 25, 2019



- Kunjungan ke Evergreen Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Evergreen Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

31

Juli 2019

» July 31, 2019



- Kunjungan ke Pool Advista Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Pool Advista Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

02

Agustus 2019

» August 2, 2019



- Kunjungan ke Pratama Capital Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Pratama Capital Securities Indonesia for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

16

Agustus 2019

» August 16, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam acara Investor Gathering yang diselenggarakan oleh BEI Kantor Perwakilan Yogyakarta bekerja sama dengan FAC Sekuritas

Participation as Guest Speaker in Investor Gathering event conducted by Indonesia Stock Exchange Yogyakarta Representative Office in partnership with FAC Securities

12

September 2019

» September 12, 2019



- Kunjungan ke Trust Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Trust Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

23-24

Agustus 2019

» August 23-24, 2019



- Berpartisipasi sebagai exhibitor dalam Event Capital Market Summit & Expo 2019 Jakarta

Participation as exhibitor in Event Capital Market Summit & Expo 2019 Jakarta

12

September 2019

» September 12, 2019



- Kunjungan ke Semesta Indovest Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Semesta Indovest Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

28

Agustus 2019

» August 28, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam acara KSEI yaitu Seminar Pasar Modal di Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat dengan tema "Mekanisme Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia"

Participation as a Guest Speaker in Indonesia Central Securities Depository's Capital Market Seminar Event with the theme of "Investor Protection Mechanism in Indonesian Capital Market" in Politeknik Negeri Padang, West Sumatra

13

September 2019

» September 13, 2019



- Kunjungan ke Wanteg Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Wanteg Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

30

Agustus 2019

» August 30, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam acara Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh APEI dengan tema "Cerdas Memanfaatkan Produk dan Layanan Pasar Modal di Era Keuangan Digital" di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Participation as Guest Speaker in Financial Literacy event conducted by Indonesia Securities Company Association with the theme of "Intelligent Use of Capital Market Products and Services in Digital Finance Era" in Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

16

September 2019

» September 16, 2019



- Kunjungan ke Onix Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to Onix Securities for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

19

September 2019

» September 19, 2019



- Kunjungan ke PT KGI Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT KGI Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

24

September 2019

» September 24, 2019



- Kunjungan ke PT Macquarie Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Macquarie Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

19

September 2019

» September 19, 2019



- Kunjungan ke PT Profindo Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Profindo Sekuritas Indonesia for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

27

September 2019

» September 27, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Layanan AKSes KSEI dan Perlindungan Pemodal di Bali
Participation as Guest Speaker in KSEI AKSes Services Socialization and Investor Protection Event in Bali

20

September 2019

» September 20, 2019



- Kunjungan ke PT Lotus Andalan Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Lotus Andalan Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

01

Oktober 2019

» October 1, 2019



- Kunjungan ke PT OSO Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT OSO Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

24

September 2019

» September 24, 2019



- Kunjungan ke PT Primasia Unggul Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Primasia Unggul Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

03

Oktober 2019

» October 3, 2019



- Kunjungan ke PT Mahastra Andalan Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Mahastra Andalan Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

04

Oktober 2019

» October 4, 2019



- Kunjungan ke PT Pacific Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Pacific Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

08

Oktober 2019

» October 8, 2019



- Kunjungan ke PT Indo Premier Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Indo Premier Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

04

Oktober 2019

» October 4, 2019



- Kunjungan ke PT Paramitra Alfa Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Paramitra Alfa Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

09

Oktober 2019

» October 9, 2019



- Kunjungan ke PT Dwidana Sakti Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Dwidana Sakti Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

07

Oktober 2019

» October 7, 2019



- Kunjungan ke PT Indosurya Bersinar Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Indosurya Bersinar Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

10

Oktober 2019

» October 10, 2019



- Kunjungan ke PT Citigroup Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Citigroup Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

08

Oktober 2019

» October 8, 2019



- Kunjungan ke PT Makindo Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Makindo Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

11

Oktober 2019

» October 11, 2019



- Kunjungan ke PT Investindo Nusantara Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Investindo Nusantara Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

14

Oktober 2019

» October 14, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam acara Seminar Pasar Modal yang diselenggarakan oleh BEI Kantor Perwakilan Jawa Tengah I bekerja sama dengan KSPM Universitas Semarang
Participation as Guest Speaker in the event of Capital Market Seminar conducted by Indonesia Stock Exchange Central Java I Representative Office in partnership with Capital Market Studies Community Universitas Semarang

15

Oktober 2019

» October 15, 2019



- Kunjungan ke PT Indo Capital Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Indo Capital Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

21

Oktober 2019

» October 21, 2019



- Kunjungan ke PT Amantara Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Amantara Sekuritas Indonesia for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

22

Oktober 2019

» October 22, 2019



- Kunjungan ke PT Erdikha Elit Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Erdikha Elit Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

23

Oktober 2019

» October 23, 2019



- Kunjungan ke PT IMG Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT IMG Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

24

Oktober 2019

» October 24, 2019



- Kunjungan ke PT Danatama Makmur Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Danatama Makmur Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

25

Oktober 2019

» October 25, 2019



- Kunjungan ke PT J.P Morgan Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT J.P Morgan Sekuritas for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

29

Oktober 2019

» October 29, 2019



- Kunjungan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal
Visitation to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

29**Oktober 2019**

» October 29, 2019



- Kunjungan ke PT FAC Sekuritas Cabang Surabaya dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to PT FAC Sekuritas Surabaya Office for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

14**November 2019**

» November 14, 2019



- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019

Execution of Outstanding General Meeting of Shareholders 2019

29**Oktober 2019**

» October 29, 2019



- Kunjungan ke PT MNC Sekuritas Cabang Surabaya dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal

Visitation to PT MNC Sekuritas Surabaya Office for the event of Investor Protection Fund Socialization Program

20**November 2019**

» November 20, 2019



- Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI yang bekerja sama dengan PayTren Aset Management

Execution of socialization and education programs in Indonesia Stock Exchange's Capital Market School in partnership with PayTren Asset Management

13**November 2019**

» November 13, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber pada kegiatan Seminar Literasi dan Inklusi Keuangan yang bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan D'Light Institute

Participation as Guest Speaker in the event of Financial Literacy and Inclusion Seminar in partnership with PT Bursa Efek Indonesia and D'Light Institute

23**November 2019**

» November 23, 2019



- Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI yang bekerja sama dengan Profindo Sekuritas

Execution of socialization and education programs in Indonesia Stock Exchange's Capital Market School in partnership with Profindo Securities

13**November 2019**

» November 13, 2019



- Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI yang bekerja sama dengan BCA Sekuritas

Execution of socialization and education programs in Indonesia Stock Exchange's Capital Market School in partnership with BCA Securities

30**November 2019**

» November 30, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam acara Seminar Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh BEI Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Galeri Investasi Universitas Muhammadiyah Makassar

Participation as Guest Speaker in Sharia Capital Market Seminar conducted by Indonesia Stock Exchange South Celebes Representative Office in partnership with Universitas Muhammadiyah Makassar Investment Gallery

Desember 2019

» December, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam kegiatan investor gathering dan Webinar & IG Live PT Indo Premier Sekuritas
- Participation as Guest Speaker in Investor Gathering event and Webinar & IG Live conducted by PT Indo Premier Sekuritas

18

Desember 2019

» December 18, 2019



- Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi bersama BEI KP Kalimantan Timur dan KSPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
- Participation as Guest Speaker in socialization program in partnership with Indonesia Stock Exchange East Borneo Representative Office and Capital Market Studies Community Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Hubungan Kelembagaan dengan Investor Protection Fund (IPF Regional)

Hubungan Kelembagaan dengan Investor Protection Fund (IPF) Regional



- Dalam rangka membangun hubungan relasi yang baik dengan lembaga *Investor Protection Fund* (IPF) di negara lain, di tahun 2019 Indonesia SIFP telah menjalin komunikasi antara Perusahaan dengan berbagai lembaga perlindungan pemodal di negara lain yaitu *Securities Investor Protection Corporation* (SIPC) di Amerika Serikat, *Japan Investor Protection Fund* (JIPF) di Jepang, dan *Securities Exchanges Guarantee Corporation* (SEGC) di Australia. Hubungan antar lembaga telah terjalin baik dengan adanya pertukaran informasi terkait pengetahuan dasar dari masing-masing lembaga serta pertukaran *contact person* bagi masing-masing lembaga perlindungan investor. Hal ini dilakukan guna melaksanakan studi banding dalam mendapatkan bahan evaluasi dan penyempurnaan model bisnis perlindungan pemodal dan kelembagaan. Selain itu, komunikasi yang telah terjalin dapat membangun citra yang positif di mata regional maupun internasional, dan sekaligus membuka peluang kerjasama di kemudian harinya dengan SIFP di berbagai negara seperti pertukaran informasi serta sinergi antar lembaga lainnya.

In order to establish a sustainable relationship with Investor Protection Fund in other countries, in 2019, Indonesia SIFP has been engaged with Investor Protection Fund companies in other countries, namely Securities Investor Protection Corporation (SIPC) in the United States, Japan Investor Protection Fund (JIPF) in Japan, and Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC) in Australia. These interinstitutional relations have been conducted in good order with the exchange of basic knowledge information and exchange of contact information from each party involved. This is with the intention to conduct comparative study aimed to obtain evaluation materials and improvement of investor protection and institutional business model. Furthermore, the established communication is expected to create a positive image in both regional and international level, while at the same time opening up future cooperation opportunities with other Securities Investor Protection Fund across countries, such as exchange of information and interinstitutional synergy.



Analisis **3** dan Diskusi Manajemen

Gambaran Umum

General Overview

- Pasar Modal Indonesia mencatat pertumbuhan pada tahun 2019. Hal ini dilihat dari nilai Kapitalisasi Pasar yang terus bertambah. Kapitalisasi Pasar pada tahun 2018 bernilai sekitar Rp7.023,5 triliun rupiah dan kemudian naik menjadi Rp7.265,02 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Pasar Obligasi Indonesia mencatatkan peningkatan Total Outstanding baik pada Obligasi dan Sukuk Pemerintah maupun Korporasi dimana pada tahun 2019 Total Outstanding Obligasi dan Sukuk Pemerintah meningkat menjadi Rp2.418,16 Triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.365,35 Triliun. Sedangkan Obligasi Korporasi dan Sukuk pada tahun 2019 memiliki Total Outstanding sebesar Rp424,11 Triliun dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar Rp411,86 Triliun.

Meningkatnya Pasar Modal Indonesia mendorong peningkatan nilai DPP pada tahun 2019. Nilai DPP pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu per tanggal 31 Desember 2019 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 17,66% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2018 menjadi Rp189,08 Miliar dari Rp160,70 Miliar. Aset Pemodal yang Dilindungi meningkat menjadi Rp4.324 Triliun dari Rp4.066 Triliun atau meningkat sebesar 6,34% dibandingkan tahun 2018. Jumlah pemodal yang Dilindungi mengalami peningkatan sebesar 29,51% atau menjadi 1.350.026 pemodal dari 1.042.396 pemodal.

Per Desember 2019, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal memiliki Anggota DPP sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 106 (seratus enam) Perantara Pedagang Efek dan 22 (dua puluh dua) Bank Kustodian. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana terdapat penambahan 4 anggota DPP baru yang terdiri atas 1 Perantara Pedagang Efek dan 3 Bank Kustodian.

The Indonesian capital market recorded growth in 2019. This growth was seen from the increasing value of Market Capitalization. Market capitalization in 2018 is worth around Rp7,023.5 trillion rupiah and then rose to Rp7,265.02 trillion in 2019. In 2019, the Indonesian Bond Market recorded an increase in Total Outstanding in both Government and Corporate Bonds and Sukuk where in 2019 the Total Outstanding Bonds and Government Sukuk increased to Rp2,418.16 Trillion compared to 2018 amounting to Rp2,365.35 Trillion. Whereas Corporate Bonds and Sukuk in 2019 had a Total Outstanding of Rp424.11 Trillion compared to 2018 of Rp411.86 Trillion.

The increase in the Indonesian Capital Market encourages an increase in the value of the IPF in 2019. The value of the IPF in 2019 has increased as of December 31, 2019 the IPF has experienced growth of 17.66% compared to the position of the IPF as of December 31, 2018 to Rp189.08 billion from Rp160.70 Billion. Protected Capital Assets increased to Rp4,324 Trillion or increased by 6.34% compared to 2018. The number of Protected Investors increased by 29.51% or to 1,350,026 investors.

As of December 2019, the Company as the Organizer of Investor Protection Funds has 128 (one hundred and twenty eight) DPP Members, consisting of 106 (one hundred and six) Securities Broker Dealers and 22 (twenty two) Custodian Banks. So that in 2019 there will be 4 new DPP members consisting of 1 Securities Broker Dealer and 3 Custodian Banks.

Bisnis

Business

Pengelolaan DPP

IPF Management

- Nilai DPP dari tahun 2013 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar di tahun 2013, menjadi Rp84,60 miliar di tahun 2014, Rp98,82 miliar di tahun 2015, Rp120,52 miliar di tahun 2016, Rp139,18 miliar di tahun 2017, Rp 160,70 miliar di tahun 2018, dan menjadi Rp 189,08 miliar pada tahun 2019. Sehingga per tanggal 31 Desember 2019 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 17,66% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2018.

Peningkatan nilai DPP tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada luran Keanggotaan Tahunan dan Pendapatan Bunga yang cukup signifikan di tahun 2019. luran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dihimpun oleh P3IEI pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 18,23 miliar atau meningkat 8,55% dari luran Keanggotaan Tahunan 2018 yakni sebesar Rp 17,08 miliar. Selanjutnya, peningkatan Pendapatan Bunga yang berhasil diperoleh oleh P3IEI meningkat sebesar 36,35% dari Rp 8,57 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 11,68 miliar pada tahun 2019.

Komposisi Pendapatan Bunga tersebut terdiri dari penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Surat Utang Negara, dan Jasa Giro Bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/ atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

The value of the IPF from 2013 to 2019 continued to increase, from Rp46.27 billion in 2013 to Rp84.60 billion in 2014, Rp98.82 billion in 2015, Rp20.52 billion in 2016, Rp139.18 billion in 2017, Rp160.70 billion in 2018, and become Rp189.08 billion in 2019. So that as of December 31, 2019 the IPF had experienced a growth of 17.66% compared to the IPF position as of December 31, 2018.

The increase in the value of the IPF was due to a significant increase in Annual Membership Fees and Interest Income in 2019. Annual Membership Contributions successfully collected by P3IEI in 2019 amounted to Rp18.54 billion or an increase of 8.55% from 2018 Annual Membership Contribution which is Rp17.08 billion. Furthermore, the increase in Interest Income obtained by P3IEI increased by 36.35% from Rp8.57 billion in 2018 to Rp 11.68 billion in 2019.

The composition of the Interest Income consists of interest income from Time Deposits, Sovereign Debt, and Bank Giro. This is in accordance with Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016, that assets from IPF can only be invested in Government Securities (SBN) and / or Deposit in Banks owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Perkembangan DPP

» Development of IPF

- Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2019, DPP meningkat sebesar 17,66% dari sebesar Rp160,70 Miliar pada Akhir Desember 2018 menjadi Rp 189,08 Miliar pada Desember 2019.

In connection with the IPF management activities in the form of pooling funding sources and investment activities during 2019, the IPF increased by 17.66% from Rp160.70 billion at the end of December 2018 to Rp 189.08 billion in December 2019.

KETERANGAN Description	2016	2017	2018	2019
	Jumlah (Rp) » Amount (Rp)			
Saldo Awal DPP » IPF Beginning Balance	98,816,330,524	120,524,123,327	139,182,157,691	160,698,130,091
Kontribusi Awal » Initial Contribution				
Iuran Keanggotaan Awal » Initial Membership Contribution	2,100,000,000	-		400,000,000
Iuran Keanggotaan Tahunan » Annual Membership Contribution	12,938,631,471	13,418,807,281	17,075,547,167	18,231,385,241
Pendapatan Bunga » Interest Income	7,412,241,480	7,487,282,951	8,566,060,145	11,680,222,346
Biaya Administrasi » Administrative Costs	-1,856,000	-1,871,000	-8,294,821	-12,746,586
Gain / Loss SBN » Gov. Securities Gain / Loss			(1,547,522,048)	1,591,900,000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP » IPF Balance Before IPF Investment Management Services Fee	121,265,647,475	141,428,342,558	163,267,948,134	192,588,891,092
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP » IPF Investment Management Services Fee	-741,224,148	-2,246,184,868	-2,569,818,043	-3,504,066,704
Saldo Akhir DPP » IPF Ending Balance	120,524,123,327	139,182,157,691	160,698,130,091	189,084,824,388

- Pada Tabel di atas tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2019 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp18,23 Miliar dan dari pendapatan bunga sebesar Rp11,68 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 4 anggota baru DPP sehingga terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp400 Juta.

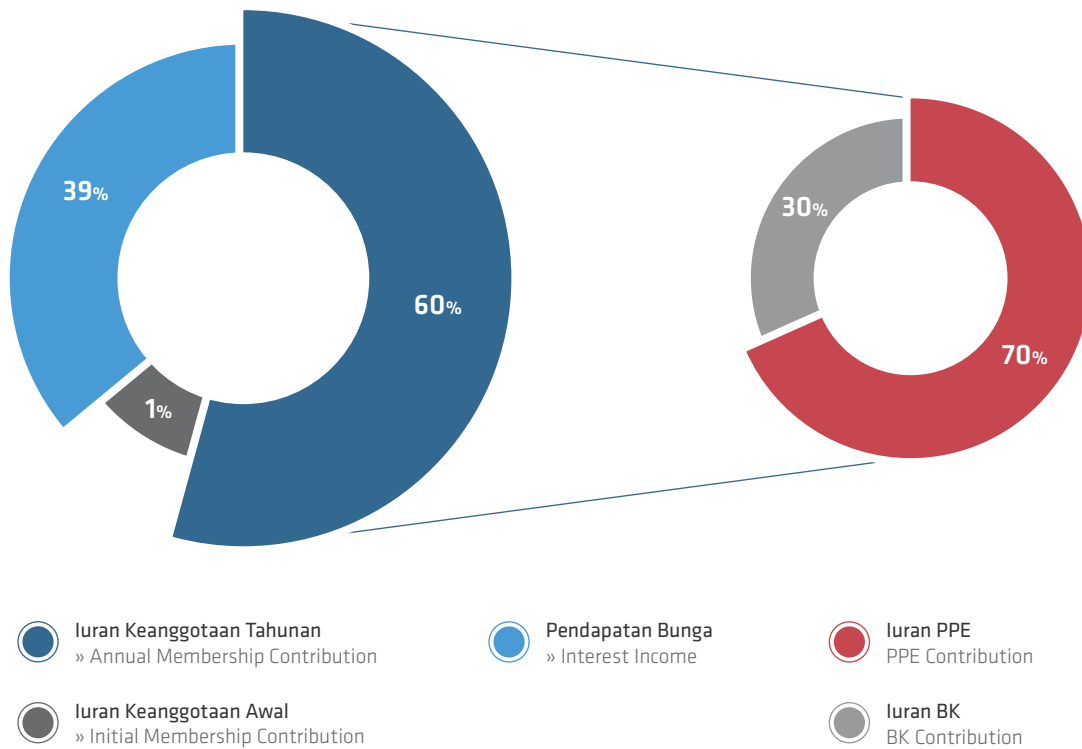
In the table above, information is presented that the contribution to the IPF in 2019 comes from the Annual Membership Contribution of Rp18.23 Billion and from interest income of Rp11.68 billion. Whereas in 2019 there were 4 new IPF members so that there was an additional DPP contribution from the initial membership fee of Rp400 Million.

••• Selanjutnya, pada Grafik di bawah menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2019 dimana kontribusi DPP berasal dari luran Keanggotaan Awal sebesar 1%, luran Keanggotaan Tahunan sebesar 60% dan Pendapatan Bunga sebesar 39%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi luran Keanggotaan Tahunan DPP 2019 sebesar 70% berasal dari PPE dan 30% berasal dari BK.

Furthermore, Graph below shows the position of the DPP as of December 31, 2019 where the contribution of the DPP came from the Initial Membership Contribution of 1%, Annual Membership Contribution of 60% and Interest Income of 39%. Furthermore, it can be said that the composition of 2019 IPF Annual Membership 70% comes from Securities Broker Dealers (PPE) and 30% comes from Custodian Bank (BK).

Grafik 3.1 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2019

» Graphic 3.1 IPF Composition of IPF Contribution



Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

» IPF Funding Source Collection

- Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2019, terkumpul total luran Keanggotaan DPP Tahun 2019 sebesar Rp 18,63 Miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun tersebut berasal dari luran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas :

1. luran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Di tahun 2019, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-79/D.04/2018 tentang Pembayaran luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2019, maka pembayaran luran Keanggotaan Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama antara *Self Regulatory Organization* (SRO) dan PPE dengan porsi masing-masing yaitu 75% oleh SRO dan 25% oleh PPE. Total penghimpunan keseluruhan luran Keanggotaan Tahunan 2019 yaitu sebesar Rp12,67 Miliar dengan Nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2018 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp1.329,19 Triliun. Dari total tersebut 100% SRO telah membayarkan porsinya dan 99,7% PPE telah memenuhi kewajibannya dikarenakan masih terdapat 2 Anggota DPP yang belum memenuhi kewajibannya
2. luran Keanggotaan Awal yang dibayarkan oleh 4 Anggota DPP baru sebesar Rp400 juta, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas (PPE), PT Bank Syariah Mandiri (BK), PT Bank KEB Hana Indonesia (BK), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BK);
3. luran Keanggotaan Tahunan BK yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2019 sebesar 0,1945 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK, yaitu sebesar Rp5,55 Miliar dengan nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2018 sebesar Rp2.855,73 Triliun.

The IPF is collected based on Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Fund Protection for Investors. In 2019, the IPF Funding Source Collection sourced from the Annual Membership Contribution of the IPF Members consisting of:

1. Annual Membership Contributions by IPF determined at 0.001% of the monthly average total value of the previous year's Customer Assets entrusted to IPF Members. In 2019, based on Financial Services Authority (OJK) Board of Commissioners' Decree No. KEP-79 / D.04 / 2018 concerning Payment of Annual Membership Contributions for Investor Protection Funds for Securities Broker Dealers who Administer Securities Accounts in 2019, then the payment of this Annual Membership Contribution is carried out between the Self Regulatory Organization (SRO) and Securities Broker Dealers with each portion amounted at 75% by SRO and 25% by PPE. The total aggregation of the 2019 Annual Membership Contribution is Rp12.67 Billion with an average value of 2018 Customer Assets entrusted to Securities Broker Dealers of Rp1,329.19 Trillion. All of SROs have paid their portion and 99.7% Securities Broker Dealers have fulfilled their obligations because there are still 2 IPF Members who have not fulfilled their obligations yet;
2. Initial Membership Fee paid by 4 IPF Members in the amount of Rp400 million, PT Surya Fajar Sekuritas (PPE), PT Bank Syariah Mandiri (BK), PT Bank KEB Hana Indonesia (BK), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BK);
3. The Custodian Bank (BK) Annual Membership Fee is determined by the total Custodian Bank (BK) risk factors for 2019 of 0.1945 multiplied by 0.001% of the monthly average total value of the previous year's Customer Assets entrusted to the Custodian Bank (BK), which was Rp5.55 Billion with the average value of the Customer Assets in 2018 amounting to Rp2,855.73 Trillion.

Sumber Pendanaan DPP

» Sumber Pendanaan DPP

SUMBER PENDANAAN DPP

IPF FUNDING SOURCE

	BK	PPE	SRO (BEI, KPEI, KSEI)
luran Keanggotaan Tahunan			
⌚ Annual Membership Contribution Fee	Rp 5.554.396.548	Rp 2.708.084.578	Rp 9.968.904.117
Telah Membayar			
⌚ Paid	Rp 5.554.396.548	Rp 2.698.757.439	Rp 9.968.904.117
Belum Membayar			
⌚ Unpaid	-	Rp 9.327.137	-
luran Keanggotaan Awal			
⌚ Initial Membership Fee	Rp 300.000.000	Rp 100.000.000	-
Sub-Total			
⌚ Sub-Total	Rp 5.854.396.548	Rp 2.708.084.576	Rp 9.968.904.117
Total Keseluruhan			
⌚ Grand Total		Rp 18.631.385.241	

Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2019

» Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2019

KETERANGAN Description	2019		2018	
	Jumlah (Rp) » Amount (Rp)			
	PPE	BK	PPE	BK
Total Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya ☞ Total Value of Customer Assets in the Previous Year	Rp 1,267.69 Trillion	Rp 2,855.73 Trillion	Rp 1,180.93 Trillion	Rp 2,289.67 Trillion
Iuran Keanggotaan Awal ☞ Initial Membership Fee	Rp100,000,000	Rp300,000,000	-	-
Iuran Keanggotaan Tahunan ☞ Annual Membership Fee	Rp 12,676,988,693	Rp 5,554,396,548	Rp 11,809,296,223	Rp 5,266,250,944
Total Iuran ☞ Total Fee	Rp18.631.385.241		Rp17,075,547,167	

Kegiatan Investasi DPP

» IPF Investment Activities

- Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2019 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2019, Komite Investasi Perseroan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
5. Total return yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini meningkat 36,33% dari Rp5,99 Miliar pada tahun 2018 menjadi Rp8,16 Miliar pada tahun 2019. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2019 dibukukan sebesar Rp680,28 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Agustus 2019 yaitu sebesar Rp916,49 Juta. Pendapatan investasi DPP di bulan Agustus mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan lainnya, peningkatan ini berasal dari realisasi keuntungan dari penjualan SBN seri FR0061 di bulan Agustus sebesar Rp337,87 Juta. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan Februari 2019 yaitu sebesar Rp601,91 Juta, yang disebabkan oleh jumlah hari terkecil.

The Company as an IPF Institution has the authority to develop IPF with investment activities in accordance with OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds. Based on these functions and as one of the Company's commitments that always puts forward the principles of good corporate governance, the Company has formed an Investment Committee to help the Directors make decisions on the development and monitoring of the development of DPP investments. Regular monthly meetings are held by the Investment Committee to provide input and advice to the Directors regarding investment. During 2019 the Investment Committee held 12 monthly meetings.

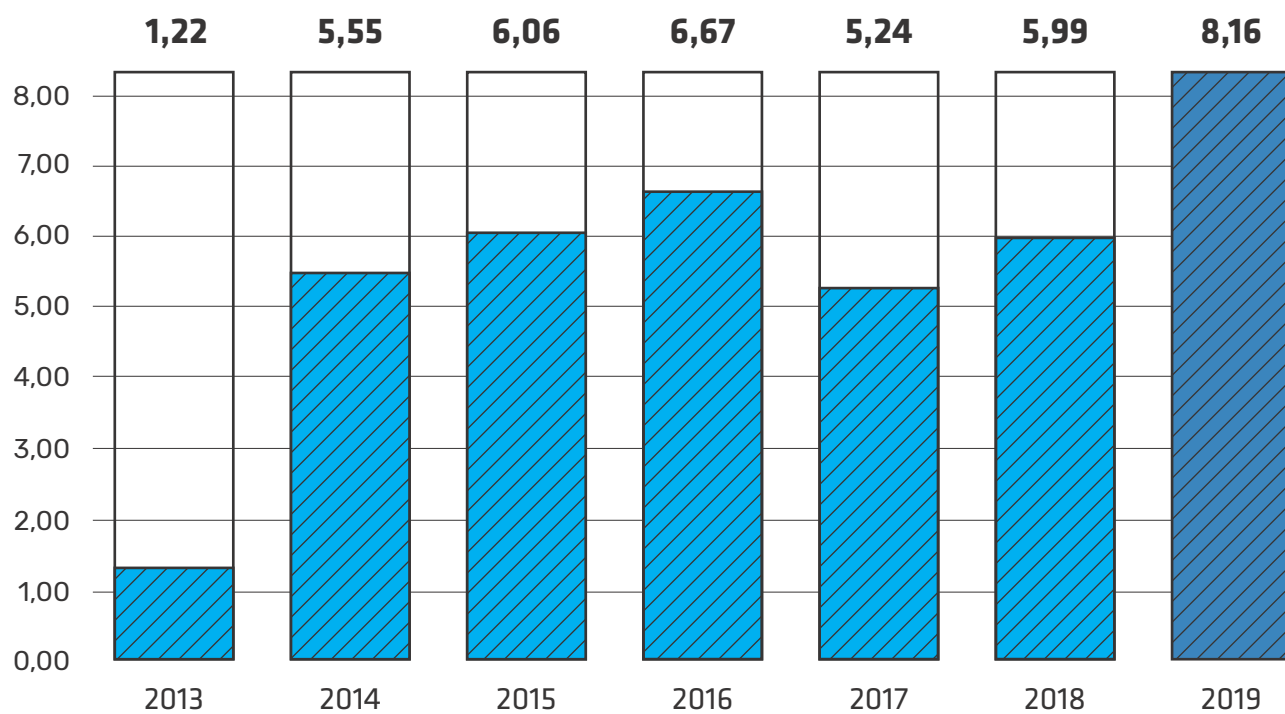
In 2019, the Company's Investment Committee in carrying out its role and function will always maintain the diversity of investment instruments in IPF management in accordance with the corridors of the Investment Policy Guide owned by the Company. Investment activities are carried out by considering:

1. General economic conditions in the banking sector / money market and capital market;
2. Minimum liquidity requirements for the IPF taking into account the need for compensation for loss of investor assets during the claim period;
3. Investment options that are guided by the rules set by the OJK are on Government Securities and / or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. Consequences of taxation aspects of investment decisions;
5. Optimal total return by considering the level of risk and liquidity requirements.

By prioritizing aspects taken into consideration in managing the IPF, the net investment return of the IPF this year increased 36.33% from Rp5.99 Billion in 2018 to Rp8.16 Billion in 2019. While the average monthly net investment return of the IPF in the year 2019 was booked at Rp680.28 Million. The highest net investment yield was obtained in August 2019, amounting to Rp916.49 million. IPF investment income in August increased compared to other months, this increase came from the realization of profits from the sale of SBN series FR0061 in August amounting to Rp337.87 Million. While the lowest was obtained in February 2019 in the amount of Rp601.91 Million, which was caused by the smallest number of days.

Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2013-2019 (dalam miliar rupiah)

» Graphic 3.2 IPF Net Investment Result 2013-2019 (in billion rupiah)



Penempatan DPP

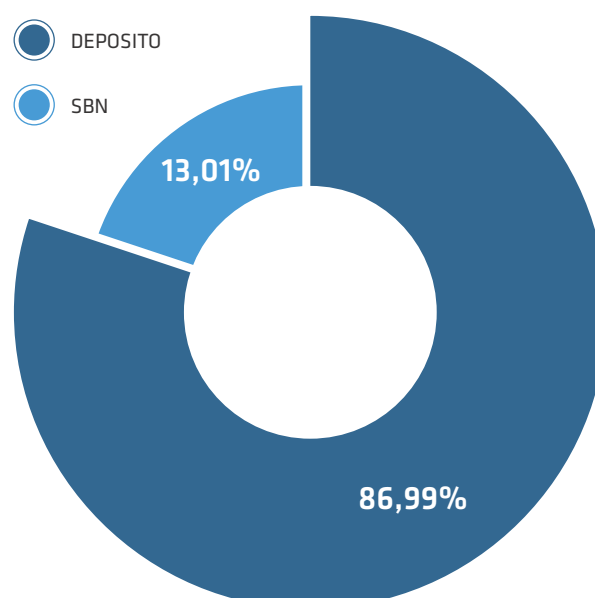
» Penempatan DPP

INSTRUMEN INSTRUMENT	NOMINAL NOMINAL	PENEMPATAN PENEMPATAN	TENOR TENOR	RATE RATE
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 49.468.920.079	9 Nov 2019 - 9 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 38.282.287.645	4 Nov 2019 - 4 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 25.557.798.375	4 Mar - 4 Mar 2020	12 Bulan » 12 Months	7,75%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 16.483.749.384	3 Nov 2019 - 3 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 15.959.676.813	6 Nov 2019 - 6 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 10.604.172.480	1 Ags 2019 - 1 Feb 2020	6 Bulan » 6 Months	7,65%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 5.645.887.306	1 Nov 2019 - 1 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%
Deposito BTN » Deposito BTN	Rp 4.628.714.521	15 Nov 2019 - 15 Feb 2020	3 Bulan » 3 Months	7,50%

SBN	NOMINAL	TENOR	MATURITY	COUPON	YIELD	HARGA PEROLEHAN
FR59	Rp 20.000.000.000	7,32 Tahun » 7,32 Years	15 Mei 2027 » 15 May 2027	7,00%	6,70%	Rp 20.000.000.000
FR59	Rp 5.000.000.000	7,32 Tahun » 7,32 Years	15 Mei 2027 » 15 May 2027	7,00%	6,70%	Rp 4.925.000.000

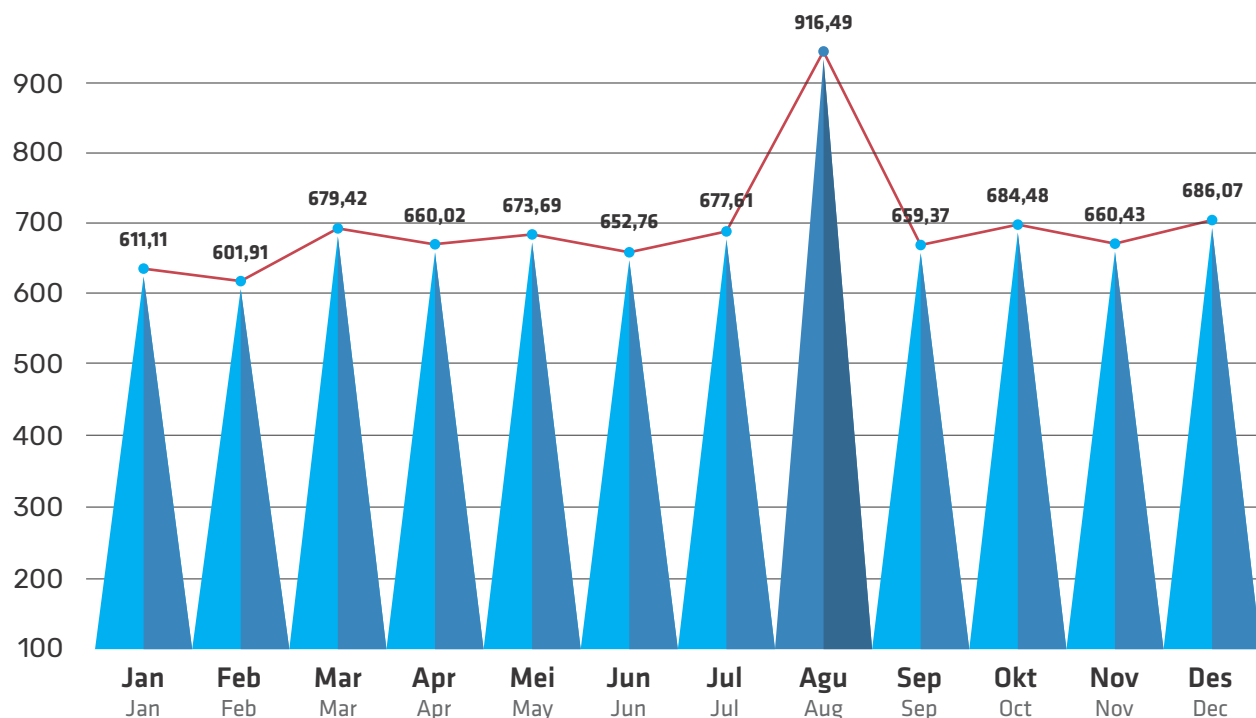
WEIGHTED AVERAGE %

Rate DEPOSITO	7,55
Yield SBN	6,70



Grafik 3.3 Hasil Investasi Bersih DPP 2019 (dalam juta rupiah)

» Graphic 3.3 IPF Net Investment Result 2019 (in million rupiah)



Pencapaian Target Hasil Investasi DPP 2019

» Pencapaian Target Hasil Investasi DPP 2019

KETERANGAN	REALISASI	TARGET	%	REALISASI	TARGET	%
	Des-19	Des-19		s/d Des-19	RKAT 2019	
Gross	Rp 981.339.966	Rp 881.319.524	111,35%	Rp 11.680.222.346	Rp 10.196.173.667	114,55%
Imbalan Jasa PDPP 30%	(Rp 294.401.990)	(Rp 264.395.857)	111,35%	(Rp 3.504.066.704)	(Rp 3.058.852.100)	114,55%
Nett	Rp 686.077.476	Rp 616.923.666	111,21%	Rp 8.163.409.056	Rp 7.137.321.567	114,38%

Keanggotaan DPP

IPF Membership

- Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.

Based on Articles 16 and 17 of OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Financing Protection Funds. Stat-ed on the regulation, parties which are required to become IPF Members are Securities Broker Dealers (PPE) that administer clients' securities accounts and Custodian Banks (BK). As in the previous provisions in Bapepam and LK Rule Number VI.A.4 of 2012 concerning Capital Protection Funds which have now been replaced by OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds, the Custodian Bank is officially a Member IPF as of January 1, 2016.

Grafik 3.4 Komposisi Anggota DPP

» Graphic 3.4 IPF Member Composition



- Anggota DPP per Akhir Tahun 2019 sebanyak 128 yang terdiri dari 106 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, terdiri dari PPE Lokal 85, PPE Patungan 21; dan 22 Bank Kustodian (BK), terdiri dari BK Lokal 13, BK Patungan 9.

Pada tahun 2019 terdapat 4 Anggota Baru DPP yang terdiri dari 1 PPE dan 3 BK sebagai berikut:

1. PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
2. PT Bank Syariah Mandiri (BK)
3. PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BK)

P3IEI telah melakukan pendekatan dan sosialisasi secara langsung terhadap 4 Anggota Baru DPP tersebut. Setelah 4 Anggota Baru DPP memenuhi kewajiban Iuran Keanggotaan Awal DPP dan berkas persyaratan menjadi Anggota DPP, P3IEI telah menetapkan status keanggotaan 4 Anggota Baru DPP tersebut melalui sertifikat dan plakat keanggotaan DPP.

Selanjutnya, sebagai Anggota DPP Kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dan dengan rekening Efek milik Kustodian;
3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dan dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
4. Memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

As of the end of 2019, there are 128 IPF members consisting of 106 Securities Broker Dealers (IPF) that administering Client's Securities Accounts, consisting of 85 Local Securities Broker Dealers, 21 Joint Venture Securities Broker Dealers; and 22 Custodian Banks (BK), consisting of 13 Local Custodian Banks, 9 Joint Venture Custodian Banks.

In 2019 there were 4 New IPF Members consisting of 1 Securities Broker Dealer and 3 Custodian Banks:

1. PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
2. PT Bank Syariah Mandiri (BK)
3. PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
4. PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (BK)

P3IEI has approached and socialized directly to the 4 new IPF members. After 4 New IPF Members fulfill the IPF Initial Membership Fee and the requirement's files to become an IPF Member, P3IEI has determined the membership status of the 4 IPF DPP Members through an IPF certificate and membership plaque

Furthermore, Custodian Bank as IPF Member, must fulfill the following provisions:

1. Paying the membership fees full and timely as determined by the Financial Services Authority;
2. Separate Securities accounts in the Custodian for each Investor and with Securities accounts belonging to the Custodian;
3. Separate fund accounts with the Bank for each Investor and with a Custodian fund account as regulated in the legislation in the Capital Market sector, which regulates the Internal Control of Securities Companies Conducting Business Activities as Brokers; and
4. Have and implement a risk management system as regulated in statutory provisions in the Capital Market sector.

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

2. Bagi BK:

- a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
- b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

The details of the IPF membership fees are as follows:

1. For PPE administering clients' securities accounts, which take effect on January 1, 2014, provided that:
 - a. Initial membership fee of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each PPE administering the client's Securities account; and
 - b. The annual membership fee is 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the previous year's Customer Assets entrusted to the PPE administering the client's Securities account.

2. For BK:

- a. Initial membership fee of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank; and
- b. Annual membership fees of all Risk Factors are multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the previous year's Investor Assets deposited at the Custodian Bank.

Monitoring Risiko Anggota DPP

▼ Risk Monitoring of IPF's member

- Sistem Monitoring Risiko yang digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (*early warning system*) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel *Profit Margin*, *MKBD*, *Aset Turn Over*, *Debt to Equity Ratio*, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode *extreme value* VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

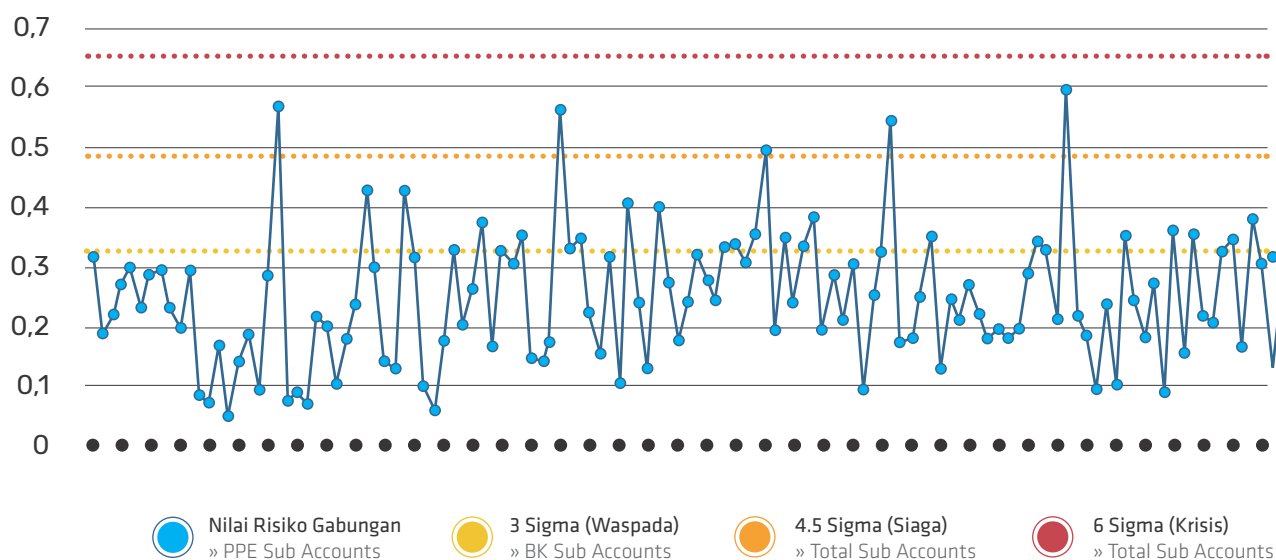
The Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor risks to IPF Members related to the risk of losing investor assets. The system functions as an early warning system for the Company in the framework of estimating compensation payments using the IPF and as a reference in estimating the adequacy of the IPF needed to meet the compensation obligations that may arise in the future or in a certain period.

The system was developed from a risk assessment model that considers investor risk factors and custodial risk factors. Investor risk factors are variables that describe the likelihood of losing investor assets due to the development of market conditions represented by the composite stock price index (IHSG), transaction frequency, transaction value, and market capitalization. Meanwhile, custodial risk factors are variables that describe the condition of custodians who are unable to pay lost investor assets, represented by the Profit Margin, MKBD, Turnover Asset, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Accounts.

The risk assessment model is estimated using the extreme value VaR method approach, where all investors are assumed to have the same risk because the risk variable used is a market risk variable, while custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculations are obtained which illustrate the magnitude of custodial risk.

Grafik 3.5 Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2019

» Graphic 3.5 Distribution of Risk Values of IPF Members 2019



Tabel 3.2 Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2019

» Table 3.2 Distribution of Risk Value for IPF Members in 2019

No.	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah Kustodian Number of Custodian	Persentase Percentage
1.	Normal. Normal	100	78.1 %
2.	Waspada. Alert	23	18.0 %
3.	Siaga. Standby	5	3.9 %
4.	Krisis. Crisis	0	0.0 %
Jumlah » Total		128	100 %

... Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Based on the calculation results of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced by using the IPF if the custodian fund is insufficient to make compensation to the Investor. Replacement using the DPP follows the provisions of the highest limit of compensation as stipulated in the Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-46 / D.04 / 2015 Regarding Amendments to the Decisions of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-70 / D.04 / 2013 Regarding the Determination of the Highest Limit for Every Investor and Each Custodian in the Context of Payment of Compensation to the Investor by Using the Investor Protection Fund.

- Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perseroan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 128 (seratus dua puluh delapan) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2019 berkisar sebesar Rp 4.323,55 triliun. Pada akhir tahun 2019, Anggota DPP terdiri dari 106 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 22 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp 1.195,57 miliar yang dikelola PPE & sebesar Rp 3.127,98 miliar yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) Pemodal adalah sebanyak 1.282.610 SRE pada PPE dan sebanyak 67.416 SRE pada Bank Kustodian.

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP untuk melakukan *coverage analysis* terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp 189,08 Miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 8 (delapan) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp 150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 11 (sebelas) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel. Kemampuan DPP & CGRP dalam Melakukan Coverage. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The decree states that the highest limit for each financier in one custodian in the context of payment of compensation to investors using an IPF is Rp100 million. Furthermore, the highest limit for each custodian in the context of payment of compensation to investors using DPP is Rp50 billion.

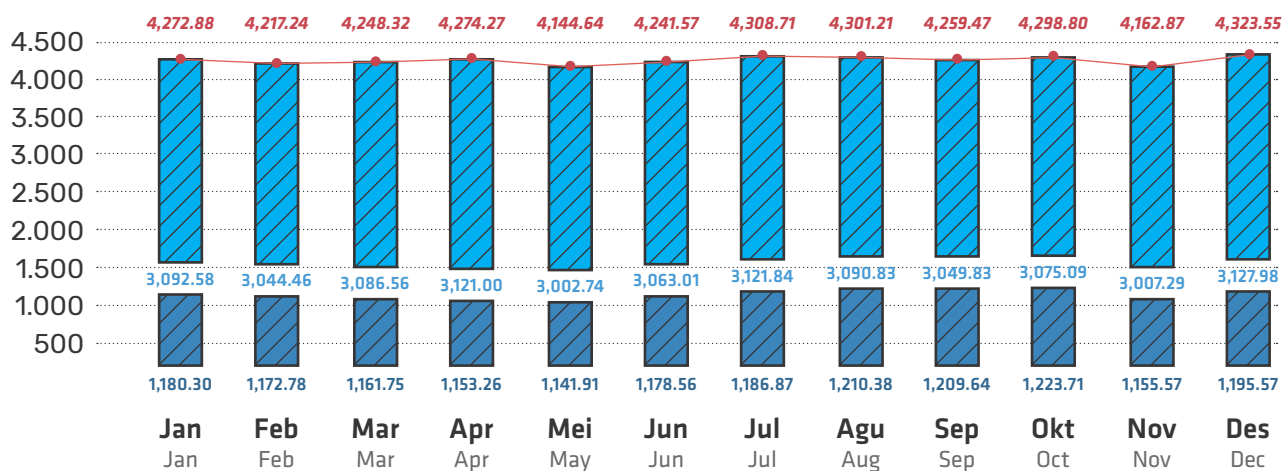
With the existence of the Monitoring System, the Company can estimate monitoring of important parameters including: Risk Profile of IPF Members, the amount of IPF needs and the ability of IPF to conduct coverage. The value of investor assets managed by 128 (one hundred and twenty eight) IPF members as of December 31, 2019 is around Rp4,323.55 trillion. At the end of 2019, IPF Members consisted of 106 Securities Broker Dealers (PPE) & 22 Custodian Banks with total assets under management of Rp1,195.57 billion managed by PPE & amounting to Rp3,127.98 billion managed by Custodian Banks, while the number of Sub Securities Accounts (SRE) Investors are as many as 1,282,610 SRE in PPE and as many as 67,416 SRE at Custodian Banks.

P3IEI further develops the IPF Member Risk Monitoring System to conduct coverage analysis related to the ability of the IPF. The results of an analysis of the value of the IPF as of December 31, 2019 showed that the IPF value of Rp189.08 billion was able to cover losses for the loss of the Capital Investors' assets of 8 (eight) Custodian Members of the IPF and if added with a CGRP worth Rp 150 billion, it was able to cover losses on loss of Investors' Capital Assets from 11 (eleven) Custodian Members of the IPF, as shown in Table. The growth of investors' assets and securities sub-accounts for investors in 2019 is as follows:

Grafik 3.6 Aset Pemodal Tahun 2019

» Graphic 3.6 Investor Assets in 2019

Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah



Aset Pemodal PPE
» Assets of PPE investor



Aset Pemodal BK
» Assets of BK investor

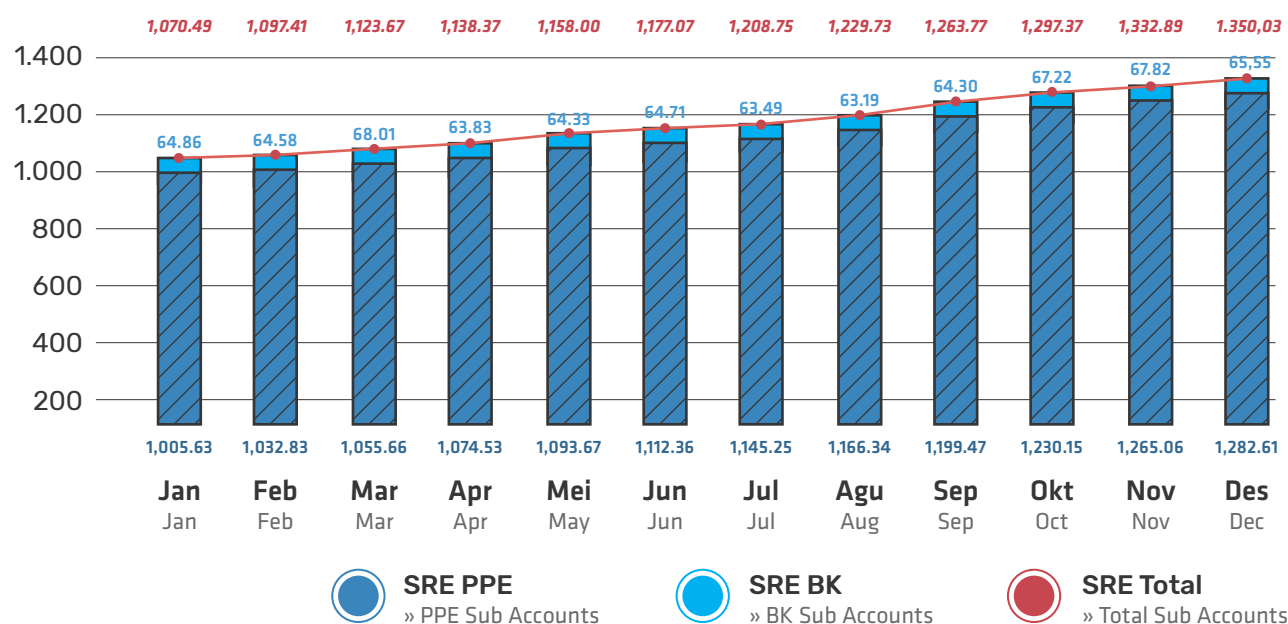


Total Aset
» Total Assets

Grafik 3.7 Jumlah SRE Tahun 2019

» Graphic 3.7 Total SRE of 2019

Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah



Kemampuan DPP & CGRP dalam melakukan coverage

» IPF & CGRP coverage

No.	Anggota DPP yang perlu di cover oleh DPP dan CGRP IPF members who need to be covered by the IPF and ICR	2019	2018	2017
1.	PPE perlu di cover DPP » Broker Dealer who need to be covered by the IPF	8 PPE (189.120 Pemodal) 8 PPE (189,120 Investors)	5 PPE (165.073 Pemodal) 5 PPE (165,073 Investors)	7 PPE (41.269 Pemodal) 7 PPE (41,269 Investors)
2.	PPE perlu di cover DPP + CGRP » Broker Dealer who need to be covered by the IPF + ICR	11 PPE (316.811 Pemodal) 11 PPE (316,811 Investors)	8 PPE (371.499 Pemodal) 8 PPE (371,499 Investors)	12 PPE (197.996 Pemodal) 12 PPE (197,996 Investors)
3.	BK perlu di cover DPP » Custodian Bank who need to be covered by the IPF	0 BK (0 Pemodal) 0 BK (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) 0 BK (0 Investors)	1 BK (16 Pemodal) 1 BK (16 Investors)
4.	BK perlu di cover DPP + CGRP » Custodian Bank who need to be covered by the IPF + ICR	0 BK (0 Pemodal) 0 BK (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) 0 BK (0 Investors)	2 BK (3.962 Pemodal) 2 BK (3,962 Investors)
TOTAL DPP (miliar) » TOTAL IPF (miliar)		189.08	160.70	139.18
TOTAL DPP + CGRP (miliar) » TOTAL IPF + ICR (miliar)		339.08	310.70	289.18

- Jumlah Anggota DPP (PPE) yang dapat di cover oleh DPP per akhir Tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 7 PPE di tahun 2017 dan 5 PPE di Tahun 2018, menjadi 8 PPE. Jumlah PPE yang dapat di cover oleh DPP dan CGRP per akhir Tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 8 PPE di Tahun 2018 menjadi 11 PPE. Adapun Anggota DPP (BK) sejak tahun 2018 tidak ada yang masuk dalam Anggota DPP yang perlu mendapatkan perlindungan baik oleh DPP maupun DPP dan CGRP.

The number of IPF members (Securities Broker Dealers) that can be covered by the IPF by the end of 2019 has increased from previous years, from 7 Securities Broker Dealers in 2017 and 5 Securities Broker Dealers in 2018, to 8 Securities Broker Dealers in 2019. The number of Securities Broker Dealers that can be covered by the IPF and Investor Compensation Reserves by the end of 2019 also increased from the previous year, from 8 Securities Broker Dealers in 2018 to 11 Securities Broker Dealers. As for the IPF Members (Custodian Bank), since 2018 no one is included in the IPF Member who needs to get protection both by the IPF and the IPF and Investor Compensation Reserves.

Klaim & Pengaduan

Claim & Complaints

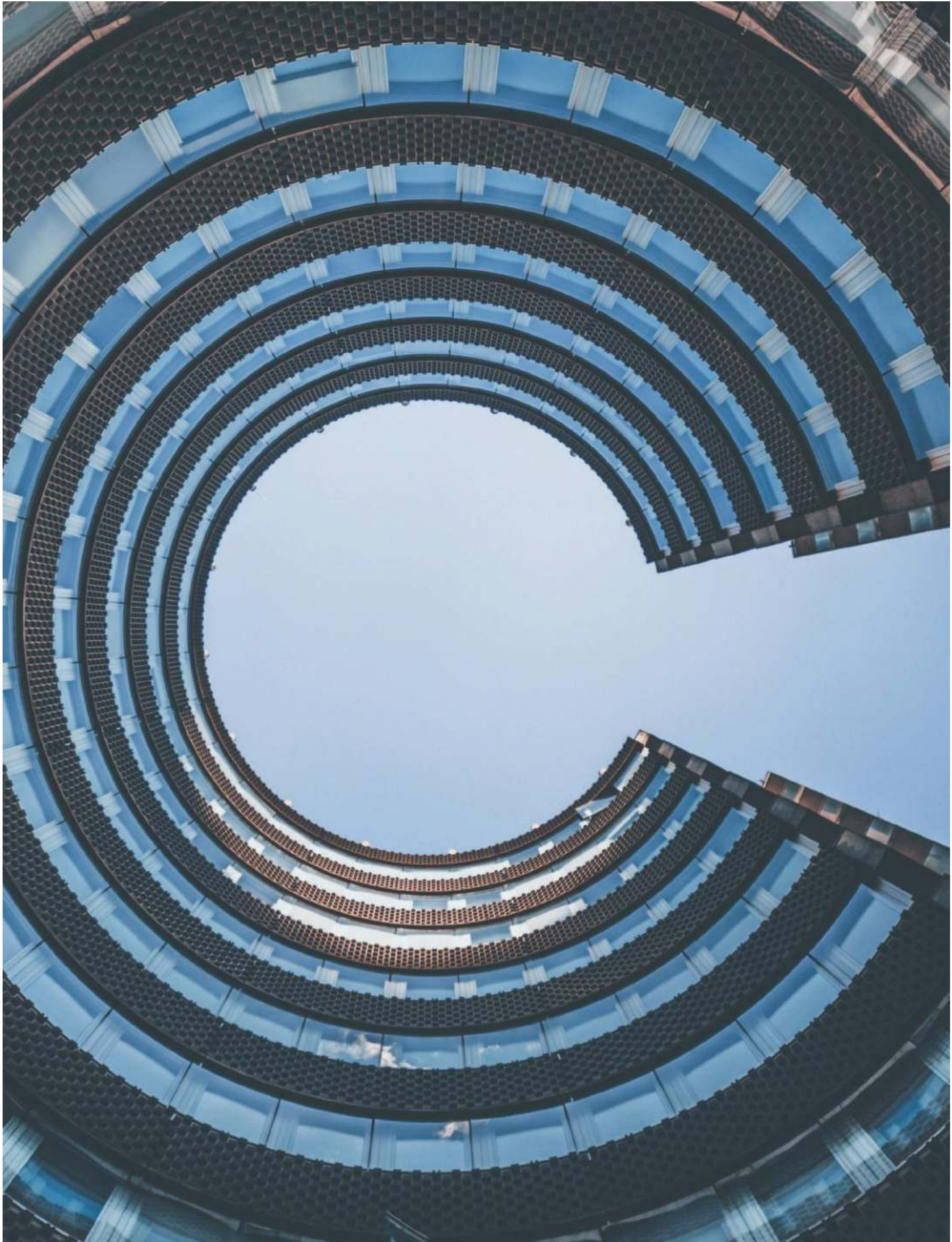
- Salah satu fungsi P3IEI adalah melindungi Pemodal dari potensi kehilangan Aset Pemodal. Hal ini dilakukan antara lain dengan menangani klaim Pemodal yang kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menyatakan secara tertulis adanya kondisi terdapat kehilangan Aset Pemodal, dimana Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang, Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Selama tahun 2019 tidak terdapat proses penanganan klaim karena tidak adanya kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP. Namun demikian terdapat 2 pengaduan yang masuk kepada P3IEI yang pengaduannya tersebut belum mencapai tahap pembayaran klaim dikarenakan belum adanya pernyataan tertulis OJK mengenai terpenuhinya kondisi prasyarat kehilangan aset Pemodal. Selain pengaduan, P3IEI juga menerima dan memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan atas pertanyaan terkait peran, fungsi, maupun prosedur yang dimiliki P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pemahaman pemangku kepentingan yang memerlukan informasi tersebut serta memberikan rekomendasi tindakan bagi pemangku kepentingan jika dibutuhkan.

One of Indonesia SIPF's organizational function is to protect Investors from potential loss of Investor assets. This is executed by processing the claim of Investor assets loss received through Investor Grievance and Consultancy Services System. Indonesia SIPF would perform the function after Financial Services Authority would state in writing the existence of loss of Investor assets event, absence of Custodian capability to return lost Investor assets, Securities Broker Dealer Custodian which administer Securities is deemed unable to continue its business activities and its business license considered for removal by Financial Services Authority, or Custodian Bank is deemed unable to continue its business activities as Custodian Bank and its Commercial Bank Custodian approval considered for removal by Financial Services Authority.

In 2019, there has been no claim processed as the result of the Investor's assets loss which required the compensation by IPF. However, there were 2 grievances submitted to Indonesia SIPF in which have not yet reached the stage of claim compensation since no written statement has been issued by Financial Services Authority regarding fulfillment of Investor's asset loss requirements. Other than grievances, Indonesia SIPF also provides consultation for stakeholders who have questions regarding role, function, or procedures possessed by Indonesia SIPF as Investor Protection Fund Provider. This is done in order to ensure the understanding of stakeholders who needs said information and to provide recommendations of actions for stakeholders if needed be.





Pengelolaan Investasi Lain

Other Investment Management

••• Cadangan Ganti Rugi Pemodal mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp157,17 Miliar dibandingkan nilai tahun 2018 sebesar Rp146,87 Miliar. Per akhir Desember 2019, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp10 Miliar atau 6,67% dari total portofolio CGRP dengan rate 7,95% p.a tenor 3 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp140 Miliar atau 93,33% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,20% dan tenor 7,25 Tahun. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal hingga Desember 2019 adalah sebesar Rp11.640.911.487 atau 103,73% dari Target RKAT 2019 Rp11.222.767.123

Investor compensation reverse (CGRP) increased in 2019 to Rp157.77 billion compared to the 2018 value of Rp146.67 billion. As of the end of December 2019, the composition of the CGRP portfolio consisted of time deposits of Rp10 billion or 6.67% of the total CGRP portfolio at a rate of 7.95% p.a. for 3 months, then there were private bond instruments amounting to Rp140 Billion or 93.33% of total portfolio with a coupon weighted average of 9.20% and a tenor of 7.25 Years. Realization of investment returns from the investor compensation until December 2019 amounted to Rp11,640,911,487 or 103.73% of the 2019 Annual Workplan and Budget's Target of Rp11,222,767,123.

Penempatan & Investasi CGRP

CGRP Placement & Investment

Penempatan CGRP

» CGRP Placement

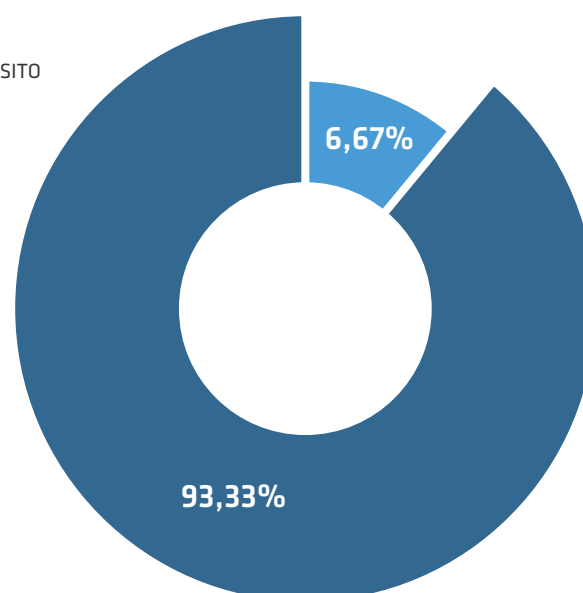
INSTRUMEN	BANK	NOMINAL (RP JUTA)	INTEREST RATE (%P.A)	TENOR	MATURITY DATE
Deposito Berjangka ⌚ Deposito Berjangka	Bank Bukopin	10.000	7,95%	3 Bulan ⌚ 3 Months	11-1-2020 (ARO)

INSTRUMEN	OBLIGASI	NOMINAL (RP JUTA)	COUPON RATE (%P.A)	YIELD RATE (%P.A)	TTM (Thn)	MATURITY DATE
	BEXI03ECN4	20.000	9,40%	8,107	7,16	23-02-2027
	BEXI04EDN3	25.000	9,25%	7,915	5,86	08-11-2025
	ISAT02ECN1	40.000	8,70%	8,134	7,42	31-05-2027
Obligasi Korporasi	ISAT02ECN3	15.000	9,35%	8,345	8,35	03-05-2028
	PIKI01C	20.000	9,75%	8,894	8,52	04-07-2028
	SMFP04CCN7	11.000	9,35%	7,573	4,12	12-02-2024
	PPLN03CCN3	9.000	9,25%	7,932	6,15	19-02-2026

WEIGHTED AVERAGE %

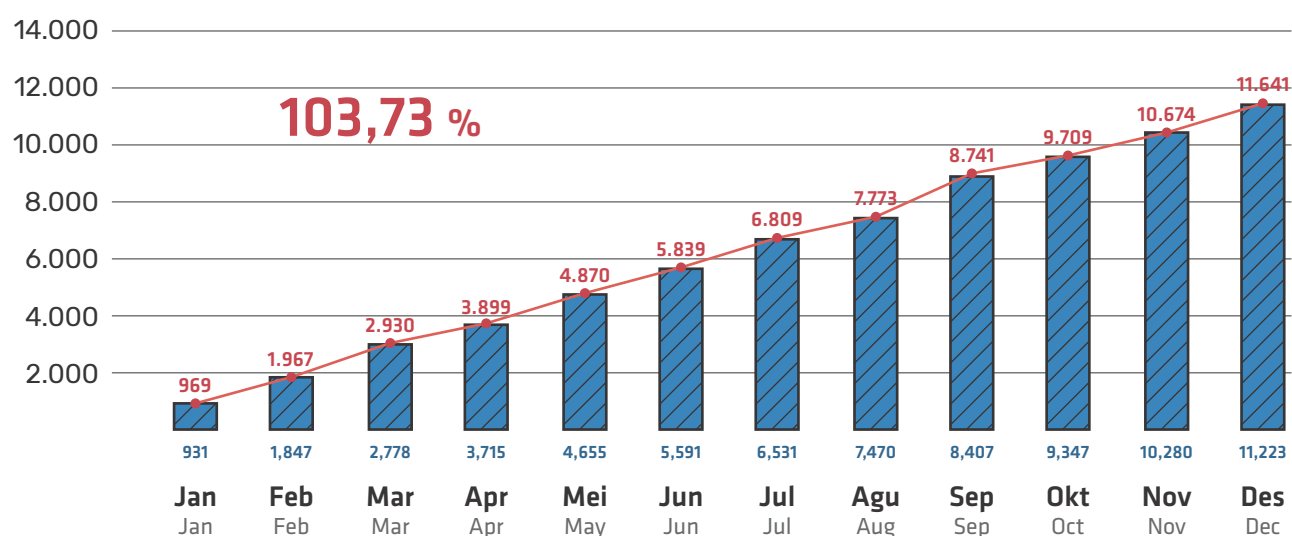
Rate Deposito Berjangka	7,95
Coupon Obligasi Korporasi	9,20
Yield Obligasi Korporasi	8,1885

DEPOSITO
SBN

**Hasil Investasi Bersih CGRP 31 Desember 2019**

» CGRP Net Investment Results December 31, 2019

Dalam Juta Rupiah » In Million Rupiah

**Pencapaian Target Hasil Investasi CGRP 2019**

» Pencapaian Target Hasil Investasi CGRP 2019

KETERANGAN	REALISASI	TARGET	%	REALISASI	TARGET	%
	Des-19	Des-19		Des-19	2019	
Pencapaian	Rp 966.774.772	Rp 939.854.852	102,86%	Rp 11.640.911.487	Rp 11.222.767.123	103,73%

Modal

\ Capital

- Per akhir Desember 2019, komposisi portofolio Modal PDPP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp5,2 Miliar atau 12,94% dari total portofolio dengan rate 7,87% p.a tenor 2,15 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp35 Miliar atau 87,06% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,45% dan tenor 4,37 Tahun Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2019 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp 3.196.217.995 atau 104,22% dari target RKAT 2019 sebesar Rp3.066.941.137.

As of the end of December 2019, the composition of the IPF Institution Capital portfolio consisted of time deposits of Rp5.2 billion or 12.94% of the total portfolio at a rate of 7.87% p.a. 2.15 months, then there were private bonds of Rp35 billion or 87.06% of the total portfolio with a coupon weighted average of 9.45% and a tenor of 4.37 Years Realization of interest income and current account services as of December 2019 on IPF Institution's capital investment amounted to Rp 3,196,217,995 or 104.22% of the Annual Workplan and Budget target of 2019 amounting to Rp3,066,941,137.

Penempatan & Investasi Modal

\ Capital Placement & Investment

Penempatan Modal

» Capital Placement

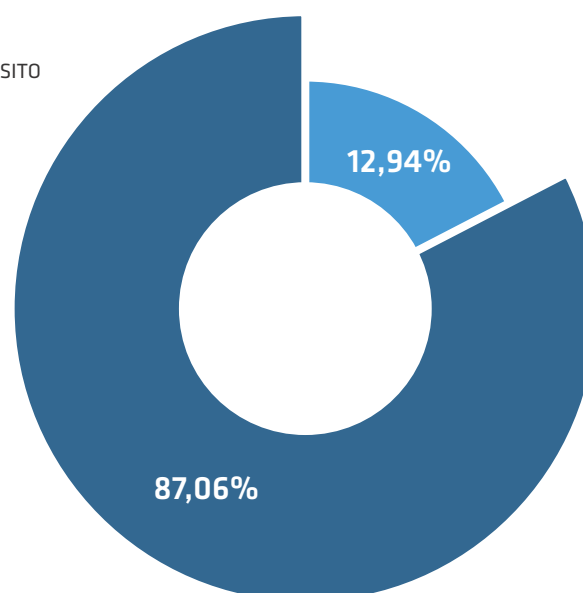
INSTRUMEN	BANK	NOMINAL (RP '000.000)	INTEREST RATE (%P.A)	TENOR	MATURITY DATE
Deposito Berjangka ⌚ Deposito Berjangka	Bank Bukopin	2.200	7,75%	1 Bulan ⌚ 1 Months	12-01-2020 (ARO)
	Bank Bukopin	3.000	7,95%	3 Bulan ⌚ 3 Months	01-01-2020 (ARO)

INSTRUMEN	OBLIGASI	NOMINAL (RP JUTA)	COUPON RATE (%P.A)	YIELD RATE (%P.A)	TTM (Thn)	MATURITY DATE
Obligasi Korporasi	ISAT02ECN1	5.000	9,25%	8,134	7,42	31-05-2027
	PNMP02BCN1	15.000	9,25%	8,587	2,53	12-07-2022
	BJBR01BSBCN1	5.000	9,90%	9,658	4,94	06-12-2024
	TPIA01CCN1	5.000	9,75%	8,661	4,96	12-12-2024
	PNBN03SBCN1	5.000	9,50%	9,635	5,51	03-07-2025

WEIGHTED AVERAGE %

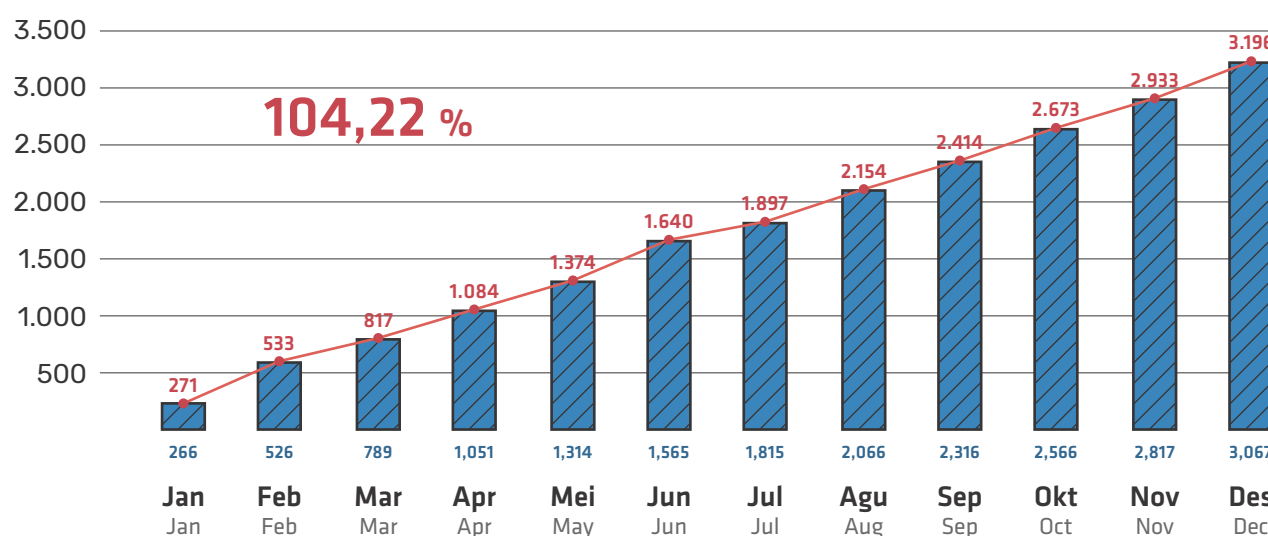
Rate Deposito Berjangka	7,87
Coupon Obligasi Korporasi	9,45
Yield Obligasi Korporasi	8,836

DEPOSITO
SBN

**Hasil Investasi Bersih Modal 31 Desember 2019**

» Capital Net Investment Results December 31, 2019

Dalam Juta Rupiah » In Million Rupiah

**Pencapaian Target Hasil Investasi DPP 2019**

» Pencapaian Target Hasil Investasi DPP 2019

KETERANGAN	REALISASI	TARGET	%	REALISASI	TARGET	%
	Des-19	Des-19		Des-19	2019	
Pencapaian	Rp 263.689.552	Rp 250.357.962	105,33%	Rp 3.196.217.995	Rp 3.066.941.137	104,22%

Keuangan

Finance

Tinjauan Umum

General Overview

- Analisis kinerja keuangan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan Keuangan Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The analysis of financial performance refers to the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2019. The Company's Financial Statements were audited by the Heliantono & Partners with fair opinions in all material matters. Financial performance and cash flow for the year ended December 31, 2019 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

The Company's Financial Report along with the Independent Auditor's Report are attached and become an inseparable part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

Operating Profit and Net Profit

- Pada tahun 2019, Perseroan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp2,021 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,636 miliar atau 425% (empat ratus dua puluh lima perseratus) dari laba sebelum pajak pada tahun 2018 sebesar Rp384 juta. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan usaha sebesar Rp1,993 miliar atau 15% (lima belas perseratus).

Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp2,003 miliar atau meningkat sebesar 1154% (seribu seratus lima puluh empat perseratus) dari laba bersih pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp159,7 juta. Perseroan memperoleh laba tahun berjalan komprehensif tahun 2019 sebesar Rp14,29 miliar meningkat Rp22,26 miliar atau 280% (dua ratus delapan puluh perseratus) dari laba (rugi) tahun berjalan komprehensif tahun 2018 sebesar -Rp7,96 miliar.

In 2019, the Company made a profit before tax of Rp2,021 billion, an increase of Rp1,636 billion or 425% (four hundred twenty-five percent) of profit before tax in 2018 of Rp384 million. The increase in profit before tax was due to an increase in total operating revenues by Rp1,993 billion or 15% (fifteen percent).

Net profit recorded by the Company in the amount of Rp2,003 billion or increased by 1154% (one thousand one hundred fifty-four percent) of net profit in 2018 of Rp159.7 million. The Company obtained net comprehensive profit for the year of 2019 amounting to Rp14.29 billion, an increase of Rp22.26 billion or 280% (two hundred eighty percent) of the comprehensive income (loss) for the year 2018 of -Rp7.96 billion.

Tabel 3.3 Laporan Laba Rugi (diaudit) / dalam rupiah

» Table 3.3 Income Statements (audited) / in Rupiah

URAIAN Description	2019	2018
Pendapatan » Operating Revenues	15,435,215,163	13,441,436,629
Beban Usaha » Operating Expenses	13,413,971,445	13,056,505,222
Laba Sebelum Pajak » Profit (Loss) Before Tax	2,021,243,718	384,931,407
Manfaat (Beban) Pajak » Tax Benefit (Expense)	(17,520,334)	(225,195,337)
Laba Tahun Berjalan » Net Profit (Loss)	2,003,723,385	159,736,070
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain » Other Comprehensive Income	12,292,777,637	(8,118,439,775)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Komprehensif » Net Comprehensive Profit (Loss)	14,296,501,022	(7,958,703,705)

Pendapatan

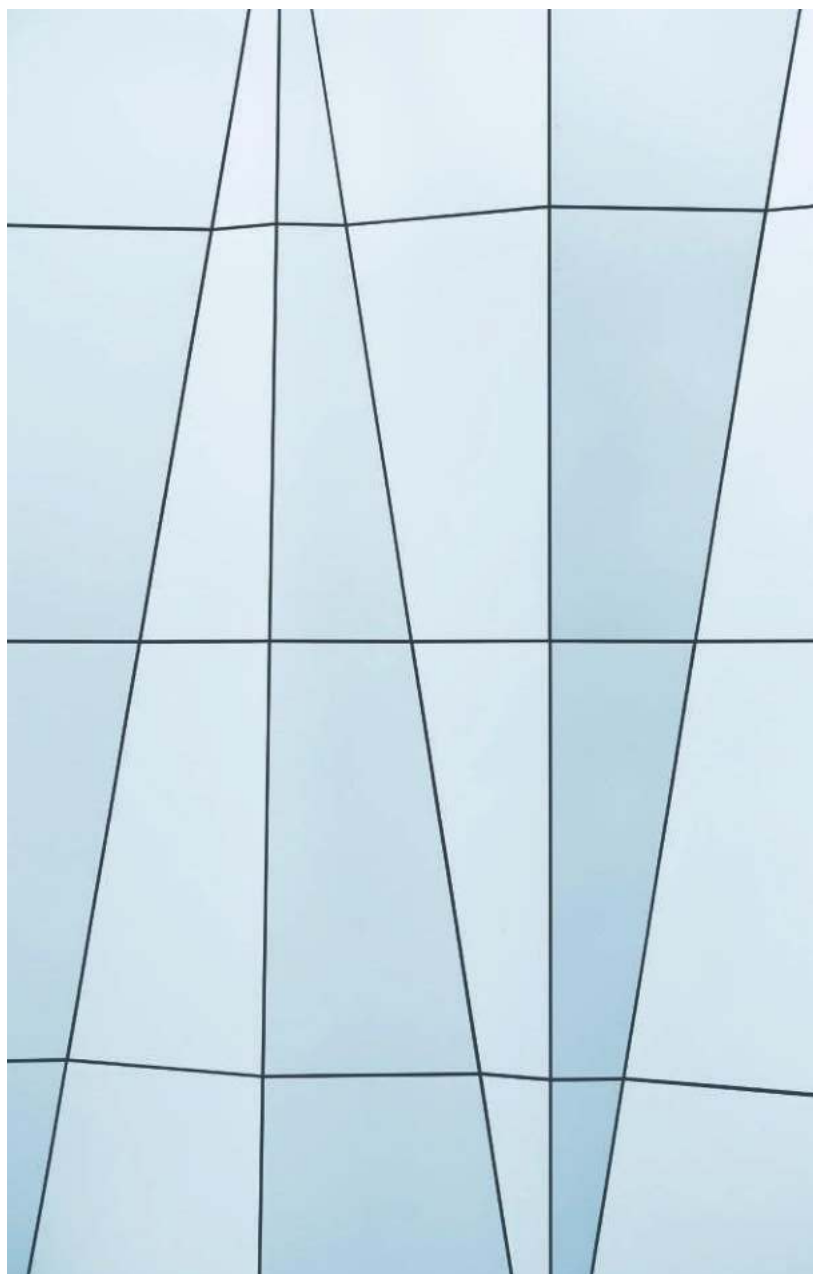
» Operating Income

- Pada tahun 2019, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp15,44 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,993 miliar atau 15% (lima belas perseratus) dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13,44 miliar. Peningkatan disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan jasa dan bunga yang cukup signifikan di tahun 2019.

Pendapatan Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada tahun 2019 Pendapatan Jasa meningkat sebesar Rp934 juta. Pada tahun 2019, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp3,5 miliar, meningkat 36% (tiga puluh enam perseratus) dari pendapatan jasa di tahun 2018. Sedangkan Pendapatan Bunga meningkat sebesar Rp1,059 miliar atau sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bunga di tahun 2018.

In 2019, the Company recorded a Revenue of Rp. 15.44 billion, an increase of Rp. 1,993 billion or 15% (fifteen percent) from 2018 which was recorded at Rp. 13.44 billion. The increase was due to a significant increase in management service fee and interest income in 2019.

The principal Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns. In 2019, IPF Management Service Fees increased by Rp934 million. In 2019, the IPF management service fee successfully acquired was Rp3.5 billion, an increase of 36% (thirty six percent) of revenues in 2018. While Interest Income increased by Rp1.059 billion or by 10% (ten percent) of interest income in 2018.

**Tabel 3.4 Pendapatan Per Akun / dalam rupiah**

» Table 3.4 Revenues Per Account / in Rupiah

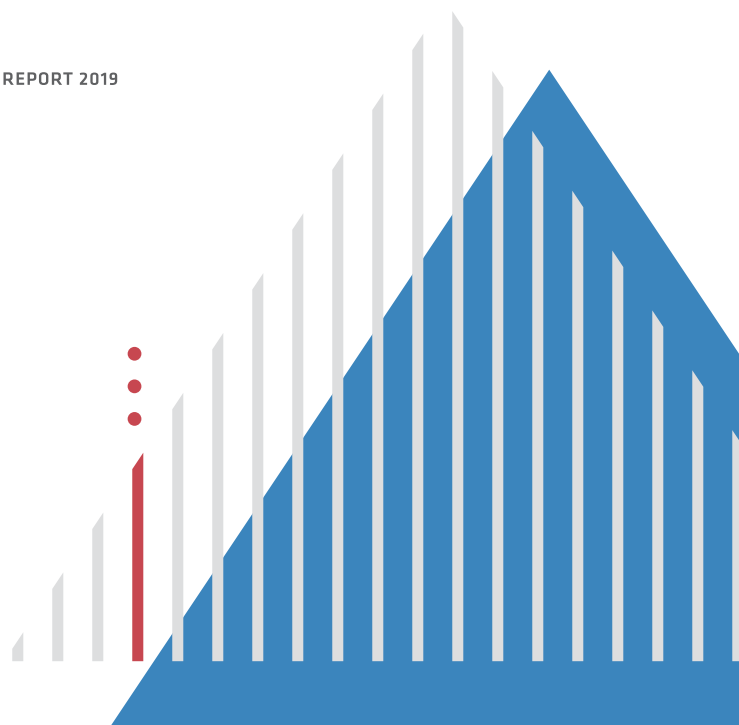
TAHUN. Year	2019	2018
PENDAPATAN USAHA. Operating Revenues		
Pendapatan jasa • Management Service Fees	3,504,066,704	2,569,818,043
Pendapatan bunga • Interest income	11,931,148,459	10,871,618,586
Jumlah Pendapatan • Total Revenues	15,435,215,163	13,441,436,629

Beban Usaha

» Operating Expenses

- ... Pada tahun 2019, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp13,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp357 juta atau 3% (tiga perseratus) dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13,06 miliar. Beban Usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah beban penyempurnaan dan sosialisasi sebesar 53% sesuai dengan rekomendasi survei tingkat pemahaman pada tahun 2018 mengenai perlunya peningkatan sosialisasi.

In 2019, the Company's Operating Expenses was recorded at Rp13.41 billion, an increase of Rp357 million or 3% (three percent) from 2018 which was recorded at Rp13.06 billion. The Operating Expenses that experienced the biggest increase were system development and socialization by 53% in accordance with the recommendations of the 2018 survey of level of consumer understanding of the need for increased socialization.

**Tabel 3.5 Beban Usaha Per Akun / dalam miliar rupiah**

» Table 3.5 Operating Expenses Per Account / in Rupiah

TAHUN. Year	2019	2018
BEBAN USAHA. Operating Expenses		
Gaji dan tunjangan ☛ Salary and benefit expenses	10,398,305,821	10,538,446,943
Beban administrasi ☛ Administrative expenses	1,197,631,390	1,090,847,984
Pengembangan sistem dan Sosialisasi ☛ System development and Socialization	1,133,975,986	742,301,118
Penyusutan ☛ Depreciation	250,023,185	263,990,917
Pendidikan dan pelatihan ☛ Education and training expenses	202,127,426	191,302,058
Beban konsultan ☛ Consultancy expenses	167,436,711	182,780,159
Lainnya ☛ Other expenses	64,470,926	46,836,043
Jumlah Beban Usaha ☛ Total Operating Expenses	13,413,971,445	13,056,505,222

Beban Gaji dan Tunjangan

» Salary and Benefit Expenses

- Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp10,40 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak penghasilan serta beban akrual atas apresiasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020. Beban gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 1% (satu perseratus) dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebesar Rp10,54 miliar.

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees. In 2019, the Company's Salary and Benefit Expenses were Rp10.40 billion. This amount included income tax, accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2019 that were paid in 2020. Salary and benefit expenses decreased by 1% (one percent) compared to 2018 which amounted to Rp10.54 billion.

Beban Administrasi

» Administrative Expenses

- Perseroan mencatatkan Beban Administrasi sebesar Rp1,20 miliar, meningkat 10% (sepuluh perseratus) atau Rp106,78 juta dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1,09 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan naiknya beban keperluan kantor dan beban telepon, internet, listrik serta utilitas lainnya.

The Company recorded Administrative Expenses at Rp1.20 billion, an increase of 10% (ten percent) or Rp106.78 million from 2018 which amounted at Rp1.09 billion. This increase was partly due to an increase in office expenses and telephone, internet, electricity and other utilities expenses.

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi

» System Development and Socialization

- Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 53% (lima puluh tiga perseratus) atau sebesar Rp391 juta. Perseroan semakin berfokus meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP kepada khalayak ramai sesuai dengan hasil rekomendasi survei pemahaman mengenai Perseroan pada tahun 2018.

System Development and Socialization Expenses increased in 2019 by 53% (fifty-three percent) or Rp391 million. The Company is increasingly focused on improving the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public in accordance with the recommendations of the company's awareness survey in 2018.

Penyusutan

» Depreciation

- Perseroan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp250 juta, menurun 5% (lima perseratus) atau Rp13,97 juta dari tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp264 juta. Hal ini dikarenakan banyak aktiva tetap Perseroan dengan nilai buku nol sehingga tidak terdepresiasi lagi.

The Company recorded Depreciation Expense of Rp250 million, a decrease of 5% (five percent) or Rp13.97 million from 2018 which was recorded at Rp264 million. This is due to many fixed assets of the Company having zero book values so that they are no longer being depreciated.

Pendidikan dan Pelatihan

» Education and Training Expenses

- Beban Pendidikan dan Pelatihan peningkatan sebesar 6% (enam perseratus). Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan karyawan maupun direksi, beban tersebut digunakan untuk direksi dan karyawan dalam inhouse training dan seminar/workshop serta melaksanakan sharing session.

Education and Training Expenses increased by 6% (six percent). In an effort to improve the employees' competency and capability, the expenses are used for directors and employees to conduct inhouse training and seminars / workshops as well as to conduct sharing sessions.



Beban Konsultan

» Consultancy Expenses

- Beban Konsultan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp15,34 juta atau 8% (delapan perseratus). Di tahun 2019, Perseroan menggunakan jasa notaris dan juga jasa konsultan audit keuangan untuk menunjang terselenggara kegiatan Perseroan.

Consultancy expenses decreased in 2019 by Rp15.34 million or 8% (eight percent). In 2019, the Company used notary services and financial audit consultant services to support the Company's activities.

Lainnya

» Other Expenses

- Beban Lainnya Perseroan tercatat sebesar Rp64,47 juta atau meningkat sebesar 38% (tiga puluh delapan perseratus) dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar Rp46,84 juta.

The Company's other expenses were recorded at Rp64.47 million or an increase of 38% (thirty eight percent) compared to 2018 which amounted to Rp46.84 million.

Kas dan Setara Kas

\\ Cash and Cash Equivalent

- Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2019 sebesar Rp5,614 miliar atau meningkat sebesar Rp4,54 miliar atau 421% (empat ratus dua puluh satu perseratus) dari tahun 2018 sebesar Rp1,078 miliar.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas operasi menurun sebesar Rp2,14 miliar atau sebesar 167% (seratus enam puluh tujuh perseratus) dibandingkan tahun 2018. Penurunan pada arus kas untuk aktivitas operasi disebabkan oleh peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direksi dan karyawan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Untuk aktivitas investasi, kas yang didapatkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp16,38 miliar hal ini dikarenakan terdapat pencairan aset keuangan sebesar Rp5,7 miliar. Berdasarkan penjelasan diatas maka pada tahun 2019 terdapat kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp14,23 miliar atau sebesar 147% (seratus empat puluh tujuh perseratus) dibandingkan dengan tahun 2018.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2019 amounted to Rp5,614 billion, an increase of Rp4.54 billion or 421% (four hundred twenty one percent) of 2018 which amounted to Rp1.078 billion.

In 2019, cash flow from operating activities decreased by Rp2.14 billion or by 167% (one hundred sixty seven percent) compared to 2018. The decrease in cash flow for operating activities was due to an increase in salary and benefit expenses to Directors and employees in the year 2019 compared to 2018. For investment activities, cash received in 2019 increased by Rp16.38 billion, this was due to the disbursement of financial assets of Rp5.7 billion. Based on the explanation above, in 2019 there was a net increase in cash and cash equivalents of Rp14.23 billion or 147% (one hundred forty-seven percent) compared to 2018.



Tabel 3.6 Arus Kas Bersih / dalam rupiah

» Table 3.6 Net Cash Flow / in Rupiah

TAHUN. Year	2019	2018
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi ☛ Cash flows from operating activities	(861,026,620)	1,282,002,557
Arus kas untuk aktivitas investasi ☛ Cash flows from investment activities	5,396,985,317	(10,978,854,021)
Arus kas dari aktivitas pendanaan ☛ Cash flows from funding activities	-	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas ☛ Net increase (decrease) of cash and cash equivalent	4,535,985,317	(9,696,851,464)
Kas dan setara kas awal tahun ☛ Cash and cash equivalent at beginning of year	1,078,475,075	10,775,326,539
Kas dan setara kas akhir tahun ☛ Cash and cash equivalent at ending of year	5,614,433,772	1,078,475,075

Posisi Keuangan

Financial Position

TAHUN. Year	2019	2018
ASET. Assets		
Kas dan setara kas ● Cash and cash equivalent	5,614,433,772	1,078,475,075
Piutang usaha ● Account receivable	3,504,066,704	2,569,818,043
Piutang lain-lain ● Other receivable	2,009,411,588	1,901,849,951
Biaya dibayar dimuka ● Prepaid expenses	1,213,921,625	303,668,625
Aset keuangan lainnya ● Other financial assets	35,767,250,000	39,344,900,000
Uang muka dan Jaminan ● Deposit and guarantees	34,950,000	34,950,000
Jumlah Aset Lancar → Total Current Assets	48,144,033,689	45,233,661,694
Cadangan ganti rugi pemodal ● Investor Compensation Reserve (CGRP)	157,169,300,000	146,869,995,000
Aset tetap ● Fixed assets	688,818,483	635,826,985
Aset pajak tangguhan ● Deferred tax assets	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar → Total Non Current Assets	157,858,118,483	147,505,821,985
Jumlah Aset → Total Assets	206,002,152,172	92,739,483,679
LIABILITAS. Liabilities		
Utang pajak ● Tax payable	103,883,653	214,521,682
Utang lain-lain ● Other liabilities	9,062,969	51,445,515
Beban akrual ● Accrued expenses	1,389,053,850	2,316,241,825
Utang Kepada Pihak Berelasi ● Debt to Related Parties	2,979,155	2,979,155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek → Total Short Term Liabilities	1,504,979,626	2,585,188,177
Utang Kepada Pihak Berelasi ● Debt to Related Parties	150,000,000,000	150,000,000,000
Cadangan imbalan kerja ● Employment Benefit Reserve	64,291,968	17,915,946
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang → Total Long Term Liabilities	150,064,291,968	150,017,915,946
EKUITAS. Equity		
Modal saham ● Paid-up Capital	60,000,000,000	60,000,000,000
Laba Ditahan (Defisit) ● Retained Earnings (Deficit)	-5,567,119,422	-19,863,620,444
Jumlah Ekuitas → Total Equity	54,432,880,578	40,136,379,556
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas → Total Liabilities and Equity	206,002,152,172	92,739,483,679

- Pada tahun 2019 terdapat peningkatan aset lancar Perseroan sebesar Rp2,9 miliar atau sebesar 6% (enam perseratus) dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga total aset lancar pada tahun 2019 menjadi Rp48,14 miliar. Sedangkan aset tidak lancar pada tahun 2019 adalah Rp157,86 miliar atau terjadi kenaikan sebesar 7% (tujuh perseratus).

Selanjutnya kewajiban jangka pendek pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1,08 miliar atau sebesar 42% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini didorong dengan penurunan utang pajak, utang lain-lain, maupun beban akrual pada tahun 2019. Sedangkan kewajiban jangka panjang pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp46,38 juta dibandingkan dengan tahun 2018.

Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp54,43 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp14,30 miliar atau 36% (tiga puluh enam perseratus). Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada laba komprehensif di tahun 2019 sebesar Rp22,26 miliar atau 280% dibandingkan tahun 2018.

In 2019 there was an increase in the Company's current assets of Rp2.9 billion or 6% (six percent) compared to 2018, bringing total current assets in 2019 to Rp48.14 billion. While non-current assets in 2019 were Rp157.86 billion or an increase of 7% (seven percent).

Furthermore, short-term liabilities in 2019 decreased by Rp1.08 billion or 42% compared to 2018. This was driven by a decrease in tax debt, other debt, and accrual expenses in 2019. Meanwhile, long-term liabilities in 2019 increased by Rp46.38 million compared to 2018.

The Company noted total equity in 2018 amounting to Rp40.14 billion or decreased by Rp7.96 billion or 66.85% (two hundred and ninety point thirty-seven per cent). There is an increase in other comprehensive losses of Rp11.72 billion or 325.61% (three hundred twenty five point sixty one percent) in 2018 compared to 2017.

The Company recorded total equity in 2019 of Rp54.43 billion or an increase of Rp14.30 billion or 36% (thirty six percent). This was caused by an increase in comprehensive profit in 2019 of Rp22.26 billion or 280% compared to 2018.

Pengembangan Perusahaan

Corporate Development

Belanja Modal

Capital Expenditure

- Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk edukasi, eksternalisasi dan sosialisasi.

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)

SIPAS adalah sebuah sistem pengelolaan dan pengarsipan dokumen perusahaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan administrasi dokumen di lingkungan Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam mengatasi masalah penomoran surat dan disposisi surat yang seringkali tidak berjalan dengan baik.

Integrated Data Service Tahap 2

Ini adalah proyek pengembangan dari Integrated Data Service Tahap 1 yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2018. Integrated Data Service merupakan sebuah sistem yang memungkinkan penyimpanan dan pertukaran data dan informasi dilakukan secara terpusat. Tujuan dari proyek ini adalah menyempurnakan dan mengatasi masalah pada sistem Integrated Data Service existing sehingga dapat membantu kinerja Perusahaan menjadi lebih baik.

Talenta

adalah sebuah *human resources information system* (HRIS) yang merupakan sistem informasi atau aplikasi yang memuat informasi terkait Human Resources pada perusahaan yang digunakan oleh unit SDM & Umum dalam menunjang kegiatan operasional. HRIS tersebut mencakup seluruh aspek kepegawaian dan diharapkan dapat mengolah data rekrutmen, kepegawaian, penggajian, hingga penilaian kinerja karyawan.

Pengeluaran belanja modal juga dialokasikan untuk menyediakan infrastruktur dan perlengkapan perkantoran yang krusial untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti peremajaan kursi kerja bagi Direksi dan Karyawan dan penambahan lemari penyimpanan untuk dokumen.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still a major priority in capital expenditure especially for education, externalization and socialization.

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)

SIPAS is an internal system that is designed to assist in managing and archiving company documents. It is expected that the administration of documents in the company would become more effective and efficient with the use of this system, especially in overcoming the problems of letter numeration and disposition processes that are often hindered with errors.

Integrated Data Service Tahap 2

Integrated Data Service Phase 2 is a development project sprung from the execution of Integrated Data Service Phase 1 that had been carried out in 2018. Integrated Data Service is a system that enables centralized data and information storage and exchange. The goal of this project is to further perfect and overcome problems found in the existing system of Integrated Data Service, therefore enabling the company to improve its performance.

Talenta

Talenta is a Human Resource Information System (HRIS) which is designed to contain human resources-related information that would be used by Human Resources & General Affairs Unit in supporting operational activities. The HRIS would encompass entire aspects of employment, and be expected to be able to process recruitment, employment, payroll, and performance evaluation data.

Further capital expenditure is allocated towards procurement of office infrastructures and supplies deemed essential for the company's daily activities, such as rejuvenation of office chairs for Directors and employees, and purchase of additional document storage cabinets.





Tata Kelola **4** Perusahaan

Capaian Penilaian Penerapan GCG

Achievements of GCG Assessment

... Pada tahun 2019, Perusahaan melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Evaluasi dilakukan dengan membagi keseluruhan praktik GCG perusahaan ke dalam beberapa aspek pengujian, yaitu Komitmen terhadap Pelaksanaan GCG, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa dalam kelima aspek selain Aspek Lainnya, Perusahaan memperoleh skor akhir Baik dengan skor sebesar 76,83 persen. Penambahan Aspek Lainnya dalam akumulasi penghitungan aspek pengujian GCG membuat skor perusahaan sedikit turun menjadi 69,07 persen atau menyandang predikat Cukup Baik. Namun, hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak adanya bagian yang bisa dievaluasi dari Aspek Lainnya, sehingga berdampak pada penurunan predikat implementasi GCG Perusahaan. Meskipun demikian, klasifikasi kualitas penerapan GCG perusahaan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik.

In the year 2019, the company has conducted internal evaluation on Good Corporate Governance (GCG) implementation. The evaluation was executed by dividing the entire GCG practice into several examination aspects, such as Commitment towards GCG Implementation, Shareholders and General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects. Results from the internal evaluation process showed that in all five aspects of examination (not including Other Aspects), the company had scored 76,83 percent, or classified as Good. The addition of Other Aspects in the calculation of GCG examination aspects would cause the company's score to decline slightly to 69,07 percent, or classified as Fair. However, this decline could be justified considering there was no evaluable Other Aspect, therefore impacting the score and classification of corporate GCG implementation aspects when Other Aspect was taken into account of the GCG implementation process calculation. Nevertheless, the classification of corporate GCG implementation quality could be considered as decently executed.

69,45 %
Komitmen terhadap Pelaksanaan GCG
 Commitment towards GCG Implementation «



94,62 %
Pemegang Saham & RUPS
 Shareholders & General Meeting of Shareholders «



60,88 %
Dewan Komisaris
 Board of Commissioners «



78,24 %
Direksi
 Directors «



80,98 %
Pengungkapan Informasi & Transparansi
 Information Disclosure & Transparency «



0,00 %
Aspek Lainnya
 Other Aspects «



Ikhtisar Aktivitas GCG Tahun 2019

\\ Highlights of GCG Activities in 2019

- 1. Penilaian Hasil Evaluasi terhadap Tata Kelola Perusahaan
 - 2. Evaluasi dan Revisi Peraturan Perusahaan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - 4. Revisi Prosedur Operasional Perusahaan
- 1. Corporate Governance Evaluation Scoring
 - 2. Evaluation and Revision of Corporate Regulation
 - 3. Corporate Social Responsibility Activity Execution
 - 4. Corporate Operational Procedure Revision



GCG Milestones 2014-2019

GCG Milestones 2014-2019

2014

- Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Ratification process of Good Corporate Governance Guideline

Adanya pembaruan landasan hukum dari Peraturan Bapepam VI.A.5 menjadi Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Update of Corporate legal basis, which brought about shift from Peraturan Bapepam VI.A.5 into Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016

2016

2017

- Pembaruan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Update process of Good Corporate Governance Guideline

Inisiasi pelaksanaan program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembuatan taman bacaan/perpustakaan yang berfokus pada pengembangan komunitas

Initiation process of CSR program, which takes the shape of library construction with main focus oriented towards community development programs

2019

Tahapan Implementasi GCG

Stage of GCG Implementation

... Penerapan GCG oleh P3IEI dimulai sejak tahun 2014. Langkah pertama yang dilaksanakan dalam upaya penerapan GCG adalah pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah tersebut bertujuan agar Perusahaan memiliki sebuah panduan pelaksanaan yang formal dan keberadaannya disepakati oleh seluruh jajaran terkait guna menunjang penerapan GCG. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut telah mengalami pembaruan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian antara Pedoman tersebut dengan kebutuhan organisasi. Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik *Corporate Governance* yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Selanjutnya, pedoman tersebut diimplementasikan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketetapan dan panduan operasional Perusahaan. Seluruh tahapan implementasi praktik GCG tersebut merupakan salah satu langkah yang krusial bagi Perusahaan guna mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, sehingga Perusahaan mampu mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan praktik GCG juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Manajemen.

GCG Implementation has been carried out by SIPF since 2014. The first step executed in regards to GCG Implementation is the ratification of the Good Corporate Governance Guideline. The objective of this step was to ensure that the company would have a formal implementation guideline, the existence of which also agreed upon by related parties, in order to support and enable the implementation of GCG. The Good Corporate Governance Guideline has undergone an update in 2017, with the objective to increase the suitability between the Guideline and organizational needs. The Guideline was constructed in accordance with Financial Services Authority Regulation or Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - OJK (formerly known as Bapepam-LK, Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution) as well as Corporate Governance Practice commonly exercised in the Capital Market Industry. Afterwards, the Guideline was to be implemented and broken down into details in the forms of corporate operational resolutions and guidelines. The entire GCG practice implementation was one of the crucial steps taken by the company in order to further the agenda of professional management of the company, therefore enabling it to achieve an effective, efficient, and sustainable level of performance. In addition, the implementation of GCG practice is also expected to produce positive contribution in the planning and decision-making processes that are carried out by the Management.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Purpose of Good Corporate Governance Implementation

- Guna menjalankan perannya sebagai PDPP, Perusahaan perlu menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan praktik GCG bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang. Atas dasar pentingnya pelaksanaan praktik GCG dalam jangka panjang, Perusahaan telah memulai penerapan GCG sejak tahun 2014 dengan mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati oleh seluruh jajaran terkait. Perusahaan juga melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap Pedoman tersebut pada tahun 2017 demi menyesuaikan relevansi Pedoman tersebut terhadap kebutuhan organisasi.

In order to perform its role as Investor Protection Fund Institution, the company has to implement Good Corporate Governance Practice. GCG Practice implementation is aimed to optimize the company's long-run value for its stakeholders. On the basis of long-run GCG implementation practice, the company has initiated GCG practice implementation since 2014 by ratifying Corporate GCG Guideline as a formal and agreed upon direction of GCG implementation. The company has also conducted adjustment and refurbishment of said Guideline in 2017, in order to improve the suitability of the Guideline's relevance towards the organization's specific needs.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Structure

- Dalam penerapan GCG Perseroan membagi organisasi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung.
Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, serta Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

1. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

» Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

- RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

In implementing GCG, the Company divides the organization into 2 (two) important parts, namely the Main Organs and Supporting Organs.

Supporting organs are parties who support the Main Organs in carrying out their duties and authorities, especially related to the implementation of GCG. Supporting organs in corporate governance consist of the Audit Committee which is tasked with assisting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Claims Committee and the Investment Committee, the Corporate Secretary, and the Internal and Compliance Oversight whose task is to assist the duties and responsibilities of the Company's Directors.

1. Corporate Governance Mechanism

» General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a means for shareholders to make decisions in accordance with the agenda of the GMS, the provisions of the Articles of Association, and legislation.

GMS in the Company consists of:

- Annual GMS, which is a GMS that must be held every year, within a period of no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.
- Other GMS, also known as Extraordinary GMS (RUPS-LB), is a GMS that is held at any time based on need.

The GMS can be held at the request of 1 (one) shareholder or better alone or jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights and / or the Board of Commissioners.



Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.
- vi. Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

2. Pelaksanaan RUPS 2019

» RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 21 Juni 2019. RUPS Tahunan ini diwakili oleh 60.000 (enam puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Periode masa jabatan 2019-2022.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode masa jabatan 2019-2022; dan
5. Pemberian Jasa Pengabdian kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 2016-2019.

» RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)

P3IEI menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 14 November 2019. RUPS-LB ini diwakili oleh 60.000 (enam puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan catatan-catatan sebagaimana disampaikan oleh pemegang saham dalam Rapat untuk dimohonkan Persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2020 (jika ada), yang telah disetujui oleh Rapat atas permintaan dan atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

In the Annual General Meeting of Shareholders, the following matters are carried out:

- i. The Board of Directors submits an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners to obtain GMS approval. Financial statements that consist of at least the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year concerned to get the RUPS approval.
- ii. Determination of the use of net profit, if the Company has a positive profit balance by taking into account OJK regulations.
- iii. Appointment, dismissal and / or alteration of the composition of the Directors and / or members of the Board of Commissioners.
- iv. Determination of salary / honorarium and facilities for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.
- v. Appointment of a Public Accountant office that will audit the Company's books.
- vi. In the RUPS-LB it is not authorized to discuss and decide on the agenda of the meeting referred to in numbers 1 and 2

2. Implementation of the 2019 GMS

» Annual GMS

P3IEI held an Annual GMS on June 21, 2019. This Annual GMS was represented by 60,000 (sixty thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company.

The meeting is held with the Meeting agenda as follows:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018.
2. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's books for Fiscal Year 2019.
3. Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners and Directors for a term of 2019-2022.
4. Determination of the amount of salary and / or allowances for Members of the Board of Commissioners and Directors for the term of office 2019-2022; and
5. Providing Dedicated Services to the Board of Commissioners and Directors of the Company 2016-2019.

» Extraordinary GMS (RUPS-LB)

P3IEI convenes the RUPS-LB on November 14, 2019. The RUPS-LB is represented by 60,000 (sixty thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company. The unanimous deliberation to reach consensus decided to agree on the following matters:

1. Approved the Company's Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2020, with notes as submitted by the shareholders at the Meeting to be requested for approval from the Financial Services Authority.
2. To authorize the Company's Directors by first obtaining approval from the Board of Commissioners to revise the Work Plan and Annual Budget for Fiscal Year 2020 (if any), which has been approved by the Meeting upon request and or with the approval of the Financial Services Authority.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Tata Kelola

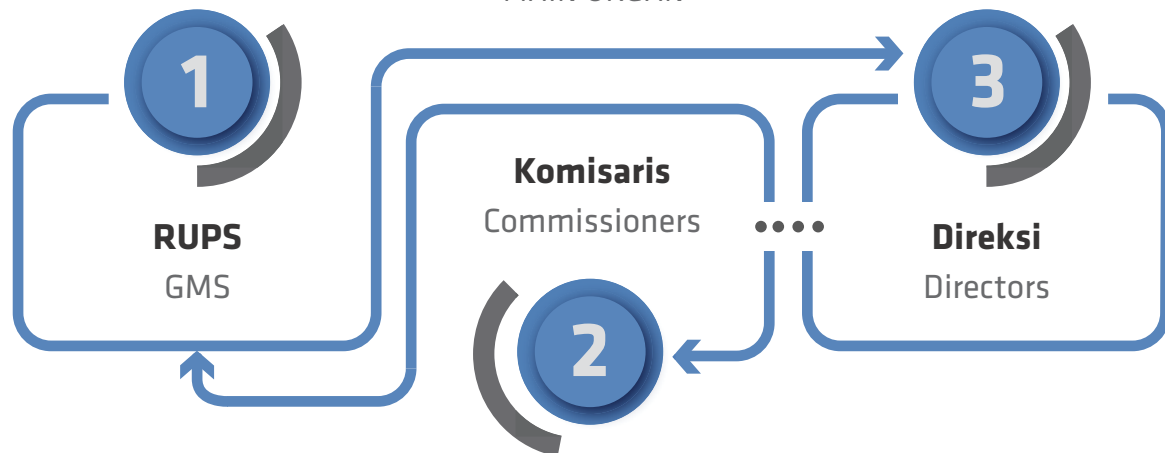
» Scheme 4.1 Organizational Structure of Governance

PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE (CG)

PRINCIPLE OF CORPORATE GOVERNANCE

Transparansi
Transparency**Akuntabilitas**
Accountability**Responsibilitas**
Responsibility**Independen**
Independent**Kewajaran**
Fairness**ORGAN UTAMA**

MAIN ORGAN

**ORGAN PENDUKUNG**

SUPPORTING ORGAN

Komite Audit Audit Committee	Komite Klaim Claims Committee	Satuan Pengawasan Internal Internal Control Audit
Komite Investasi Investment Committee	Satuan Kepatuhan Compliance Unit	Auditor Independen Independent Auditor

PEDOMAN & LAPORAN

GUIDELINES & REPORTS

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	Pedoman Etika & Perilaku Ethical & Behavioral Guidelines	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter
Piagam Pengawasan Internal Internal Control Charter	Piagam Direksi Board of Directors Charter	Peraturan Perusahaan Company Regulations	Piagam Manajemen Risiko Risk Management Charter
Laporan Tahunan Annual Report	Kebijakan & SOP Policy & Standart Operating	Laporan Hasil Penilaian CG Corporate Governance Assesment Report	Kebijakan Investasi Investment Policy

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate
Governance Policy

- ... Terkait dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan memiliki beberapa peraturan dan kebijakan formal yang menjadi landasan operasional tata kelola tersebut. Selain Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan juga memiliki Pedoman Etika dan Perilaku serta Panduan Penerapan Manajemen Risiko untuk mengelola perusahaan secara strategik. Perusahaan juga memiliki Peraturan Perusahaan yang menjadi pedoman formal karyawan dalam bersikap dan berperilaku, terutama terkait dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

In relation to GCG Implementation, the Company possesses several regulations and formal policies that serve the function of being the foundation of the governance process. Aside from GCG Guideline, the Company is also equipped with Ethical and Behavioral Guideline and Risk Management Implementation Guideline as tools to manage the Company from a strategic perspective. The Company also possesses Corporate Regulation that serves as the employees' formal guidelines of proper action and behaviour, especially in relation to the jobs that are considered as their areas of responsibility.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- ... Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- » 1 (satu) orang atau lebih Komisaris;

Susunan Dewan Komisaris P3IEI adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners is a corporate organ that possesses the task and responsibility to conduct supervision of the Directors' task and responsibility implementation along with execution authority in regards to the management function of the company, without the need to involve in the decision-making process of the company's operational activities. The Board of Commissioners also ensure that the company has carried out the principles of Good Corporate Governance in its activities across organizational levels.

The appointment and/or replacement of a Board of Commissioners member is done by the General Meeting of Shareholders after the candidate has passed eligibility and propriety tests conducted by Financial Services Authority. The Board of Commissioners has a number of members and composition that was designed as such to be able to execute effective objective, and independent supervisory function, that is devoid of conflict of interest that could hinder its ability to execute its task and responsibilities.

The initial requirement list of members of the Board of Commissioners should contain:

- » 1 (one) person or more of President Commissioner
- » 1 (one) person or more Commissioner

The current members of the Board of Commissioners of SIPP is as follows:

Nama Jabatan. Position Name	Masa Jabatan. Length of Service	
	2016-2019 (hingga 21-6-2019) (up to 6-21-2019)	2019-2022 (mulai 21-6-2019) (starting 6-21-2019)
Komisaris Utama » President Commissioner	Bacelius Ruru	Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris » Commissioner	Hari Purwantono	Roni Gunardi

Direksi

Board of Directors

••• Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Direksi juga bertugas menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Ke patutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa atau komite yang dibentuk oleh OJK. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Uji Kelayakan dan Ke patutan calon anggota Direksi Perusahaan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Adapun jumlah dan komposisi Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Direktur Utama
- » 1 (satu) orang atau lebih Direktur

Susunan Direksi P3IEI adalah sebagai berikut:

Directors are corporate organs that are tasked with leading and managing the Company according to the vision, mission, and objectives that have been set and within boundaries of authority determined through the Law and Articles of Association. Furthermore, Directors are given the task of socializing and implementing GCG principles throughout every operational and business activity and across organizational structures.

Nomination, Appointment, Dismissal, and Reshuffle of members of the Directors are done through General Meetings of Shareholders. Every member of the Directors that has been appointed through General Meetings of Shareholders are firstly obliged to take part in Fit and Proper Test conducted by Services Authority or committee formed by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Fit and Proper Test of candidate for Directors are conducted by several mechanisms, such as administrative inquiry, interview, and/or presentation requirement that encapsulates but not limited to the strategic development plan of the Investor Protection Fund.

As for the number and composition of members of Directors, the bare minimum statute is as follows:

- » 1 (one) President Director
- » 1 (one) or more Director(s)

The current Directors of SIPF are as follows:

Nama Jabatan. Position Name	Masa Jabatan. Length of Service	
	2016-2019 (hingga 21-6-2019) (up to 6-21-2019)	2019-2022 (mulai 21-6-2019) (starting 6-21-2019)
Direktur Utama » President Director	Ignatius Girendroheru	Ignatius Girendroheru
Direktur » Director	Widodo	Widodo

Hubungan Dewan Komisaris & Direksi

The Board of Commissioners & The Board Of Directors

... Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat mencakup tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
2. Dewan Komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi
4. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi
5. Dewan komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi

The relationship between Board of Commissioners and Directors may encompass but not limited to these following aspects:

1. The Board of Commissioners possess the authority to give approval and assistance to the Directors in executing a particular legal action.
2. The Board of Commissioners has the right to retain information regarding every course of action executed by the Directors
3. The Board of Commissioners has the right to receive explanation regarding every question addressed to the Directors
4. The Board of Commissioners has the right to dismiss member(s) of the Directors
5. The Board of Commissioners is obliged to conduct a General Meeting of Shareholders that would decide if a member of the Directors would be permanently dismissed or restored to his/her original standing, in 30 (thirty) days since the date of temporary dismissal of said member of the Directors

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, & Rapat Direksi

Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, & The Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris

\ Board of Commissioners Meeting

... Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama pula dengan Direksi, berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

In order to carry out its supervisory duties, the P3IEI Board of Commissioners regularly holds joint meetings with the Directors, in the form of a meeting of the members of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association set forth in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 14.

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

28 Januari 2019 » January 28, 2019	Bacelius Ruru – Komisaris Utama » President Commissioner Hari Purwantono – Komisaris » Commissioner Ignatius Girendroheru – Direktur Utama » President Director Widodo – Direktur » Director	- Indonesia SIPF Statistical Highlights Indonesia SIPF Statistical Highlights - Fungsi Investasi P3IEI P3IEI Investment Function - Fungsi Manajemen Risiko P3IEI P3IEI Risk Management Function - Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI P3IEI Recording and Bookkeeping Function - Progress Report kegiatan Bulan Desember 2018 Progress Report for December 2018 activities - Project I-SIPF 2018 Project I-SIPF 2018
19 Februari 2019 » February 19, 2019	Bacelius Ruru – Komisaris Utama » President Commissioner Hari Purwantono – Komisaris » Commissioner Ignatius Girendroheru – Direktur Utama » President Director Widodo – Direktur » Director	- Indonesia SIPF Statistical Highlights Indonesia SIPF Statistical Highlights - Fungsi Investasi P3IEI P3IEI Investment Function - Fungsi Manajemen Risiko P3IEI P3IEI Risk Management Function - Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI P3IEI Recording and Bookkeeping Function - Progress Report kegiatan Bulan Januari 2019 Progress Report for January 2019 activities - Project I-SIPF 2019 Project I-SIPF 2019
19 Maret 2019 » March 19, 2019	Bacelius Ruru – Komisaris Utama » President Commissioner Hari Purwantono – Komisaris » Commissioner Ignatius Girendroheru – Direktur Utama » President Director Widodo – Direktur » Director	- Indonesia SIPF Statistical Highlights Indonesia SIPF Statistical Highlights - Fungsi Investasi P3IEI P3IEI Investment Function - Fungsi Manajemen Risiko P3IEI P3IEI Risk Management Function - Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI P3IEI Recording and Bookkeeping Function - Progress Report kegiatan Bulan Februari 2019 Progress Report for February 2019 activities - Project I-SIPF 2019 Project I-SIPF 2019
16 April 2019 » April 16, 2019	Bacelius Ruru – Komisaris Utama » President Commissioner Hari Purwantono – Komisaris » Commissioner Ignatius Girendroheru – Direktur Utama » President Director Widodo – Direktur » Director	- Indonesia SIPF Statistical Highlights Indonesia SIPF Statistical Highlights - Fungsi Investasi P3IEI P3IEI Investment Function - Fungsi Manajemen Risiko P3IEI P3IEI Risk Management Function - Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI P3IEI Recording and Bookkeeping Function - Progress Report kegiatan Bulan Maret 2019 Progress Report for March 2019 activities - Project I-SIPF 2019 Project I-SIPF 2019
14 May 2019 » May 14, 2019	Bacelius Ruru – Komisaris Utama » President Commissioner Hari Purwantono – Komisaris » Commissioner Ignatius Girendroheru – Direktur Utama » President Director Widodo – Direktur » Director	- Indonesia SIPF Statistical Highlights Indonesia SIPF Statistical Highlights - Fungsi Investasi P3IEI P3IEI Investment Function - Fungsi Manajemen Risiko P3IEI P3IEI Risk Management Function - Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI P3IEI Recording and Bookkeeping Function - Progress Report kegiatan Bulan April 2019 Progress Report for April 2019 activities - Project I-SIPF 2019 Project I-SIPF 2019

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

18 Juni 2019

» June 18, 2019

Bacelius Ruru – Komisaris Utama

» President Commissioner

Hari Purwantono – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

❖ **Indonesia SIPF Statistical Highlights**

Indonesia SIPF Statistical Highlights

❖ **Fungsi Investasi P3IEI**

P3IEI Investment Function

❖ **Fungsi Manajemen Risiko P3IEI**

P3IEI Risk Management Function

❖ **Fungsi Pencatatan dan Pembukuan P3IEI**

P3IEI Recording and Bookkeeping Function

❖ **Progress Report kegiatan Bulan Mei 2019**

Progress Report for May 2019 activities

❖ **Project I-SIPF 2019**

Project I-SIPF 2019

❖ **Persiapan RUPS Tahunan 2019**

Preparation for the 2019 Annual GMS

11 Juli 2019

» July 11, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Mariska Aritany Azis

– Sekretaris Dewan Komisaris

» President Director

❖ **Penetapan Jadwal Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi periode Juli 2019**

Determination of the Board of Commissioners Meeting Schedule by inviting the Directors for the July 2019 period

❖ **Penetapan Jadwal Induction Program bagi Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi**

Determination of the Induction Program Schedule for the Board of Commissioners in coordination with the Board of Directors

❖ **Penyampaian Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2019 dengan kondisi Dewan Komisaris dan Direksi periode 2019-2022**

Submission of Projected 2019 Company Financial Statements with the conditions of the Board of Commissioners and Directors for the period 2019-2022

13 Agustus 2019

» August 13, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

❖ **Pelaksanaan induction program**

Implementation of induction program

❖ **Penyusunan Konsep project simulasi klaim**

Drafting of the claim simulation project concept

❖ **Persiapan materi pertemuan dengan SRO dan OJK pada September 2019**

Preparation for meeting material with the SRO and OJK in September 2019

❖ **Penyampaian hasil evaluasi Komisaris sebelumnya**

Submission of the results of the previous Commissioners' evaluations

❖ **Pengawasan pencapaian KPI Perusahaan oleh Manajemen**

Monitoring the achievement of the Company's KPI by Management

19 September 2019

» September 19, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

❖ **Penyusunan Kajian Program Strategis Indonesia SIPF**

Preparation of the SIPF Indonesia Strategic Program Study

❖ **Penyusunan Kajian mengenai Rencana Konversi CGRP dan Solusi Lainnya dalam menghadapi Dampak Penerapan PSAK 55**

Preparation of Study on CGRP Conversion Plans and Other Solutions in Facing the Impact of the Application of PSAK 55

❖ **MOU pertukaran data rutin dengan KSEI**

MOU of routine data exchange with KSEI

❖ **Konfirmasi status pencatatan pembukuan dari anggota DPP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran hingga akhir tahun buku berakhir**

Confirmation of bookkeeping status of DPP members who do not meet the obligation to pay contributions until the end of the financial year ends

❖ **Tindak lanjut rapat koordinasi dengan SRO untuk penetapan KPI unggulan dan pengukuran revenue per karyawan.**

Follow up on a coordination meeting with the SRO for the determination of leading KPIs and measuring revenue per employee.

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

15 Oktober 2019

» Oktober 15, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

- ✎ **Penyusunan Kajian Program Strategis Indonesia SIPF yang diprioritaskan (yang telah dijadwalkan untuk Triwulan IV 2019)**
Priority preparation of the SIPF Indonesia Strategic Program Review (which has been scheduled for Quarter IV 2019)
- ✎ **Pembahasan materi RKAT 2020 dengan Dekom**
Discussion of the RKAT 2020 material with the Dekom
- ✎ **Follow up penyusunan perjanjian data dengan KSEI**
Follow up on the preparation of the data agreement with KSEI
- ✎ **Konfirmasi terkait konsekuensi konversi CGRP dari utang menjadi modal**
Confirmation related to the consequences of CGRP conversion from debt to capital

8 November 2019

» November 8, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

- ✎ **Revisi materi dan bahan presentasi RKAT 2020**
Revised material and presentation materials for RKAT 2020
- Penyusunan surat tertulis terkait implikasi dari implementasi PSAK 55 dan kajian tertulis terkait konversi CGRP menjadi modal**
Compilation of written letters related to the implications of the implementation of PSAK 55 and a written study related to the conversion of CGRP into capital
- ✎ **Penyelesaian konsep simulasi penanganan klaim**
Completion of the concept of handling claims simulations

17 Desember 2019

» Desember 17, 2019

Dewi Arum P. – Komisaris Utama

» President Commissioner

Roni Gunardi – Komisaris

» Commissioner

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

- ✎ **Definisi nilai risiko pada Anggota DPP**
Definition of the value of risk to IPP Members
- ✎ **Legal binding untuk Anggota DPP**
Legal binding for IPP Members
- ✎ **Kajian Konversi CGRP**
CGRP Conversion Study
- ✎ **Kajian Safekeeping Fee KSEI**
KSEI Safekeeping Fee Study

Rapat Direksi

Meeting of The Board of Directors

- Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13.

In order to carry out their duties, the P3IEI Board of Directors regularly holds meetings in the form of a Board of Directors Meeting based on the Company's Articles of Association set forth in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 13.

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

19 Januari 2019
» January 19, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- ➊ Pembahasan hasil evaluasi GCG
Discussion of GCG evaluation results
- ➋ Pemasangan TVC pada IDX Channel
TVC installation on IDX Channel
- ➌ Pengadaan desain untuk stiker keanggotaan 2019 & buletin baru
Procurement of designs for the 2019 membership sticker and new bulletin
- ➍ Pengiriman stiker keanggotaan 2019
Sending 2019 membership stickers
- ➎ Pengiriman surat kepada OJK terkait courtesy meeting
Sending letters to OJK regarding courtesy meetings
- ➏ Finalisasi Website English Version dan Portal Pemodal
Finalization of the English Version Website and the Investor Portal
- ➐ Interview oleh Tim Dosen UNPAD dalam rangka penyusunan buku terkait perlindungan pemodal
Interview by UNPAD Lecturer Team in compiling books related to investor protection
- ➑ Acara rapat Koordinasi dengan Pemegang Saham
Coordination Meeting with Shareholders

18 Februari 2019
» February 18, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- ➊ Mempersiapkan desain stiker keanggotaan
Prepare a membership sticker design
- ➋ Mempersiapkan materi terkait Rapat Koordinasi dengan OJK, SRO, & Anak Perusahaan SRO
Prepare material related to Coordination Meetings with OJK, SRO, & SRO Subsidiaries
- ➌ Mengaitkan materi presentasi rapat koordinasi dengan rencana anak usaha lain terkait Perusahaan Efek Daerah
Link the presentation material of the coordination meeting with the plans of other subsidiaries related to Regional Securities Companies
- ➍ Memfinalisasikan Legal Opinion dengan konsultan hukum
Finalize Legal Opinion with a legal consultant

26 Februari 2019
» February 26, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- ➊ Menyiapkan materi untuk rapat dengan Bu Rina
Prepare material for meetings with Mrs. Rina
- ➋ Menyiapkan timeline pengajuan Direksi & Dewan Komisaris baru
Prepare a timeline for submission of new Directors & Commissioners
- ➌ Menyiapkan training untuk karyawan
Prepare training for employees
- ➍ Memfinalisasi KPI karyawan
Finalize employee KPIs
- ➎ Membuat stiker keanggotaan
Make a membership sticker

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

15 April 2019

» April 15, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

Ririh Asih Priyahita**Mariska Aritany Azis**

- **Agar dilihat dan dikaji lagi kemungkinan terkait peran Indonesia SIPF sebagai pengelola Disgorgement Fund**
To be seen and reviewed again possibly related to the role of Indonesia SIPF as manager of the Disgorgement Fund
- **Pembuatan summary dan log hasil konsultasi pemodal**
Making a summary and log of the results of the investor consultants
- **Mempersiapkan keikutsertaan Capital Market Summit & Expo 2019 di Surabaya**
Prepare for the participation of the 2019 Capital Market Summit & Expo in Surabaya
- **Laporan Anak Usaha disesuaikan dengan arahan baru dari Divisi Management Anak Usaha BEI**
Reports of Subsidiaries are adjusted to new directions from the IDX Subsidiary Management Division
- **Mempersiapkan bahan kunjungan BEI ke Anak Perusahaan SRO**
Prepare IDX visit materials to SRO subsidiaries
- **Mempersiapkan bahan presentasi untuk Acara Literasi Keuangan bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Banda Aceh**
Prepare presentation material for the Financial Literacy Event with the Indonesian Securities Company Association (APEI) in Banda Aceh

28 Mei 2019

» May 28, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

Ririh Asih Priyahita**Mariska Aritany Azis**

- **Penyusunan materi untuk pertemuan OJK**
Preparation of material for OJK meetings
- **Merencanakan Project Notifikasi Pemodal**
Planning for Investor Notification Project
- **Melakukan kajian peran Administrator Disgorgement and Disgorgement Fund**
Making study of the role of the Administrator of the Disgorgement and Disgorgement Fund
- **Mempersiapkan pertemuan dengan Calon Dewan Komisaris**
Prepare a meeting with the Candidates for the Board of Commissioners

28 Juni 2019

» June 28, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

Ririh Asih Priyahita**Mariska Aritany Azis**

- **Progress korespondensi dengan beberapa SIPF di Regional**
Progress of correspondence with several SIPFs in the Region
- **Memulai HRIS**
Starting HRIS
- **Menunjuk perwakilan pengajar di TICMI pada pelatihan WPPE**
Appoint teaching representatives at TICMI at WPPE training
- **Progress 4 Program Prioritas Jangka Panjang**
Progress 4 Long Term Priority Programs

26 Juli 2019

» July 26, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

Ririh Asih Priyahita**Mariska Aritany Azis**

- **Menyusun mekanisme pertemuan berkala dengan Pemegang Saham**
Develop a mechanism for periodic meetings with the Shareholders
- **Menyusun bahan pertemuan dengan OJK**
Compiling meeting materials with OJK
- **Menetapkan jadwal induction program bagi Dewan Komisaris**
Establish an induction program schedule for the Board of Commissioners
- **Penyempurnaan rencana kebijakan investasi Perusahaan**
Completion of the Company's investment policy plan
- **Melakukan pertemuan dengan KSEI terkait Layanan Notifikasi Pemodal**
Meeting with KSEI regarding the Investor Notification Service

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

29 Agustus 2019
» August 29, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- **Sehubungan dengan pertemuan dengan SRO dan OJK pada September 2019**
In connection with a meeting with SRO & OJK in September 2019
- **Materi untuk pertemuan rapat koordinasi RKAT dengan SRO dan anak usaha**
Material for RKAT coordination meetings with SROs and subsidiaries
- **Agar segera disusun konsep project simulasi klaim**
In order to immediately compile the concept of a claim simulation project
- **Agar dibuatkan summary hasil evaluasi GCG Dewan Komisaris Lama kepada Dewan Komisaris Baru**
To make a summary of the results of the Old Board of Commissioners GCG evaluation to the New Board of Commissioners

19 September 2019
» September 19, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- **Mempersiapkan tindak lanjut surat OJK mengenai isu strategis**
Preparing follow-up to OJK's letter regarding strategic issues
- **Penyusunan Kajian Mengenai Rencana Konversi CGRP dan solusi menghadapi dampak penerapan PSAK 55**
Preparation of a Study Concerning the CGRP Conversion Plan and solutions to the impact of implementing PSAK 55
- **Memfinalisasi MOU dengan KSEI mengenai pertukaran data**
Finalize the MOU with KSEI regarding data exchange
- **Konfirmasi status pencatatan pembukuan anggota DPP**
Confirmation of the record keeping status of DPP members
- **Penetapan KPI unggulan dan pengukuran revenue karyawan**
Determination of superior KPIs and measurement of employee revenue

14 Oktober 2019
» Oktober 14, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- **Mengirimkan tindak lanjut Paparan dan Diskusi Pasar Modal oleh OJK**
Sending follow-up to OJK's Capital Market Discussion
- **Mempersiapkan penyebaran informasi melalui video**
Prepare for information dissemination via video
- **Pembahasan Iuran Keanggotaan**
Discussion of membership fees
- **Pembuatan kajian pengukuran iuran berbasis risiko**
Making risk-based contribution measurement studies
- **Mempersiapkan bahan untuk OJK**
Prepare materials for OJK
- **Mempersiapkan pertemuan untuk membahas perlindungan Reksadana KIK**
Prepare a meeting to discuss the protection of KIK Mutual Funds
- **Mempersiapkan kegiatan outing karyawan**
Prepare employee outing activities

13 November 2019
» November 13, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama
» President Director

Widodo – Direktur
» Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- **Revisi materi dan bahan presentasi RKAT 2020**
Revised material and presentation materials for RKAT 2020
- **Penyusunan surat tertulis implikasi dari implementasi PSAK 55 dan kajian tertulis terkait konversi CGRP menjadi Modal**
Compilation of written letters implicating from the implementation of PSAK 55 and written studies related to the conversion of CGRP into Capital
- **Memfinalisasikan konsep simulasi penanganan klaim dan kajian iuran keanggotaan**
Finalize the simulation concept of claim handling and membership fee study
- **Tindak lanjut CSR dengan Rumah Ilmu**
Follow up of CSR with Rumah Ilmu

Tanggal Rapat.

» Date of Meeting

Peserta Rapat.

» Meeting Participant

Agenda Rapat.

» Meeting Agenda

18 Desember 2019

» Desember 18, 2019

Ignatius Girendroheru – Direktur Utama

» President Director

Widodo – Direktur

» Director

Ririh Asih Priyahita**Mariska Aritany Azis**

- ❖ Menyiapkan surat permohonan secara tertulis kepada Pemegang saham untuk menyetujui konversi hutang CGRP menjadi modal P3IEI
Prepare a written application letter to shareholders to approve the conversion of CGRP debt into P3IEI capital
- ❖ Mempersiapkan materi pertemuan dengan OJK
Prepare meeting material with OJK
- ❖ Mempersiapkan pertemuan dengan Bu Rina dan Tim OJK terkait implikasi PSAK 55 terhadap CGRP
Prepare a meeting with Mrs. Rina and the OJK Team regarding the implications of PSAK 55 for CGRP
- ❖ Memfinalisasi surat usulan alternatif Iuran Keanggotaan kepada OJK
Finalize the proposal letter for alternative membership fees to the FSA
- ❖ Membuat kajian Safekeeping Fee KSEI
Making a KSEI Safekeeping Fee study

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:

The recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners Meeting and Board of Directors Meeting is presented in the following table:

Tabel 4.1 Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Periode Januari 2019 – Desember 2019

» Table 4.1 Number of Attendance at Board of Commissioners and Board of Directors Meetings Period January 2019 - December 2019

Bacelius Ruru	100%
Hari Purwantono	100%
Dewi Arum Prasetyaningtyas	100%
Roni Gunardi	100%
Ignatius Girendroheru	100%
Widodo	100%

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi

Diversity In Composition of The Board of Commissioners & The Board of Directors

- Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Oleh sebab itu, isu kesetaraan dan keadilan dari segi komposisi karyawan menjadi isu yang penting. Salah satu perwujudan dari komitmen perusahaan tersebut adalah keberagaman komposisi dari manajemen tingkat puncak, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman komposisi ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, yang tidak menghendaki adanya diskriminasi apapun dalam kegiatan operasional perusahaan.

Tercatat bahwa pada tahun 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengalami perubahan. Sebelumnya pada tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Namun pada tahun 2019 setelah terjadi pergantian komisaris, terdapat 1 orang perempuan yang menduduki jabatan tersebut, yaitu Dewi Arum Prasetyaningtyas. Adapun dari segi keberagaman pendidikan, tidak terdapat perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada kedua tahun tersebut, terdapat 1 orang Komisaris yang berpendidikan S1 dan 1 orang Komisaris yang berpendidikan S2. Sedangkan untuk Direksi, tidak ada perubahan apapun mengingat komposisi dan pejabat Direksi masih sama dengan periode jabatan sebelumnya.

SIPP is committed towards the implementation of good and proper human capital management practices. Therefore, equality and justice issues regarding employee demographics composition are considered as important. One of the ways in which SIPP displays said commitment is through ensuring that the top managers, namely the Board of Commissioners and Directors are composed of people from diverse backgrounds. This is mandated by the regulations stated in Financial Services Authority Regulation or Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Provider, which clearly prohibits any form of discrimination in the operational activities of the company.

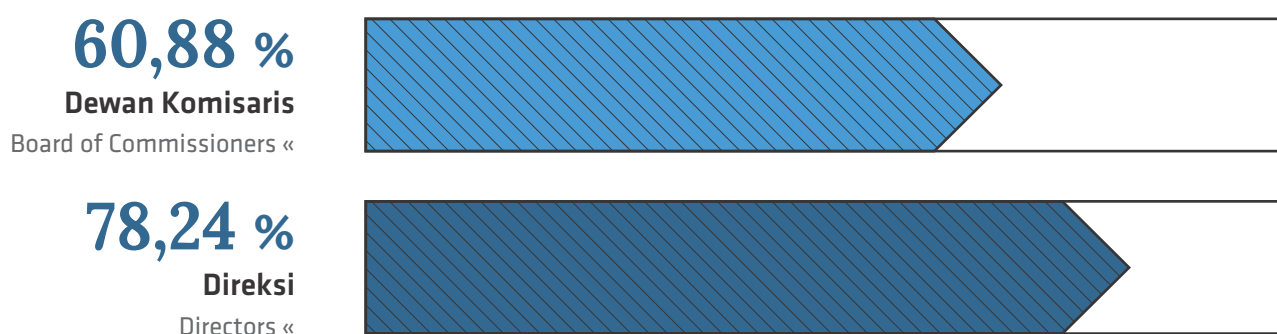
It is noted through the year of 2019 that the diversity composition of the Board of Commissioners and Directors has experienced a change. Previously in 2018, all members of the Board of Commissioners and Directors are male. However, after the members Board of Commissioners were changed, there is one female holding the title of commissioner, namely Dewi Arum Prasetyaningtyas, SIPP's current President Commissioner. As for educational background diversity, there is no difference between 2019 and 2018. In both years, there is 1 commissioner who possesses an undergraduate degree and 1 commissioner who possesses a masters degree. Meanwhile for Directors, there is no difference because the titleholders remain the same for both years.

Assessment/Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris & Direksi

Assessment of Performance on Board of Commissioners & Directors

... Dewan Komisaris serta Direksi dinilai berdasarkan performa dalam tata kelola perusahaan sesuai dengan Kontrak kinerja Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan Tahun 2019, No. KPI-RO-011 tentang Ketersediaan Penilaian Tata Kelola Perusahaan, yang merupakan turunan dari KPI Perusahaan Tahun 2019 No. KPI-CORP-006 tentang Nilai Evaluasi terhadap Tata Kelola Perusahaan. Dalam praktiknya Dewan Komisaris dinilai oleh 43 indikator dengan nilai sebesar 60,88% atau dikategorikan cukup baik. Sedangkan Direksi dinilai dengan 52 indikator dengan total nilai yang didapatkan sebesar 78,24% atau dikategorikan baik.

The Board of Commissioners and Directors are assessed based on performance in corporate governance in accordance with the 2019 Internal Audit and Compliance Performance Contract. KPI-RO-011 concerning Availability of Corporate Governance Assessment, which is a derivative of Company KPI 2019 No. KPI-CORP-006 concerning Evaluation Value of Corporate Governance. In practice the Board of Commissioners is assessed by 43 indicators with a value of 60.88% or categorized quite well. Whereas the Board of Directors is assessed by 52 indicators with a total score of 78.24% or categorized as good.



Remunerasi bagi Dewan Komisaris & Direksi

Remuneration for Board of Commissioners & Directors

... Dalam RUPS yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2019 yang dicatat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada agenda keempat telah disetujui dengan suara bulat atas dasar mufakat untuk memutuskan besaran Gaji dan Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode masa jabatan 2019-2022. Dimana Honor Komisaris merupakan 90% dari Honor Komisaris Utama sedangkan remunerasi Direksi telah dianggarkan dalam RKAT 2019 yang disetujui Pemegang Saham dalam RUPS-LB tanggal 9 November 2018.

Dalam RUPS yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2019 yang dicatat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, pada agenda keempat telah disetujui dengan suara bulat atas dasar mufakat untuk memutuskan besaran Gaji dan Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode masa jabatan 2019-2022. Dimana Honor Komisaris merupakan 90% dari Honor Komisaris Utama sedangkan remunerasi Direksi telah dianggarkan dalam RKAT 2019 yang disetujui Pemegang Saham dalam RUPS-LB tanggal 9 November 2018.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, & Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Affiliate Relationship Between The Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, & The Main Shareholders and / or Controls



- Terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Tercatat bahwa Komisaris Utama P3IEI, Dewi Arum Prasetyaningtyas, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Komisaris P3IEI, Roni Gunardi, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

There is an affiliation between members of the Board of Commissioners and Main and/or Controlling Shareholders. It has been noted that President Commissioner of Indonesia SIPP, Dewi Arum Prasetyaningtyas, is currently also holding the title of Head of Legal Division PT Bursa Efek Indonesia. Furthermore, Commissioner of Indonesia SIPP, Roni Gunardi, is currently also holding the title of Head of Human Resources Division and General Affairs PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Organ Penunjang Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Komite Audit

Audit Committee

... Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

Dengan mempertimbangkan cakupan dan kompleksitas perusahaan, maka saat ini belum mempertimbangkan untuk memiliki Komite Audit. Meskipun demikian, untuk fungsi yang melekat di Komite Audit dalam rangka pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan seperti pengawasan internal, dan lain-lain.

The Audit Committee is formed by and answers to the Board of Commissioners in its role to assist the execution of the Board of Commissioner's duties and functions. In accomplishing its functions, Audit Committee possesses several duties and responsibilities as listed:

1. Conducting reviews of financial information that is about to be published by the Company, such as financial report, projection, and other reports related to the information of the Company's financial affairs.
2. Conducting reviews of the Company's compliance towards other legal products and rules in relation to the Company's activities
3. Giving recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant in consideration of independence, scope of assignment, and fee to be relayed to the General Meeting of Shareholders
4. Conducting reviews on the Internal Supervision Unit's investigation and the follow-up process by Directors on the Internal Supervision Unit's findings
5. Conducting reviews on implementation of risk management activities conducted by Directors
6. Conducting reviews of complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding probabilities of conflict(s) of interest
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information

In order to execute its duties and responsibilities, the Audit Committee is authorized to:

1. Access corporate documents, data, and information about employees, fund, assets, and resources needed
2. Communicate directly or indirectly with employees and parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management
3. Involve independent parties other than Audit Committee members that are needed to carry out the execution of its duties, if needed
4. Execute other authorities given by the Board of Commissioners

In consideration of company scope and complexity, there has been no consideration to establish an Audit Committee. In spite of such condition, the function of Audit Committee as a supervisory organ has been run by the Board of Commissioners with the assistance from other functions within the organization, such as internal supervisory unit and other related units.

Organ Penunjang Dewan Direksi

Board of Directors
Supporting Organs

Komite Klaim

Claim Committee

- Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Selama tahun 2019 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Claim Committee is an organization formed in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds. Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to the Financial Services Authority in order to gain approval. The committee is a decision-making organ of Directors in the process of claim handling management and recovery of investor assets process.

The duties of Claim Committee is listed as follows:

1. Giving guidelines regarding investigation and claim verification process of investors to the Verification Team
2. Conducting reviews on investigation and investor claim verification report that is conducted by the Verification Team
3. Giving recommendations to the Directors in regards to whether to accept or reject claim of loss of assets put forward by the investor to the Investor Protection Fund and amount of payment in the case of claim acceptance
4. Giving recommendations to the Directors regarding proportion of maximum amount of claim agreed upon for each investor and each custodian in the case that Investor Protection Fund's asset is insufficient
5. Investigating claim administration process regularly

Claim Committee is responsible for the disclosure of recommendations to the Directors on claims submitted by the Investor(s). Recommendation given may be in the forms of claim acceptance or rejection opinion in consideration of the evidence regarding loss of investor asset and root cause of the loss.

With respect to said responsibility, the Audit Committee is authorized to:

1. Gain access to entire information related to the investor's claim
2. If needed be, conduct interview with the investor or other parties related to the claim
3. Advise the directors regarding the need for special investigation conducted by independent parties in relation to claim verification or calculation of claim amount to be agreed upon.

Throughout the year of 2019, there was no event of loss of investor assets that requires compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Komite Investasi

Investment Committee

- Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, Perseroan membentuk Komite investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Komite investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang - kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, Komite investasi dapat memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan investasi
2. Alokasi investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur;
2. Kepala Divisi Operasional;
3. Kepala Divisi Penunjang; dan
4. Kepala Unit/Staf Unit Investasi.

In order to maintain optimal implementation of financial investment activities on the Investor Protection Fund, the Company established an investment committee that is responsible to the Directors and has the function to provide input, suggestions and responses to the Directors regarding matters relating to investment and divestment, including investment and divestment guidelines.

The investment committee has the following duties;

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company.
2. Providing opinions on investment allocation in accordance with the objectives and investment policies in force in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in the context of deciding the implementation of investment or divestment
5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.

In connection with the above mentioned tasks, the Investment Committees are able to provide opinions or considerations related to, but not limited to, the following:

1. Investment objectives and policies
2. Investment allocation; and
3. Investment plans or divestments in certain investment products.

Investment Committee members consist of:

1. At least 1 (one) Director;
2. Head of Operations Division;
3. Head of Supporting Division; and
4. Unit Head / Investment Unit Staff.

Tabel 4.2 Susunan Komite Investasi Tahun 2019

» Table 4.2 Investment Committee Structure in 2019

- Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2019, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

In carrying out its duties and responsibilities, as stipulated in the Investment Committee Charter that the Investment Committee holds Committee Meetings regularly every month, throughout 2019, P3IEI has held 12 (twelve) Committee Meetings.

No. **Nama.** Name **Jabatan.** Position

1.	Ignatius Girendroheru	Direktur Utama » President Director
2.	Widodo	Direktur » Director
3.	Muhammad Arif	Kepala Divisi Operasional » Head of Operations Division
4.	Mariska Aritany Azis	Kepala Divisi Penunjang » Head of Supporting Division
5.	Brilyant Agung Wibowo	Staf Unit Investasi » Investment Unit Staff
6.	Bayu Priguna	Staf Unit Keanggotaan, Klaim, dan Manajemen Risiko » Staff Membership, Claims and Risk Management Unit

Audit Internal

Internal Audit

- Berdasarkan pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa Perusahaan sebagai PDPP wajib memiliki fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik PDPP yang berlaku;
2. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan
3. Memastikan bahwa pegawai Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut Perusahaan membentuk Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Unit ini merupakan satuan kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan dan setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

1. Investasi;
2. Pembukuan dan Keuangan; dan
3. Kepatuhan

Secara rinci Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit).
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal, dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Aspek-aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan:
 - a. Reliabilitas dan integritas sistem investasi keuangan dan operasional;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
 - c. Prosedur pengamanan aset; dan
 - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Pursuant to article 33 of OJK Regulation Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds that the Company as an IPF Institution is required to have an Internal Oversight and Compliance function carried out under the following conditions:

1. Ensuring compliance with laws and regulations, as well as standard operating procedures and applicable IPF Institution code of conduct;
2. Process every investor and community complaint related to the implementation of IPF Institution responsibilities; and
3. Ensure that Internal Control and Compliance employees have access to bookkeeping at all times.

In order to meet these requirements, the Company established an Internal and Compliance Oversight Unit. This unit is a work unit formed and is responsible directly to the President Director. The implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit has a scope that covers all processes and functions of the Company and covers at least 3 (three) main processes and functions of the Company as follows:

1. Invest;
2. Bookkeeping and Finance; and
3. Obedience

In detail, the Internal Oversight and Compliance Unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare an annual audit plan using a risk-based audit approach (risk-based audit).
2. Implement annual audit plans, including special audit assignments requested by the Board of Directors or the Audit Committee, such as an investigative audit to detect fraud.
3. Provide appropriate considerations and recommendations in an effort to improve and improve the efficiency and effectiveness of the Company's business and operational processes.
4. Coordinate and support the External Auditor, in relation to preventing duplication of work.
5. Report the results of the audit, along with findings and recommendations to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee.
6. Monitor and oversee the follow-up process (audit) of the results of the audit by Internal Oversight and External Auditors, and periodically inform the status of corrective actions on recommendations to the President Director and Audit Committee.

Aspects in the audit can include the following matters:

1. Checking the adequacy, effectiveness and efficiency of internal control and risk management.
2. Checking the quality of work, taking into account:
 - a. Reliability and integrity of financial and operational investment systems;
 - b. Compliance with laws and regulations and Company policies;
 - c. Asset security procedures; and
 - d. Achievement / realization of the Annual Work Plan and Budget (RKAT)

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, independensi, serta kesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Pengawasan Internal memiliki jalur pelaporan secara langsung kepada Direktur Utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas kerja Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan, serta untuk mempermudah akses ke Direksi.

The Internal Oversight and Compliance Unit works based on the principles of professionalism, independence and sustainability in order to improve the Company's internal control in order to provide adequate confidence for the Company to achieve its vision, mission and goals. Internal Supervision has a reporting channel directly to the President Director. This is intended to maintain the independence and objectivity of the work of the Internal Oversight Unit and Compliance, as well as to facilitate access to the Directors.

Komite Good Corporate Governance, Nominasi & Remunerasi

Good Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

- Pada PT P3IEI tidak terdapat sebuah komite khusus yang berdedikasikan pada manajemen risiko, melainkan tanggung jawab tersebut menjadi bagian dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang melibatkan struktur fungsi sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- d. Auditor Eksternal

At PT P3IEI there is no special committee dedicated to risk management, but these responsibilities become part of the company's internal control system that involves the following functional structure:

- a. Board of Commissioners
- b. Audit Committee
- c. Internal Oversight and Compliance Unit; and
- d. External Auditor

Sekretaris Perusahaan

Company Secretary

- Perseroan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Unit Sekretaris Perusahaan dan Hukum sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 Perseroan melakukan pembaruan fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: Kep-0002/P3IEI/DIR/0417 tentang Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2017.

Fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi:

1. Membina hubungan relasi antara Perseroan dengan stakeholders yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemangku kepentingan serta didokumentasikan secara lengkap dan teratur.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang direview secara periodik.
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep *corporate branding*.
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perusahaan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perseroan.
8. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap dan terkini mengenai kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan.
9. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik kepada *stakeholders* terkait.

The Company has had a Corporate Secretary function carried out by the Corporate Secretary and Legal Unit since 2013, then in 2017 the Company renewed the Corporate Secretary function based on Directors Decree Number: Kep-0002 / P3IEI / DIR / 0417 regarding P3IEI Organizational Structure in 2017.

Function The Corporate Secretary has functions:

1. Fostering relations between the Company and stakeholders which include, among others, shareholders, the public, the media, the FSA (OJK), and other government institutions.
2. Holding Annual and Extraordinary GMS, Directors' Meetings, and Board of Commissioners' Meetings.
3. Fulfill reporting obligations to stakeholders and documented in a complete and regular manner.
4. Administer and store Company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.
5. Providing Guidelines for Procedures for Letters and Archives that are periodically reviewed.
6. Develop and implement the concept of corporate branding.
7. Supervise and control the delivery of Company news and information in order to obtain external support for the Company's activities.
8. Prepare and disseminate accurate, complete and up-to-date information about the Company's performance to stakeholders.
9. Prepare and disseminate the Annual Report and the Company's Financial Statements periodically to relevant stakeholders.

▷ Saat ini fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ririh Asih Priyahita, SH, MH sebagai Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Beliau bergabung ke dalam Perseroan pada tahun 2016.

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas terkait berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Tahun 2019.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikannya dalam risalah rapat.
4. Melakukan keterbukaan informasi melalui *press release* kepada media dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui penerbitan buletin Indonesia SIPP yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara triwulan.
6. Melakukan pembaruan website Indonesia SIPP untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan fungsi Perlindungan Pemodal dan Perseroan.
7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahun 2018 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
8. Menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, dan lembaga terkait lainnya.
9. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan seremonial Perseroan.

At present the function of the Corporate Secretary is held by Ririh Asih Priyahita, SH, MH as the Head of the Corporate Secretary Unit, Investor Protection, and Law. She joined the Company in 2016.

During 2019, the Corporate Secretary has carried out relevant functions and tasks related to stakeholders, including:

1. Following the development of Capital Market regulations, among others, by ensuring compliance with applicable regulations in the Capital Market.
2. Organize and document the 2019 Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
3. Organize and attend Directors' Meetings and Board of Commissioners Meetings and document them in minutes of meetings.
4. Open information through press releases to the media and the public in accordance with applicable laws and regulations.
5. Open information to stakeholders through the publication of the Indonesia SIPP bulletin which is published 4 (four) times on a quarterly basis.
6. Updating the Indonesia SIPP website to improve the public's ease of accessing information related to the Investor and Corporate Protection functions.
7. Prepare Annual Report and Activity Report for 2018 and submit it to the relevant Regulator.
8. Establish communication with the Financial Services Authority, Shareholders, and other related institutions.
9. Coordinate and document the implementation of the Company's socialization and ceremonial activities.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

... Seiring dengan penerapan manajemen risiko Perusahaan, Manajemen juga merancang proses pengendalian internal. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perusahaan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

- » Dewan Komisaris
- » Komite Audit
- » Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- » Auditor Eksternal

In accordance to the risk management implementation, SIPP's management also designed an internal control supervision process. Aspects of internal control consist of financial, nonfinancial, qualitative, and quantitative aspects, all placed within the framework of operational effectiveness and efficiency achievement, compliance to the Law and regulations, and transparent disclosure of financial report according to accounting standards enforced in Indonesia, timeliness, and with due accountability.

Internal control is a part of supervisory function. The activities of supervisory function requires an internal control that is able to give faith to the company's management that the internal control process has been carried out according to the outlined, agreed-upon plan. The implementing functional structure of the company's internal control supervision is listed as follows:

- » Board of Commissioners
- » Audit Committee
- » Internal Supervision and Compliance Unit
- » External auditor(s)

▷▷ Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perseroan (*risk based*), peningkatan nilai strategis dan operasional Perseroan (*value based*), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*compliance based*).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap Manajemen Eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

The supervisory function method on the internal control process must be risk-based, value-based, and compliance-based.

In general, an internal control system is not an activity that is added upon the management process, but rather an inseparable element of the process itself. There are five components that support the effectiveness of internal control process, namely:

1. Internal control environment

The cumulation of actions, policies, and procedures that reflect the attitude of Executive Managers, Board of Commissioners, and Owner(s) of the Entity.

2. Risk Assessment

Organizational identification and analysis of general risk and inherent risk that are considered relevant in the goal achievement process.

3. Control activities

Procedure and policies that help management in guaranteeing that every risk that is possible to happen and its impacts have been analysed and controlled properly.

4. Information and Communication

Information and communication include information management and channel systems that are relevant and effective for use in the control of operational activities.

5. Monitoring

Monitoring processes include continuous work quality management process and distinct evaluation activities.



▷▷ Guna meningkatkan kinerja Perusahaan, Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal di tahun 2019, dalam bentuk:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan metode *Balanced Scorecard*
2. Penetapan Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)
3. Pelaksanaan rapat koordinasi untuk memantau kinerja Perusahaan
4. Pengembangan sistem penunjang kegiatan operasional yang berlandaskan pada teknologi informasi
5. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP)
6. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG)
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

In order to improve corporate performance, SIPF has conducted evaluation on its internal control system in 2019, in the forms of:

1. Drafting of Strategic Plan and Corporate Work Plan based on the *Balanced Scorecard* Method
2. Establishment of Performance Standard and Performance Assessment Evaluation for Employees based on *Key Performance Indicator* (KPI)
3. Execution of coordination meetings to monitor Corporate performance
4. Development of support system for operational activities that is based upon information technology
5. Execution of evaluation and update on *Standard Operating Procedure* (SOP)
6. Execution of evaluation and update on GCG activities
7. Monitoring and evaluation on the effectiveness of internal control implementation through internal investigative activities that are carried out by Internal Supervision and Compliance unit.

Manajemen Risiko

Risk Management

... Perseroan menuangkan komitmen penerapan manajemen risiko dalam Piagam Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan di dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini selanjutnya diteruskan oleh Manajemen dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang telah disusun pada tahun 2018 lalu, dalam rangka meyakinkan pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi Perusahaan.

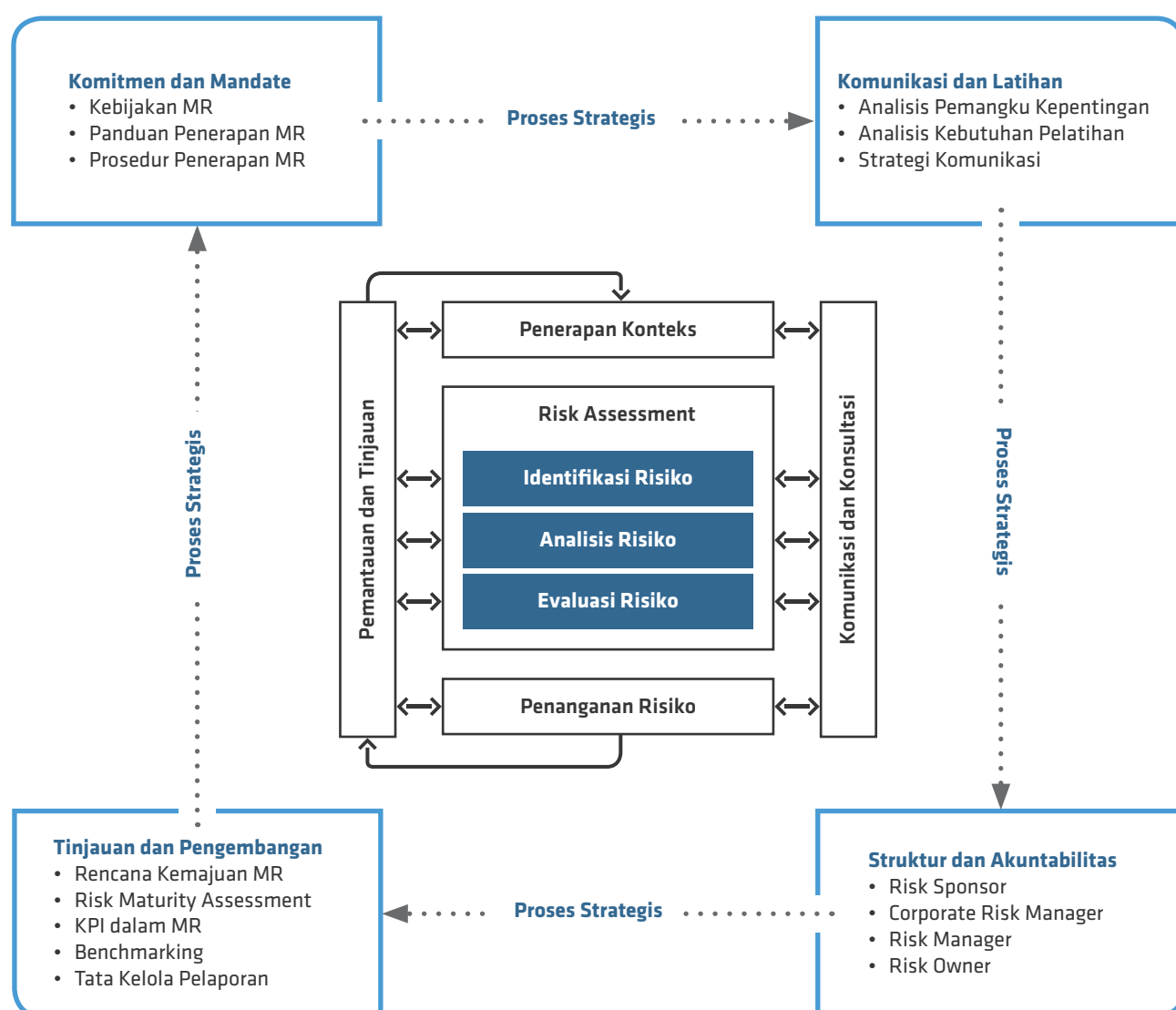
Perusahaan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan Perusahaan guna memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000; 2009 *Risk Management Principles and Guidelines* sebagai berikut:

Commitment of implementation of Corporate Risk Management is stated in Risk Management Charter which is united in the Corporate Governance Implementation Guidelines. Furthermore, this commitment was continued by Management by establishing the Company Risk Management Implementation Guidelines in 2018, as support that provides reasonable assurance for the achievement of Company's objectives and decrease negative impact from uncertainty related to the Company.

The Establishment of Risk Management Guidelines are inseparable components from the Company's policies to meet the principles of good corporate governance. The Risk Management Guidelines are used as a basis and reference in the application of risk management, which is based to the risk management framework according to ISO 31000; 2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko

» Scheme 4.2 Risk Management Framework



••• 1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai landasan dan batasan dalam implementasi Manajemen Risiko.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk menjabarkan semua risiko kunci yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan suatu teknik yang sistematis dalam pendataan seluruh risiko kunci di tingkat Perusahaan berdasarkan konteksnya.

3. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap level risiko dan guna menyusun peta risiko. Tujuan utamanya adalah untuk membuat prioritas risiko dan mengambil keputusan perlu tidaknya upaya pengendalian dan mitigasi terhadap risiko tersebut. Pengukuran risiko melibatkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).

4. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko kunci. Langkah evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko terhadap Perusahaan.

5. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan level risiko hingga pada area penerimaan risiko sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Mitigasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian terjadi.

6. Pemantauan dan Peninjauan (Review)

Pemantauan dan Peninjauan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

7. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

1. Determination of Context

Determination of the context aims to identify and establish the terms of reference and basic parameters as the foundation and limits in the application of Risk Management.

2. Risk Identification

Risk identification aims to list all key risks that have the potential to hinder, delay or frustrate the achievement of the Company's goals or objectives. Identification is done by using a systematic technique to list all key risks at the Company level based on the context.

3. Risk Measurement

The purpose of risk measurement is to provide an understanding of the level of risk and to develop a risk map. The main objective is to prioritize risks and make decisions about whether these risks need to be controlled and mitigated. Risk measurement involves two factors: possibilities and consequences (impacts).

4. Risk Evaluation

Risk evaluation aims to determine key risk priorities. Risk evaluation is carried out by considering the significance of risks to the Company.

5. Risk Mitigation

Mitigation aims to reduce the level of risk to the risk acceptance area, according to the predetermined risk appetite and tolerance. Mitigation refers to actions we take to prevent losses from occurring.

6. Monitoring and Review

Monitoring and review aims to ensure that all stages of the risk management process are carried out effectively in accordance with the prescribed framework and parameters.

7. Communication and Consultation

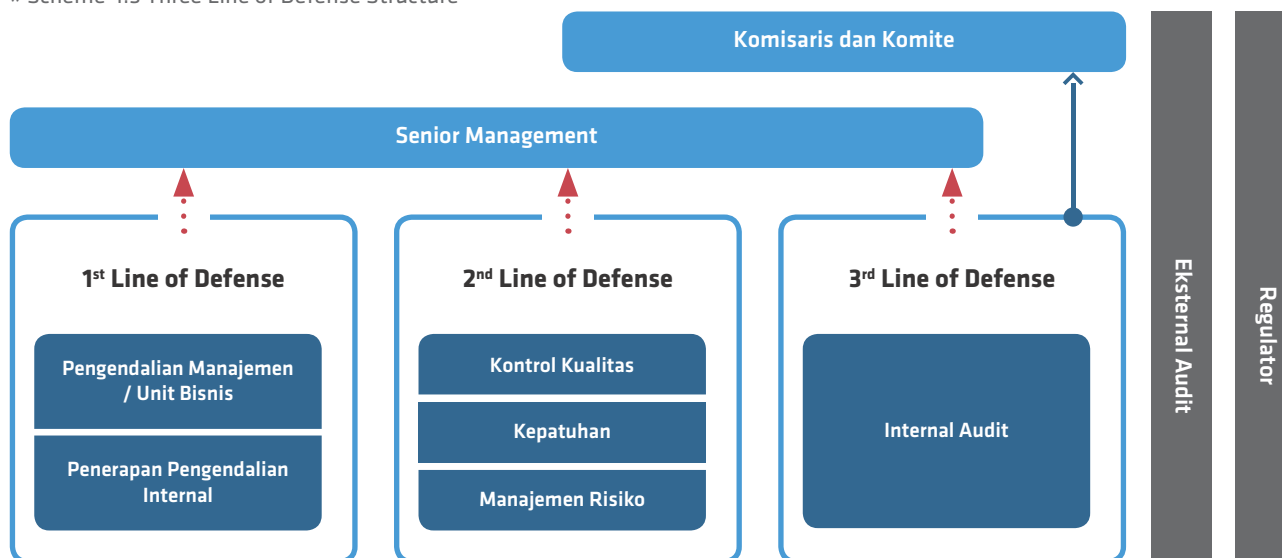
Communication and consultation aims to disseminate relevant information related to the implementation of Risk Management so that the parties concerned can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Dalam rangka membangun kapasitas manajemen risiko di seluruh jajaran proses bisnis, Perusahaan akan mengembangkan pendekatan Three Lines of Defense, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi-fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

In order to build risk management capacity throughout the business process range, the Company will develop the Three Lines of Defense approach, where risk management is carried out by business functions, risk management functions, and risk monitoring functions.

Bagan 4.3 Struktur Three Line of Defense

» Scheme 4.3 Three Line of Defense Structure



••• 1. 1st Line of Defense

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama unit/komponen/fungsi yang menjadi ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment)
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab
- Mempertimbangkan faktor risiko dengan penuh kesadaran dalam pengambilan keputusan maupun tindakan
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, serta adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut

2. 2nd Line of Defense

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi yang sudah terstruktur, seperti departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:

- Memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi bisnis dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan

3. 3rd Line of Defense

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

- Melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan

1. 1st Line of Defense

The first tier of defense is carried out by units or components or business functions that carry out daily operational activities of the company, especially those that are the front line of the organization. In this case they are expected to:

- Ensure that there is a conducive control environment in their business units.
- Implement risk management policies that have been determined when carrying out their roles and responsibilities and in full awareness of considering risk factors in the decisions and actions they take.
- Able to demonstrate the existence of effective internal controls in their business units, and also monitoring and transparency of the effectiveness of these internal controls.

2. 2nd Line of Defense

The second tier of defense is carried out by the functions of risk management and compliance, especially the functions that have been structured for example: the department or unit of risk management and compliance. In this case, they are expected to:

- Responsible for developing and monitoring the overall implementation of company risk management.
- Supervise how business functions are carried out within the corridors of risk management policies and operational standard procedures set by the company.
- Monitor and report on company risks as a whole to the organs that have the highest accountability in the company.

3. 3rd Line of Defense

The third tier defense is carried out by auditors both internal auditors and external auditors. The role of internal auditors is far more intense in this model because they are internal parts of the company that are independent of other functions. In this case, internal auditors are expected to:

- Reviewing and evaluating the overall design and implementation of risk management, and
- Ensure that first tier and second tier defenses go as expected.



Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi

Information & Communication Technology Governance

- Dalam rangka mencapai peningkatan layanan dan proses bisnis yang optimal, Perusahaan membutuhkan dukungan layanan teknologi informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena kebutuhan tersebut, Perusahaan membuat *IT Strategic Planning* sebagai pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan mampu berdampak positif terhadap proses bisnis Perusahaan.

Selain optimalisasi proses bisnis, *IT Strategic Planning* juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta menjadi pedoman dalam kegiatan operasional teknologi informasi Perusahaan.

Salah satu bagian dari *IT Strategic Planning* adalah visi dan misi teknologi informasi Perusahaan, yang menjadi acuan Perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai ranah bisnisnya. Visi Perusahaan terkait aspek teknologi informasi adalah menjadi penyedia layanan teknologi informasi baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Visi tersebut hendak diwujudkan oleh perusahaan lewat penerapan 3 (tiga) misi teknologi informasi, yaitu teknologi informasi yang berfokus pada kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

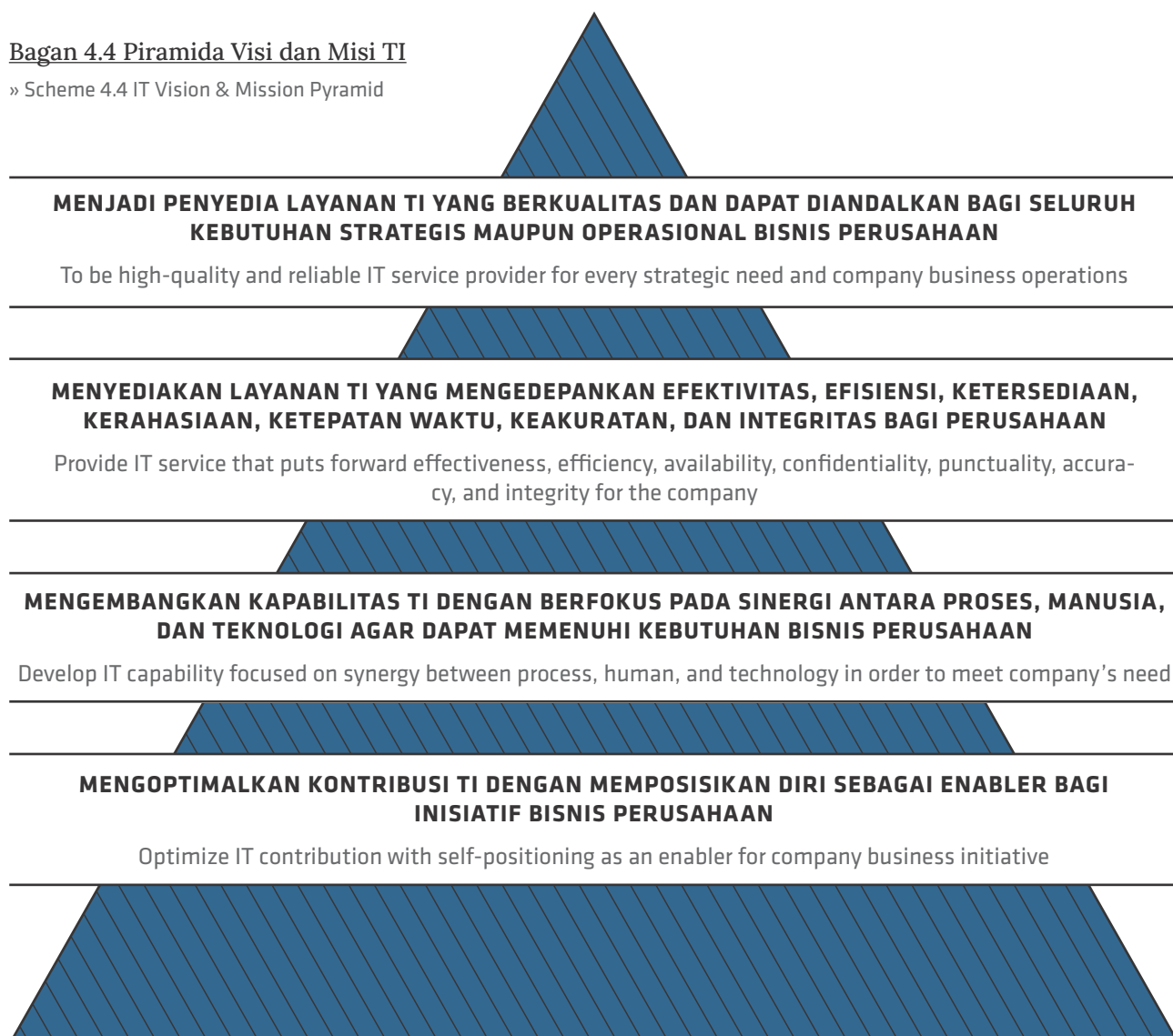
In order to achieve optimized improvement in services and business processes, SIPP requires the support of information technology services that are both trustworthy and reliable. Therefore, the Company has constructed an IT Strategic Planning blueprint as a guideline in information technology usage that is expected to impact the Company's business process positively.

Aside from business process optimization, IT Strategic Planning is also expected to increase the effectiveness of decision-making processes conducted by Directors, as well as to serve as the guideline of the Company's information technology-related operational activities.

One of the elements of IT Strategic Planning is the information technology vision and mission, which serves as the Company's foundation in providing services related to its business sector. The company's vision regarding its information technology aspect is to become an information technology service provider, both for strategic needs and business operations. The vision would be achieved by implementing 3 (three) information technology missions, namely information technology that is focused on service quality, service synergy, and sustainable service optimization.

Bagan 4.4 Piramida Visi dan Misi TI

» Scheme 4.4 IT Vision & Mission Pyramid



Akuntan Publik

Public Accountant

... Untuk tahun buku 2019, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2019. Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp93.500.000,00. Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sendiri baru melakukan audit sebanyak 1 kali, yaitu untuk tahun buku 2019.

For the financial year of 2019, the Company appointed Heliantono & Rekan Public Accounting Firm to carry out Annual Financial Statement Audit Service. This appointment was made during the Annual General Meeting of Shareholders on June 23, 2019. The amount of fee given for the audit services as specified is Rp93.500.000,00. Heliantono & Rekan Public Accounting Firm itself has only conducted 1 (one) audit of SIPP's Financial Statement for the 2019 financial year.

Rincian Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT P3IEI sepanjang tahun 2015-2019 adalah

» The details of the Public Accounting Firm that have audited PT P3IEI Financial Statements throughout 2015-2019 are

Tahun Buku. Financial Year

Kantor Akuntan Publik. Public Accounting Firm

2019	Heliantono & Rekan
2018	Satrio Bing Eny & Rekan
2017	Satrio Bing Eny & Rekan
2016	Satrio Bing Eny & Rekan
2015	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan

Pengelolaan Benturan Kepentingan & Hubungan Dengan Pihak Berelasi

Management of Interest Conflicts & Relationship with Related Parties

... Integritas adalah salah satu nilai inti Perusahaan yang senantiasa menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Salah satu perwujudan dari komitmen perusahaan terhadap integritas adalah pengelolaan benturan kepentingan dan hubungan dengan pihak berelasi serta pemaparannya kepada pemangku kepentingan perusahaan. Tercatat bahwa pada tahun 2019, Perusahaan secara organisasi maupun jajaran di dalamnya tidak memiliki benturan kepentingan dengan entitas manapun, baik secara etis maupun legal.

Integrity is one of the company's core values that has always been the foundation upon which corporate operational activities are based. One of the manifestations of the company's commitment towards integrity is the management of conflict of interest and relationship with related parties, and its disclosure to company stakeholders. It is recorded that during the year 2019, neither the company as an organization nor its structural members possess any conflict of interest with other entities, both ethically and legally.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

- Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Perilaku, wajib melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk melalui sistem *whistleblowing system* (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan maupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak mana-pun yang turut membantu melindungi proses investi-gasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (*retaliation*) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelang-garan yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberi-kan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

Employees and members of the society who possess knowledge regarding violations of Company Regulation, Ethical and Behavioral Guidelines, have the obligation to report its proofs and known information to the units appointed through the whistleblowing system (WBS). This act is based upon Chapter 33 of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds, which states that the function of Internal Supervision and Compliance is to process every report filed by investors and members of the society related to Providers of Investor Protection Funds' fulfilment of responsibilities.

The procedure of reporting through WBS involved these following processes:

1. Employee(s) or member(s) of the society could report violations and discuss them with the supervisor(s) or Internal Supervisor and Compliance Unit that has been appointed.
2. The company is obliged to protect the identity of the reporter(s) and the contents of the report(s), as well as protecting the reporter(s) and any party who assists in protecting the investigation process of said violation from the possibilities of retaliation acts from parties related to the report(s). The protection given by the company should include legal protection, if needed be.
3. The company will follow up on every violation report that is supported by preliminary findings that are deemed sufficient.
4. Employee(s) that is (are) found proven to have said viola-tion(s) still possess(es) the rights to explain or defend the accused violation(s) before sanctions are given according to corporate regulation.
5. Sanctions given to violating employees are determined by the Directors in consideration of advice given by the Head of Internal Supervision Unit (as investigation coordinator) and the employee's direct supervisor.

Permasalahan Hukum Perusahaan

Company's Law Issues

- Dinamika perjalanan sebuah perusahaan tidak dapat dile-paskan dari aspek hukum. Sebagai perusahaan yang bernaung di Indonesia sebagai negara hukum, P3IEI tidak luput dari kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2019, baik perusahaan secara organisasi maupun anggotanya secara individu tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.

The dynamics of a company's journey cannot be separated from its legal aspects. As a company operating in Indonesia, a lawful country, SIFP is not exempt from the obligation to obey the laws being upheld in Indonesia. Through the year of 2019, both the company's entire organization and its individual members were not involved in any legal dispute whatsoever.



Tata Kelola Perusahaan / Good Corporate Governance

Akses Informasi & Data Perusahaan

Access to Information & Company Data

... Keterbukaan informasi, sosialisasi, dan edukasi adalah isu-isu yang mendapatkan perhatian khusus dari Perusahaan. Atas dasar tersebut, P3IEI senantiasa mengelola hubungan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi di kanal media resmi perusahaan. P3IEI menyajikan informasi-informasi terkini dalam bentuk brosur, buletin, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasipf, dan instagram @indonesiasipf. Selain kanal-kanal tersebut, P3IEI juga menyajikan informasi kinerja operasional dan keuangan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan Perusahaan yang diterbitkan setiap tahun.

Information transparency, socialization, and education are issues that SIPF put utmost attention into. Therefore, SIPF always takes great care in maintaining the communication link with its stakeholders and the society at large through disclosure of information in the company's official media channels. SIPF provides its latest corporate information in the forms of brochure, bulletins, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasips, and Instagram @indonesiasipf. Alongside said channels, SIPF also provides information regarding corporate operational and financial performance in the form of Corporate Annual Report published each year.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Pemangku Kepentingan Perusahaan

Stakeholder Company

... Sebagai entitas yang beroperasi di Indonesia dan berfokus pada perlindungan dana pemodal di Indonesia, Perusahaan memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia. Hal ini muncul dari pemahaman Perusahaan akan pentingnya peran para pemangku kepentingan dalam aktivitas Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan menampung aspirasi, kebutuhan, serta ekspektasi pemangku kepentingan, salah satunya dalam bentuk aktivitas tanggung jawab sosial Perusahaan. Adapun pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan Perusahaan antara lain Pemerintah dan Pemegang Saham sebagai pihak yang memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan, Pemodal sebagai pihak yang menerima proteksi dari Perusahaan sebagai PDPP, dan Masyarakat Indonesia sebagai pihak yang mendapatkan dampak langsung maupun tidak langsung dari kemampuan Perusahaan menjalankan fungsi sebagai PDPP.

As an entity that operates in Indonesia and focuses on investor protection fund in Indonesia, the company has a commitment to actively participate in the social dynamics of Indonesian society. This commitment stems from the Company's belief of the importance of stakeholders in the Company's activities. Therefore, the Company always actively maintains a positive relationship and heeds the aspirations, needs, and expectations of stakeholders, one of the examples of which is through Corporate Social Responsibility Activities. Apart from this, parties that are considered as Corporate stakeholders include but not limited to the Government and Shareholders as parties who possess utmost concern of the company's survival and success, Investor as a party that receives protection from the Company as Investor Protection Fund Provider, and Indonesian society at large as the party that receives both direct and indirect consequences of the Company's ability to execute its function as Investor Protection Fund Provider.

Fokus Topik

Topic Focus

... Saat ini, aktivitas tanggung jawab sosial Perusahaan difokuskan kepada masyarakat Indonesia, atau secara spesifik kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses secara ekonomi dan pendidikan. Perusahaan mengharapkan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dari aspek aksesibilitas terhadap edukasi, serta mampu menginisiasi tumbuhnya komunitas masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

At the moment, the Corporate Social Responsibility carried out by the company is focused on Indonesian society, specifically members of the society who are disadvantaged in terms of economic and educational aspects. The Company sincerely hopes that the Corporate Social Responsibility initiatives that are being carried out could positively impact the welfare of said members of the society, through the aspect of access to education, as well as could cultivate the growth of a community that is independent and prosperous.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Implementation of Social Responsibilities

... Pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial Perusahaan saat ini berada pada tahap inisiasi aktivitas dengan mitra CSR Perusahaan. Aktivitas yang hendak dilaksanakan adalah pembangunan taman bacaan (perpustakaan) dan kegiatan edukasi yang diharapkan berdampak positif terhadap pemberdayaan komunitas tujuan program. Inisiasi aktivitas dengan mitra saat ini telah mencapai 66 persen, dengan langkah terbaru berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh mitra CSR Perusahaan.

The execution of Corporate Social Responsibility activity has reached the initiation stage with the Company's CSR Partners. The activities that are about to be carried out are the construction of library and initiation of educational activities that could hopefully provide a positive impact through empowerment of the community to whom the program is aimed for. The progress of activity initiation with the partner at the moment has reached 66 percent, with the Budgeting Plan formulation as its latest step.



Laporan 5 Keuangan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2019

Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2019

... Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2019, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

» Jakarta, 8 Mei 2020

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for the fiscal year of 2019 has been duly disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the information on this annual report.

» Jakarta, May 8, 2020



Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA

...

President Director



Widodo

DIREKTUR

...

Directors



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA

...

President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS

...

Commissioner

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)

» Jakarta, 8 Mei 2020

» Jakarta, May 8, 2020

••• Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2020 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang baik dan telah memenuhi aturan dan pengendalian internal perusahaan serta sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pengolahan manajemen risiko perusahaan, pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned
Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) as of December 31, 2019 and 2018 and for the Years Ended December 31, 2019 and 2018, which we signed on May 8, 2020, are founded upon sound system of risk management and internal regulation and control, and compliant towards the policies adopted by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The company's risk management and internal control systems are operating efficiently and effectively in all material aspects.

Hereby this declaration has been made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors,

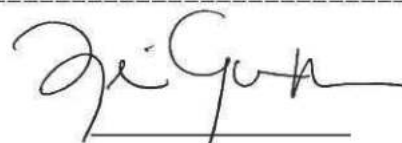
1. Nama. Name

Alamat Kantor. Office Address

Alamat Domisili. Domicile

Nomor Telepon. Telephone Number

Jabatan. Position



Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA

• • •

President Director

2. Nama. Name

Alamat Kantor. Office Address

Alamat Domisili. Domicile

Nomor Telepon. Telephone Number

Jabatan. Position



Widodo

DIREKTUR

• • •

Directors



LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA-
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Ignatius Girendroheru |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Sekolah Duta I/7 RT/RW 001/014
Pondok Pinang – Kebayoran Lama
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon | : | 08164819879 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Widodo |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Komp Gaya Motor RT/RW 004/008
Semper Timur Cilincing
Jakarta Utara |
| Nomor telepon | : | 081284828261 |
| Jabatan | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP);
2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2020



Ignatius Girendroheru
Direktur Utama



Widodo
Direktur

Nomor : 00065/2.0459/AU.1/05/1107-2/0/II/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan



Sultana Amri

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1107

Jakarta, 14 Februari 2020

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ASET			
Bank	5	33.615.606	21.729.174
Aset Keuangan Lainnya	6	191.624.956.602	162.389.793.698
Piutang Dana Perlindungan Pemodal	7	9.327.137	-
Piutang Bunga		920.991.746	856.425.261
JUMLAH ASET		<u>192.588.891.091</u>	<u>163.267.948.133</u>
 LIABILITAS			
Beban akrual	8	3.504.066.704	2.569.818.043
ASET NETO		<u>189.084.824.387</u>	<u>160.698.130.090</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan Bunga	9	11.680.222.346	8.566.060.145
BEBAN			
Pengelolaan dana perlindungan pemodal	10	3.504.036.704	2.569.818.043
Administrasi		12.746.586	8.294.822
Jumlah beban		3.516.813.290	2.578.112.865
Penghasilan Investasi Bersih		8.163.409.056	5.987.947.280
PERUBAHAN NILAI WAJAR			
SURAT BERHARGA NEGARA			
Belum direalisasi		1.591.900.000	(1.547.522.048)
KENAIKAN ASET NETO		9.755.309.056	4.440.425.232

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>9.755.309.056</u>	<u>4.440.425.232</u>
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Penerimaan iuran keanggotaan tahunan		18.231.385.241	17.075.547.167
Penerimaan iuran keanggotaan awal		<u>400.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah kontribusi dari anggota dana perlindungan permodal		18.631.385.241	17.075.547.167
JUMLAH KENAIKAN ASET NETO		28.386.694.297	21.515.972.399
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>160.698.130.090</u>	<u>139.182.157.691</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u><u>189.084.824.387</u></u>	<u><u>160.698.130.090</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	1.790.524.555	8.182.815.872
Pembayaran jasa pengelolaan	(2.569.818.043)	(2.246.184.885)
Pembayaran beban keuangan	(12.746.586)	(8.294.822)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(792.040.074)	5.928.336.165
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian investasi dalam Surat Berharga Negara	-	(34.652.500.000)
Penempatan deposito berjangka	(73.605.018.904)	(67.566.165.353)
Pencairan investasi dalam Surat Berharga Negara	10.191.489.500	-
Pencairan deposito berjangka	45.595.397.806	79.165.925.482
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(17.818.131.598)	(23.052.739.871)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Anggota DPP	18.622.058.104	17.075.547.167
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	11.886.432	(48.856.539)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	21.729.174	70.585.713
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	33.615.606	21.729.174

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perantara Perdagangan Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi anggota DPP.

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi PPE – iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi BK – sesuai surat edaran (SE) No. 30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
- c. Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksana hak subrogasi;
- d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. Dana Perlindungan Pemodal akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp25.000.000. Per tanggal 6 agustus 2015 dilakukan amandemen atas Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 yang tertuang dalam peraturan OJK No. KEP-46/D.04/2015, yaitu batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal diubah dari sebelumnya sebesar Rp25.000.000 menjadi Rp100.000.000.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

a. Standar dan amandemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Amandemen/penyesuaian PSAK berikut yang relevan tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan:

- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (amandemen), Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama
- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka, dan
- ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

b. Standar amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 71, Instrumen Keuangan,
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif,
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan
- PSAK 73, Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai dengan PSAK 45, Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan Peraturan OJK.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual basis dengan menggunakan biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (Dana Perlindungan Pemodal) (entitas pelapor).

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebagai nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrument keuangan selain dari instrument keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Surat Berharga Negara yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar AFS diakui dalam laporan perubahan aset neto dan diakumulasi di aset neto sebagai keuntungan atau kerugian belum terealisasi atas perubahan nilai wajar Surat Berharga Negara, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan perubahan kurs atas aset moneter, yang diakui pada laporan aktivitas. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakumulasi pada aset neto direklasifikasi ke laporan aktivitas.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Bank, deposito berjangka, piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan secara kolektif. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laporan aktivitas.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laporan aktivitas jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan dengan obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Dana Perlindungan Pemodal mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Dana Perlindungan Pemodal tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Dana Perlindungan Pemodal mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Dana Perlindungan Pemodal masih mengakui aset keuangan.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

e. Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai liabilitas

Liabilitas keuangan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diadakan dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Dana Perlindungan Pemodal telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

h. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4: Dana Perlindungan Modal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara Dana Perlindungan Modal berhak mendapat imbalan atas jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

i. Provisi

Provisi diakui ketika Dana Perlindungan Pemodal memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Perlindungan Pemodal diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Bank

Akun ini merupakan rekening giro DPP dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.101.468	3.981.123
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6.810.436	6.800.615
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.352.630	9.224.363
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.351.072	1.723.072
Jumlah	33.615.606	21.729.174

6. Aset Keuangan Lainnya

	2019	2018
Deposito:		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	166.631.206.602	129.260.443.698
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual:		
Surat Berharga Negara	24.993.750.000	33.129.350.000
	191.624.956.602	162.389.793.698
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	7,50% - 7,75%	7,75% - 8,00%

Investasi dalam Surat Berharga Negara

2019				
Surat Berharga Negara	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Kupon %	Jatuh Tempo
SBN FR0059	25.000.000.000	24.993.750.000	7,00	15-05-2027
Jumlah	25.000.000.000	24.993.750.000		
2018				
Surat Berharga Negara	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Kupon %	Jatuh Tempo
SBN FR0059	25.000.000.000	23.367.250.000	7,00	15-05-2027
SBN FR0061	10.000.000.000	9.762.100.000	7,00	15-05-2022
Jumlah	35.000.000.000	33.129.350.000		

Biaya perolehan Surat Berharga Negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.925.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp1.591.900.000 dan Rp(1.547.522.048) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. Piutang Dana Perlindungan Pemodal

Akun ini merupakan piutang atas iuran Keanggotaan Awal dan Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Iuran Keanggotaan Tahunan		
PT Indo Mitra Sekuritas	8.818.600	-
Lain-lain	508.537	-
Jumlah	9.327.137	-

8. Beban Akrua

Akun ini merupakan akrual atas beban pengelolaan DPP tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.504.066.704 dan Rp2.569.818.043 kepada penyelenggara DPP atas jasa pengelolaan DPP berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-62/D.04/2016 tentang imbalan atas Jasa Pengelolaan atas Investasi DPP sebesar 30% dari penghasilan investasi bersih.

9. Penghasilan Bunga

	2019	2018
Bunga deposito berjangka	9.501.316.027	7.391.733.518
Surat Berharga Negara	2.173.381.765	1.168.937.344
Jasa giro	5.524.555	5.389.283
Jumlah	11.680.222.346	8.566.060.145

10. Beban – Pengelolaan DPP

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016 imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi bersih (Catatan 3h). Imbalan jasa pengelolaan dana perlindungan pemodal pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.504.066.704 dan Rp2.569.818.043.

11. Iuran Keanggotaan

	2019	2018
Pedagang Perantara Efek (PPE)	12.676.988.693	11.809.296.223
Bank Kustodian (BK)	5.554.396.548	5.266.250.944
Jumlah	18.231.385.241	17.075.547.167

Jumlah anggota DPP pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 128 anggota (106 PPE dan 22 BK) dan 124 anggota (105 PPE dan 19 BK).

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

12. Informasi Penting Lainnya

Pada tahun 2019, terdapat penambahan 4 (empat) anggota DPP yang terdiri dari 1 (satu) PPE dan 3 (tiga) BK dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Surya Fajar Sekuritas (PPE);
2. PT Bank Syariah Mandiri (BK);
3. PT Bank KEB Hana Indonesia (BK); dan
4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK).

13. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

a. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan DPP adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Aset keuangan		
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Investasi dalam Surat Berharga Negara	24.993.750.000	33.129.350.000
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Bank	33.615.606	21.729.174
Deposito berjangka	166.631.206.602	129.260.443.698
Piutang dana perlindungan pemodal	9.327.137	-
Piutang bunga	920.991.746	856.425.261
Jumlah	167.595.141.091	130.138.598.133
Liabilitas keuangan		
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Beban akrual	3.504.066.704	2.569.818.043

b. Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memerhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian timbul sehubungan dengan kegagalan *Counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah Bank.

Penempatan Dana Perlindungan Pemodal pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas bank, deposito berjangka dan piutang adalah terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal adalah lembaga keuangan terpercaya.

Manajemen risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Instrumen keuangan Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank, deposito berjangka dan investasi dalam Surat Berharga Negara sebesar Rp191.658.572.208 dan Rp162.411.522.872.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, kenaikan aset neto dari aktivitas operasi Dana Perlindungan Pemodal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp1.890.848.244 dan Rp1.624.115.229.

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikururkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank pemerintah).

	2019					Jumlah
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang (%)	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Diatas lima tahun	
Aset Keuangan						
Bunga tetap						
Deposito berjangka	7,50% - 7,75%	-	166.631.206.602	-	-	166.631.206.602
Surat Berharga Negara	7,00%	-	-	-	24.993.750.000	24.993.750.000
Bunga mengambang						
Bank	0,50% - 0,75%	33.615.606	-	-	-	33.615.606
Tanpa bunga						
Piutang DPP	-	9.327.137	-	-	-	9.327.137
Piutang bunga	-	929.991.746	-	-	-	929.991.746
Liabilitas Keuangan						
Tanpa bunga						
Beban akrual	-	3.504.066.704	-	-	-	3.504.066.704
2018						
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang (%)	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Diatas lima tahun	Jumlah
Aset Keuangan						
Bunga tetap						
Deposito berjangka	7,75% - 8,00%	-	129.260.443.698	-	-	129.260.443.698
Surat Berharga Negara	7,00%	-	33.129.350.000	-	-	33.129.350.000
Bunga mengambang						
Bank	0,50% - 0,75%	21.729.174	-	-	-	21.729.174
Tanpa bunga						
Piutang bunga	-	856.425.261	-	-	-	856.425.261
Liabilitas Keuangan						
Tanpa bunga						
Beban akrual	-	2.569.818.043	-	-	-	2.569.818.043

c. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dengan syarat dan kondisi standard dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar dinyatakan berdasarkan referensi harga pasar dari Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.
- Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Dana Perlindungan Pemodal mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- a) Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat1);

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak- dapat diobservasi) (tingkat 3).

Berdasarkan analisa atas hierarki nilai wajar atas aset keuangan DPP yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan tersedia untuk dijual harga kuotasiannya berada dalam pasar aktif atau memiliki tingkat 1.

14. Peristiwa setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 24 Januari 2020, seluruh aset keuangan yang tersedia untuk dijual yaitu SBN FR0059 telah dijual pada harga 102,10% dari nilai nominal atau sejumlah Rp25.525.000.000. Dari hasil penjualan tersebut DPP mencatat keuntungan atas penjualan sebesar Rp531.250.000.

Seluruh penerimaan dari penjualan Surat Berharga tersebut kemudian ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pelepasan tersebut mengacu kepada hasil keputusan rapat komite investasi tanggal 28 November 2019 yang menyatakan pelepasan Surat Berharga jika harga pasar berada pada tingkat 102% atau lebih dari nilai nominal Surat Berharga.

15. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020.



LAPORAN KEUANGAN P3IEI

Laporan Keuangan / Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Ignatius Girendroheru |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Sekolah Duta I/7 RT/RW 001/014
Pondok Pinang – Kebayoran Lama
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon | : | 08164819879 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Widodo |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Komp Gaya Motor RT/RW 004/008
Semper Timur Cilincing
Jakarta Utara |
| Nomor telepon | : | 081284828261 |
| Jabatan | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI);
2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Februari 2020

  Ignatius Girendroheru Direktur Utama	 Widodo Direktur
--	--

Nomor : 00051/2.0459/AU.1/05/1107-2/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Heliantono & Rekan



Sultana Amri

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1107

Jakarta, 18 Februari 2020

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	5	5.614.433.772	1.078.475.075
Piutang usaha	6	3.504.066.704	2.569.818.043
Piutang lain-lain	7	2.009.411.588	1.901.849.951
Aset keuangan lainnya	8	35.767.250.000	39.344.900.000
Biaya dibayar dimuka	9	1.213.921.625	303.668.625
Uang muka dan jaminan		34.950.000	34.950.000
Jumlah Aset Lancar		48.144.033.689	45.233.661.694
Aset Tidak Lancar			
Cadangan ganti rugi pemodal	10	157.169.300.000	146.869.995.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.770.659.734 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp1.520.636.549 pada tanggal 31 Desember 2018	11	688.818.483	635.826.985
Jumlah Aset Tidak Lancar		157.858.118.483	147.505.821.985
JUMLAH ASET		206.002.152.172	192.739.483.679
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang pajak	12	103.883.653	214.521.682
Utang lain-lain		9.062.969	51.445.515
Beban akrual	13	1.389.053.850	2.316.241.825
Utang kepada pihak berelasi	24	2.979.155	2.979.155
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.504.979.626	2.585.188.177
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang kepada pihak berelasi	24	150.000.000.000	150.000.000.000
Cadangan imbalan kerja	23	64.291.968	17.915.946
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		150.064.291.968	150.017.915.946
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1 juta per saham			
Modal dasar - 120.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 60.000 saham	14	60.000.000.000	60.000.000.000
Defisit		(5.567.119.422)	(19.863.620.444)
Jumlah Ekuitas		54.432.880.578	40.136.379.556
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		206.002.152.172	192.739.483.679

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Pendapatan bunga	15	11.931.148.459	10.871.618.586
Pendapatan jasa	16	3.504.066.704	2.569.818.043
Jumlah Pendapatan		15.435.215.163	13.441.436.629
Beban Usaha			
Beban gaji dan tunjangan	17	10.398.305.821	10.538.446.943
Beban administrasi	18	1.197.631.390	1.090.847.984
Beban penyempurnaan dan sosialisasi	19	1.133.975.986	742.301.118
Beban penyusutan	11	250.023.185	263.990.917
Beban pendidikan dan pelatihan	20	202.127.426	191.302.058
Beban konsultan	21	167.436.711	182.780.159
Lainnya		64.470.926	46.836.043
Jumlah Beban Usaha		13.413.971.444	13.056.505.222
LABA SEBELUM PAJAK		2.021.243.719	384.931.407
BEBAN PAJAK	22	(17.520.334)	(225.195.337)
LABA TAHUN BERJALAN		2.003.723.385	159.736.070
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(128.877.363)	3.058.625
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Laba (rugi) belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek utang tersedia untuk dijual		12.421.655.000	(8.121.498.400)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		12.292.777.637	(8.118.439.775)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		14.296.501.022	(7.958.703.705)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Defisit</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2018	60.000.000.000	(11.904.916.739)	48.095.083.261
Laba tahun berjalan	-	159.736.070	159.736.070
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	(8.118.439.775)	(8.118.439.775)
Saldo per 31 Desember 2018	60.000.000.000	(19.863.620.444)	40.136.379.556
Laba tahun berjalan	-	2.003.723.385	2.003.723.385
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	12.292.777.637	12.292.777.637
Saldo per 31 Desember 2019	60.000.000.000	(5.567.119.422)	54.432.880.578

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari jasa pengelolaan investasi		
Dana perlindungan pemodal	2.569.818.043	2.246.184.885
Penerimaan dari penghasilan bunga	11.823.586.822	9.989.774.137
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada		
Direksi dan karyawan	(10.480.807.162)	(8.811.958.729)
Pembayaran pajak penghasilan	(128.158.363)	(19.262.478)
Pembayaran untuk beban Usaha dan		
Aktivitas operasi lainnya	(4.645.465.960)	(2.122.735.258)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas Operasi	(861.026.620)	1.282.002.557
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(303.014.683)	(294.854.021)
Pembelian aset keuangan lainnya	-	(10.700.000.000)
Pencairan aset keuangan lainnya	5.700.000.000	-
Pembelian obligasi korporasi CGRP	(20.000.000.000)	(95.000.000.000)
Pencairan deposito berjangka CGRP	20.000.000.000	75.000.000.000
Pencairan obligasi korporasi CGRP	-	20.016.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk)		
Aktivitas Investasi	5.396.985.317	(10.978.854.021)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Setoran Modal	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH		
KAS DAN SETARA KAS	4.535.958.697	(9.696.851.464)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.078.475.075	10.775.326.539
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5.614.433.772	1.078.475.075

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 April 2017, dari Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta tentang peningkatan modal disetor, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0009531.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 April 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 26). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk :

1. Menata usahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 13 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Komisaris Utama	Dewi Arum P.	Bacellius Ruru
Komisaris	Roni Gunardi	Hari Purwantono
Direktur Utama	Ignatius Girendroheru	Ignatius Girendroheru
Direktur	Widodo	Widodo

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

a. Amandemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Amandemen/penyesuaian dan Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis.
- Amandemen PSAK 24, Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.
- PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman.
- PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan.
- PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama.
- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka, dan;
- ISAK 34 Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Penerapan amandemen/penyesuaian PSAK diatas tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

b. Standar amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 71, Instrumen Keuangan,
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif,
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan
- PSAK 73, Sewa.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual basis dengan menggunakan biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Nilai historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dalam mata uang asing

Laporan keuangan dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional (mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi) Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan Perusahaan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS).
- Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Aset Keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Obligasi milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi di ekuitas sebagai revaluasi investasi AFS, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklasifikasi ke laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan termasuk beban akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Peralatan dan system komputer	4
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Beban kontribusi Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Imbalan Pasca-Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasti pasca kerja tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- i. biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- ii. beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- iii. pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

4. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 11.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskontodan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataanya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23.

5. Kas dan Setara Kas

	2019	2018
Kas	262.374	1.546.574
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	343.792.435	1.028.385.511
PT Bank Permata, Tbk	37.463.687	29.510.856
PT Bank Bukopin, Tbk	18.315.592	19.032.134
PT Bank Mandiri, Tbk	14.599.684	-
Deposito berjangka		
PT Bank Bukopin, Tbk	5.200.000.000	-
Jumlah kas dan setara kas	5.614.433.772	1.078.475.075
Tingkat bunga per tahun	7,95%	-
Jangka waktu deposito berjangka	1 Bulan	-

6. Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang atas pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

7. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan piutang bunga atas pengelolaan deposito berjangka dan obligasi.

8. Aset Keuangan Lainnya

	2019	2018
Deposito berjangka	-	5.700.000.000
Aset tersedia untuk dijual:		
Obligasi korporasi	35.767.250.000	33.644.900.000
Jumlah	35.767.250.000	39.344.900.000
Tingkat bunga deposito berjangka/ tahun	-	8,00%
Jangka waktu deposito berjangka	-	3 bulan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp767.250.000 dan Rp(1.355.100.000) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

2019				
Obligasi	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
Obligasi Korporasi				
PNMP02BCN1	15.000.000.000	15.223.695.000	9,25	12-07-2022
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.217.050.000	9,75	12-12-2024
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.046.785.000	9,90	06-12-2024
ISAT02ECN1	5.000.000.000	5.308.255.000	9,25	31-05-2027
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	4.971.465.000	9,50	03-07-2025
Jumlah	35.000.000.000	35.767.250.000		

2018				
Obligasi	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
Obligasi Korporasi				
PNMP02BCN1	15.000.000.000	14.343.270.000	9,25	12-07-2022
TPIA01CCN1	5.000.000.000	4.890.790.000	9,75	12-12-2024
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	4.746.320.000	9,90	06-12-2024
ISAT02ECN1	5.000.000.000	4.917.270.000	9,25	31-05-2027
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	4.747.250.000	9,50	03-07-2025
Jumlah	35.000.000.000	33.644.900.000		

9. Biaya dibayar di Muka

	2019	2018
Tunjangan personalia	1.170.000.000	300.000.000
Lainnya	43.921.625	3.668.625
Jumlah	1.213.921.625	303.668.625

10. Cadangan Ganti Rugi Pemodal

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Perusahaan, sebagai cadangan ganti rugi pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000. Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat berharga negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Penempatan CGRP adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Deposito berjangka	10.000.000.000	30.000.000.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Obligasi Korporasi	147.169.300.000	116.869.995.000
Jumlah	157.169.300.000	146.869.995.000

Rincian CGRP adalah sebagai berikut:

Deposito Berjangka

	2019	2018
Rupiah		
PT Bank Bukopin, Tbk	10.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	10.000.000.000	30.000.000.000
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	7,95%	9,75%
Jangka waktu	3 Bulan	3 Bulan

Tersedia untuk Dijual

Biaya perolehan Obligasi Korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp140.000.000.000 dan Rp120.000.000.000.

Nilai wajar Obligasi Korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.

2019				
Obligasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
		Rp	%	
Obligasi Korporasi				
ISAT02ECN3	40.000.000.000	40.845.800.000	8,70	03-05-2028
ISAT02ECN1	25.000.000.000	26.541.275.000	9,25	31-05-2027
BEXI03ECN4	20.000.000.000	21.391.100.000	9,40	23-02-2027
BEXI03DCN3	20.000.000.000	21.705.100.000	9,75	08-11-2025
PIKI01C	15.000.000.000	15.405.570.000	9,35	04-07-2028
PPLN03CCN3	11.000.000.000	11.751.300.000	9,35	19-02-2026
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.529.155.000	9,25	12-02-2024
Jumlah	140.000.000.000	147.169.300.000		

2018				
Obligasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo
	Rp	Rp	%	
Obligasi Korporasi				
ISAT02ECN3	40.000.000.000	37.891.120.000	8,70	03-05-2028
ISAT02ECN1	25.000.000.000	24.586.350.000	9,25	31-05-2027
BEXI03ECN4	20.000.000.000	19.852.980.000	9,40	23-02-2027
BEXI03DCN3	20.000.000.000	20.267.540.000	9,75	08-11-2025
PIKI01C	15.000.000.000	14.272.095.000	9,35	04-07-2028
Jumlah	120.000.000.000	116.870.085.000		

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

11. Aset Tetap

	2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	1.561.226.877	176.064.683	-	1.737.291.560
Peralatan dan perabotan kantor	595.236.657	126.950.000	-	722.186.657
Jumlah	2.156.463.535	303.014.683	-	2.459.478.218
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	1.094.536.843	171.901.548	-	1.266.438.390
Peralatan dan perabotan kantor	426.099.707	78.121.637	-	504.221.343
Jumlah	1.520.636.549	250.023.185	-	1.770.659.734
Nilai Tercatat	635.826.985			688.818.483

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	1.377.522.856	183.704.021	-	1.561.226.877
Peralatan dan perabotan kantor	484.086.657	111.150.000	-	595.236.657
Jumlah	1.861.609.514	294.854.021	-	2.156.463.535
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	897.300.724	197.236.119	-	1.094.536.843
Peralatan dan perabotan kantor	359.344.909	66.754.798	-	426.099.707
Jumlah	1.256.645.632	263.990.917	-	1.520.636.549
Nilai Tercatat	604.963.882			635.826.985

Beban penyusutan adalah Rp250.023.185 dan Rp263.990.917 masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

12. Utang Pajak

	2019	2018
Pajak penghasilan		
Pasal 21	66.352.095	179.922.786
Pasal 23	36.059.548	33.269.098
PP 46/PP 23	1.472.010	1.329.798
Jumlah	103.883.653	214.521.682

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Beban Akruai

	2019	2018
Tunjangan personalia	1.239.404.849	2.129.068.190
Lainnya	100.994.192	93.349.747
Jasa konsultan dan profesi	48.654.809	93.823.888
Jumlah	1.389.053.850	2.316.241.825

14. Modal Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	2019 dan 2018	Jumlah modal disetor
		Presentase kepemilikan (%)	
PT Bursa Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
PT Kliring Penjamin Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
Jumlah	60.000	100,00	60.000.000.000

15. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito, kupon obligasi dan jasa giro.

16. Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Modal.

17. Gaji dan Tunjangan

	2019	2018
Karyawan		
Gaji	1.180.491.728	1.117.151.717
Tunjangan	2.343.864.075	2.539.626.581
Direksi		
Gaji	2.099.823.791	1.953.324.456
Tunjangan	3.751.808.970	3.755.398.662
Dewan Komisaris		
Honorarium	428.973.570	585.997.344
Tunjangan	593.343.687	586.948.182
Jumlah	10.398.305.821	10.538.446.943

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Beban Administrasi

	2019	2018
Keperluan kantor	746.319.141	641.449.910
Telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya	183.305.103	192.093.371
Sewa	155.701.973	154.081.123
Asuransi	75.000.000	75.000.000
Rapat	36.625.173	24.100.580
Pemeliharaan	680.000	4.123.000
Jumlah	1.197.631.390	1.090.847.984

19. Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

	2019	2018
Sosialisasi dan publikasi	884.252.816	586.312.066
Pengembangan anggota dana perlindungan pemodal	174.723.170	155.989.052
Cadangan Penanganan Klaim	75.000.000	-
Jumlah	1.133.975.986	742.301.118

20. Pendidikan dan Pelatihan

	2019	2018
Seminar/workshop dalam negeri	95.351.950	33.696.700
Inhouse training	35.647.841	68.831.593
Akomodasi pelatihan	34.201.635	15.384.615
Seminar/workshop luar negeri	32.750.000	3.576.000
Pustaka	4.176.000	68.323.750
Jumlah	202.127.426	191.302.058

21. Beban Konsultan

	2019	2018
Akuntan Publik/Perpajakan	89.250.000	152.917.339
Konsultan Hukum/Notaris	25.641.025	20.512.820
Lainnya	52.545.686	9.350.000
Jumlah	167.436.711	182.780.159

22. Pajak Penghasilan

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2019	2018
Pajak kini	17.520.334	18.694.731
Pajak tangguhan	-	206.500.606
Beban pajak penghasilan	17.520.334	225.195.337

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan	3.504.066.704	2.569.818.043
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku:		
PP 46 (1%)	-	11.691.278
PP 23 (0,5%)	17.520.334	7.003.453
Jumlah beban pajak kini	17.520.334	18.694.731
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka	(16.048.324)	(17.364.933)
Pajak Penghasilan kurang bayar (Catatan 12)	1.472.010	1.329.798

Pajak Kini

2019

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP23), Perusahaan memenuhi kriteria wajib pajak sesuai PP23, oleh karenanya Perusahaan menerapkan PP23 dalam menghitung pajak penghasilan badannya sejak PP23 berlaku yaitu 1 Juli 2018. Di bawah ini perhitungan pajak per 31 Desember 2019 dengan menggunakan tarif pajak 0,5%:

2018

Pada tanggal 6 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait Pajak Penghasilan Perusahaan dimana Perusahaan dikenakan pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP46). Perusahaan memenuhi kriteria wajib pajak sesuai PP 46, oleh karena itu, Perusahaan baru menerapkan PP46 dalam menghitung pajak penghasilan badannya sejak Desember 2017.

23. Imbalan Kerja

Program pensiun iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Jumlah karyawan yang berhak atas program ini masing masing 11 karyawan masing-masing per 31 Desember 2019 dan 2018. Beban pensiun iuran pasti Perusahaan masing-masing sebesar Rp99.804.463 dan Rp118.629.760 pada tahun 2019 dan 2018.

Imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003. kekurangan imbalan yang diberikan dan program pensiun dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasca kerja tanpa pendanaan.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing masing adalah 11 karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap resiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbalan hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja imbalan pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2019	2018
Diakui pada laba rugi		
Biaya jasa kini	90.934.279	74.714.201
Biaya bunga neto	3.406.029	18.515.254
Lainnya	(176.841.649)	-
	(82.501.341)	93.229.455
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:		
Pengakuan kembali liabilitas imbalan pasti neto:		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(7.464.122)	28.151.488
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian	(28.849.273)	(55.999.137)
Lainnya	165.190.758	12.112.270
	128.877.363	(15.735.379)
Jumlah	46.376.022	77.494.076

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Liabilitas imbalan pasti - awal tahun	17.915.946	63.133.774
Biaya jasa kini	90.934.279	74.714.201
Beban bunga	3.406.029	18.515.254
Lainnya	(176.841.649)	(122.711.904)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(7.464.122)	28.151.488
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian	(28.849.273)	(55.999.137)
Kerugian aktuarial lainnya	165.190.758	12.112.270
Liabilitas imbalan pasti - akhir tahun	64.291.968	17.915.946

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dilakukan oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra (d/h PT Gemma Mulia Inditama).

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja karyawan:

	2019	2018
Tingkat diskonto	7,78%	8,7%
Tingkat kenaikan gaji	10%/ Tahun	10%/ Tahun
Tingkat kematian	TMI IV	TMI III
Tingkat kecacatan	10% TMI IV	10% TMI III
Usia pensiun normal	56	56
Tingkat pengunduran diri	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1%	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1%
Metode Aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

	2019	2018
Tingkat diskonto:		
Kenaikan 1%	(76.100.113)	(42.418.437)
Penurunan 1%	110.422.802	52.137.615
Tingkat kenaikan gaji:		
Kenaikan 1%	109.430.348	49.970.105
Penurunan 1%	(76.516.858)	(41.656.401)

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan aktual atas kewajiban imbalan pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

Durasi kewajiban untuk imbalan pasca kerja imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing 23,13 tahun dan 23,51 tahun.

24. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut, antara lain:

	2019	2018
Gaji/honorarium	2.343.839.125	2.539.321.800
Tunjangan	4.345.152.657	4.342.346.844
Jumlah	6.688.991.782	6.881.668.644

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan CGRP antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perusahaan No.SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No.PJ-029/KPEI/0815; No.SP-0102/DIR/KSEI/0815; dan No.SP-003/P3IEI-OP11/0815, masing-masing pihak menyetujui untuk menyediakan dana kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Penggunaan atas CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal sesuai dengan persetujuan OJK apabila Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP dengan memindahkan CGRP ke Dana Perlindungan Pemodal dan akan mengurangi jumlah pinjaman Perusahaan kepada masing-masing pihak secara prorata.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP tersebut dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas dana CGRP tersebut. Perusahaan membukukan seluruh Dana CGRP sebagai utang jangka panjang kepada pihak berelasi.

Berdasarkan addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216; No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add-010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OP11/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pemodal pada SBN, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu pada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PEFINDO.

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali CGRP Pemodal yang telah disetorkan SRO kepada Perusahaan, dan Perusahaan berkewajiban mengembalikan CGRP kepada SRO, apabila telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian atau Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola dan di tatausahakan Perusahaan, Perusahaan telah mencapai paling sedikit Rp2.000.000.000.000, mana yang lebih dulu tercapai.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi CGRP untuk tahun 2016. Berikutnya Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan CGRP dikembalikan kepada SRO. Perusahaan telah membayarkan imbal hasil kepada SRO sebesar Rp2.420.000.000 dan sebesar Rp2.200.000.000 pada tahun 2019 dan 2018.

- c. Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki utang kepada pihak berelasi atas biaya listrik kepada PT Bursa Efek Indonesia masing-masing sebesar Rp2.979.155.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

25. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 14), tambahan modal disetor dan akumulasi defisit.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan reviu performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Aset keuangan lainnya	35.767.500.000	33.644.900.000
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	147.169.300.000	116.869.995.000
Jumlah	182.936.800.000	150.514.895.000
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Pinjaman dan piutang		
Kas dan setara kas	5.614.171.398	1.076.928.501
Aset keuangan lainnya	-	5.700.000.000
Piutang usaha	3.504.066.704	2.569.818.043
Piutang lain-lain	2.009.411.588	1.901.849.951
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	10.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	21.127.649.690	41.248.596.495
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Utang lain-lain	9.062.696	51.445.515
Beban akrual	1.389.053.850	2.316.241.825
Utang kepada pihak berelasi	150.002.979.155	150.002.979.155
Jumlah	151.401.095.701	152.370.666.495

Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan terutama diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan meminimalkan risiko kredit tersebut dengan melakukan analisis atas pemilihan alternatif lembaga keuangan penerbit investasi dan penetapan komposisi penempatan investasi. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5). Untuk piutang usaha dilakukan dengan pihak berelasi dan memiliki risiko kredit yang minimum (Catatan 6).

Manajemen risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

	2019			
	Bunga Mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Tersedia untuk dijual				
Aset Keuangan lainnya	-	35.767.500.000	-	35.767.500.000
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	-	147.169.300.000	-	147.169.300.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang				
Setara kas	5.614.171.398	-	-	5.614.171.398
Piutang usaha	-	-	3.504.066.704	3.504.066.704
Piutang lain-lain	-	-	2.009.411.588	2.009.411.588
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
Liabilitas keuangan pada				
Biaya Perolehan diamortisasi				
Beban Akrua	-	-	1.389.053.850	1.389.053.850
Utang lain-lain	-	-	9.062.969.00	9.062.969
Utang kepada pihak berelasi	-	150.000.000.000	2.979.155	150.002.979.155
2018				
	Bunga Mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Tersedia untuk di				
Aset Keuangan lainnya	-	33.644.900.000	-	33.644.900.000
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	-	116.869.995.000	-	116.869.995.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang				
Setara kas	1.076.928.501	-	-	1.076.928.501
Aset keuangan lainnya	5.700.000.000	-	-	5.700.000.000
Piutang usaha	-	-	2.569.818.043	2.569.818.043
Piutang lain-lain	-	-	1.901.849.951	1.901.849.951
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
Liabilitas keuangan pada				
Biaya Perolehan diamortisasi				
Beban Akrua	-	-	2.316.241.825	2.316.241.825
Utang lain-lain	-	-	51.445.515	51.445.515
Utang kepada pihak berelasi	-	150.000.000.000	2.979.155	150.002.979.155

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp485.509.714 dan Rp367.769.285.

Risiko harga lain

Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar lain terkait investasi tersedia untuk dijual. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Perusahaan mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan yang ditentukan dalam kebijakan investasi Perusahaan seperti rating obligasi korporasi (minimal AA) dan batas minimum *asset under management* manajer investasi sebesar Rp5 Triliun. Kebijakan tersebut juga mengatur pengawasan terhadap pergerakan dari investasi efek tersebut.

Analisa sensitivitas berikut ini ditentukan berdasarkan eksposur resiko harga obligasi pada akhir periode pelaporan.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika terjadi kenaikan (penurunan) 5% harga efek sebagai akibat perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual, revaluasi investasi efek tersedia untuk dijual pada bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing akan mengalami kenaikan (penurunan) sebesar Rp9.146.840.000 dan Rp7.750.000.000.

Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Perusahaan dan pendanaan jangka pendek – menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan sisa jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tidak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut, dan berdasarkan arus kas yang tidak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Perusahaan dapat diminta untuk dibayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Dicantumkannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Perusahaan dimana likuiditas dikelola berdasarkan aset dan liabilitas bersih.

2019					
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang (%)	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Jumlah
Tersedia untuk dijual					
Aset keuangan lainnya	9,25 - 9,90%	-	35.767.500.000	-	35.767.500.000
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	8,70 - 9,75%	-	147.169.300.000	-	147.169.300.000
Pinjaman yang diberikan dan piutang					
Setara kas	2%	5.614.171.398	-	-	5.614.171.398
Piutang usaha	-	3.504.066.704	-	-	3.504.066.704
Piutang lain-lain	-	2.009.066.588	-	-	2.009.066.588
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	7,95%	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Jumlah aset keuangan		11.127.304.690	192.936.800.000	-	204.064.104.690
Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					
Beban akrual	-	1.389.053.850	-	-	1.389.053.850
Utang kepada pihak berelasi	1,6%	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000
Jumlah liabilitas keuangan		-	-	-	151.389.053.850
2018					
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang (%)	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Jumlah
Tersedia untuk dijual					
Aset keuangan lainnya	9,25%-9,90%	-	34.347.743.750	-	34.347.743.750
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	8,70%-9,75%	-	119.212.897.500	-	119.212.897.500
Pinjaman yang diberikan dan piutang					
Setara kas	2,00%	1.078.642.477	-	-	1.078.642.477
Aset keuangan lainnya	8,00%	-	5.762.965.479	-	5.762.965.479
Piutang usaha	-	2.569.818.043	-	-	2.569.818.043
Piutang lain-lain	-	1.901.849.951	-	-	1.901.849.951
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	9,75%	-	30.198.739.726	-	30.198.739.726
Jumlah aset keuangan		5.550.310.471	189.522.346.455	-	195.072.656.926
Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					
Beban akrual	-	2.316.241.825	-	-	2.316.241.825
Utang lain-lain	-	51.445.515	-	-	51.445.515
Utang kepada pihak berelasi	1,60%	2.420.000.001	-	159.680.000.001	162.100.000.002
Jumlah liabilitas keuangan		4.787.687.341	-	159.680.000.001	164.467.687.342

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dengan syarat dan kondisi standard dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar dinyatakan berdasarkan referensi harga pasar dari PHEI pada tanggal pelaporan.
- Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak- dapat diobservasi) (tingkat 3).

Berdasarkan analisa atas hierarki nilai wajar atas aset keuangan Perusahaan yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan tersedia untuk dijual harga kuotasianya berada dalam pasar aktif atau memiliki tingkat 1.

26. Dana Perlindungan Pemodal

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Bank	33.615.606	21.729.174
Deposito berjangka	166.631.206.602	129.260.443.698
Surat Berharga Negara	24.993.750.000	33.129.350.000
Piutang bunga	920.991.746	856.425.261
Piutang luran Dana Perlindungan Pemodal	9.327.137	-
Liabilitas	(3.504.066.704)	(2.569.818.043)
Aset bersih	189.084.824.388	160.698.130.090

27. Kondisi Usaha

Perusahaan mengalami akumulasi defisit masing-masing sebesar Rp5.567.119.422 dan Rp19.863.620.444 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Kerugian dan defisit disebabkan penerimaan Perusahaan belum cukup untuk menutupi beban yang terjadi. Saat ini pendapatan utama Perusahaan berasal dari jasa pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal dan penghasilan bunga.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen mempunyai keyakinan terhadap prospek bisnis di masa mendatang dan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi Perusahaan sebagai satu-satunya institusi yang menyelenggarakan program perlindungan kepada pemodal di pasar modal Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga mempunyai pemegang saham yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan SRO di pasar modal.

28. Peristiwa setelah periode pelaporan

Pada tanggal 24 Januari 2020 melalui surat dari para pemegang saham no.S-00334/BEI.CSS/01-2020, KPEI-0048/DIR/0120, KSEI-0517/DIR/0120 dinyatakan kepada Perusahaan bahwa para pemegang saham yaitu BEI, KPEI dan KSEI (SRO) telah menyetujui rencana konversi utang Perusahaan yang berupa dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) menjadi modal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Selanjutnya para pemegang saham meminta kepada Perusahaan untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan agar konversi utang CGRP tersebut dapat terlaksana. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, manajemen masih dalam proses tindak lanjut pelaksanaan konversi utang tersebut.

29. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2020.



Kriteria Annual Report Award

Kriteria & Penjelasan

Checklist

Criteria & Explanation

UMUM. General

1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	■	1. The annual report is presented in good and correct Indonesian and is recommended to present also in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	■	2. The annual report is printed in good quality and uses type and font size that is easy to read
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	■	3. The annual report clearly identifies the company
4. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: → Sampul muka; → Samping; → Sampul belakang; dan → Setiap halaman.	■	4. Company name and annual report year are displayed at: → Front cover; → Side by side; → Back cover; and → Every page.
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	■	5. Annual reports are displayed on the company's website. Includes the latest annual reports and at least the last 4 years.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING. Summary of Important Financial Data

1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi tersebut memuat antara lain; → Penjualan/pendapatan usaha; → Laba (rugi); → Penghasilan komprehensif periode berjalan; → Laba (rugi) per saham.	■	1. Information on the results of a company's operations in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting his business if the company carries on business for less than 3 (three) years. The information includes, among others; → Sales / business revenue; → Profit (loss); → Comprehensive income for the period; → Earnings (losses) per share.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi tersebut memuat antara lain; → Jumlah investasi pada entitas asosiasi; → Jumlah aset; → Jumlah liabilitas; dan → Jumlah ekuitas.	■	2. Information on the company's financial position in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the company carries on business for less than 3 (three) years. The information includes, among others; → Total investment in associates; → Total assets; → Total liabilities; and → Amount of equity.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	■	3. Financial ratios in the form of comparisons for 3 (three) financial years or since starting their business if the company carries on business for less than 3 (three) years. Information contains 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the company's industry.
4. → Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik → Jumlah saham yang beredar; → Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: Kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah → Informasi dalam bentuk grafik yang memuat: Harga penutupan, volume perdagangan <i>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</i>	■	4. → Stock price information in tabular and graphical form → Number of shares outstanding; → Information in tabular form that contains: Market capitalization, highest, lowest share prices → Graphical information containing: Closing price, trading volume <i>Note: if the company does not have market capitalization, stock price information, and trading volume of shares, please disclose it.</i>
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</i>	■	5. Information regarding bonds, sukuk or convertible bonds that are still circulating in the last 2 (two) financial years <i>Note: if the company does not have bonds / sukuk / convertible bonds, please disclose it.</i>

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI. Board of Commissioners and Board of Directors' Report

1. Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: → Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; → Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; → Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan → Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	■	1. Report of the Board of Commissioners Contains the following items: → Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the company and the basis for its assessment; → A view of the company's business prospects compiled by the Directors and the basis for their consideration; → A view of the application / management of the whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and → Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.
2. Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: → Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • kebijakan strategis; • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; → Analisis tentang prospek usaha; → Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan → Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	■	2. Directors' Report Contains the following items: → Analysis of the company's performance, which includes: • strategic policy; • a comparison between results achieved and targets; and • the constraints faced by the company and the steps for its resolution; → Analysis of business prospects; → The development of the application of corporate governance in the financial year; and → Changes in the composition of members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.

Kriteria & Penjelasan

Checklist

Criteria & Explanation

3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;
- Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;
- Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan
- Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

**3. Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors**

Contains the following items:

- Signatures are written on individual sheets;
- A statement that the Board of Commissioners and Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;
- Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and positions; and
- A written explanation in a separate letter from the relevant party in case there are members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors who have not signed the annual report, or written explanations in a separate letter from other members in the event that there is no written explanation from the person concerned.

PROFIL PERUSAHAAN. Company Profile**1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.****1. Full name and address of the company Information includes, among others: name and address, postal code, no. Tel, no. Fax, email and website.****2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.****2. Brief company history Includes among others: date / year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.****3. Bidang usaha**

Uraian mengenai antara lain:

- Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;
- Kegiatan usaha yang dijalankan; dan
- Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

**3. Business field**

Descriptions of include:

- Business activities of the company according to the latest articles of association;
- Business Activities Undertaken; and
- Products and / or services produced.

4. Struktur Organisasi

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.

**4. Organizational Structure**

In the form of a chart, covering names and positions of at least up to one level below the Board of Directors.

5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Mencakup:

- Visi perusahaan;
- Misi perusahaan;
- Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan
- Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan

5. Company Vision, Mission, and Culture

Includes:

- Company vision;
- Company mission;
- Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Directors / Board of Commissioners in the financial year; and
- Statement about the corporate culture of the company

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: → Nama; → Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); → Umur; → Domisili; → Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); → Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan → Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	■	6. Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners Information includes: → Name; → Position and term of office (including positions in other companies or institutions); → Age; → Domicile; → Education (Field of Study and Educational Institutions); → Work experience (Position, Institution, and Serving Period); and → History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since it was first appointed.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: → Nama; → Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); → Umur; → Domisili; → Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); → Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan → Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	■	7. Identity and brief life history of members of the Board of Directors Information includes: → Name; → Position and term of office (including positions in other companies or institutions); → Age; → Domicile; → Education (Field of Study and Educational Institutions); → Work experience (Position, Institution, and Serving Period); and → History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since it was first appointed.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	■	8. Number of employees (comparative 2 years) and employee competency development data that reflects opportunities for each level of the organization Information includes: a. Number of employees for each level of organization; b. Number of employees for each level of education; c. Number of employees based on employment status; d. Data on employee competency development that has been carried out in the financial year consisting of parties (position level) who attended the training, type of training, and training objectives; and e. Costs for developing employee competencies that have been incurred in the financial year.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
9. Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain: → Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; → Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: → Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan → Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. → Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <i>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</i>	■	9. Composition of Shareholders Includes among others: → Details of the names of shareholders which include the 20 largest shareholders and the percentage of ownership; → Details of shareholders and percentage of ownership include: → Names of shareholders who own 5% or more shares; and → Groups of public shareholders with less than 5% ownership. → Names of Directors and Commissioners and percentage of share ownership directly and indirectly. <i>Note: if the Director and Commissioner do not have direct or indirect shares, please disclose it.</i>
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: → Nama entitas anak dan/atau asosiasi; → Persentase kepemilikan saham; → Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan → Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	<i>Tidak ada entitas anak</i>	10. List of subsidiaries and / or associates In the form of a table containing information including: → Names of subsidiaries and / or associates; → Percentage of share ownership; → Information about the line of business of the subsidiary → and / or associates; and → Information on the operational status of subsidiaries and / or associates (operating or not yet operating).
11. Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	<i>Perusahaan tidak berbentuk grup</i>	11. Company group structure Company group structure in the form of a chart that depicts a parent, subsidiary, associate, joint venture and special purpose vehicle (SPV).
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: → Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); → Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan → Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <i>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</i>	<i>Tidak menerbitkan saham</i>	12. Chronology of share issuance (including private placement) and / or listing of shares from the beginning of the issuance until the end of the financial year Includes among others: → Year of issue of shares, number of shares, nominal value of shares, and share price for each corporate action; → Number of shares listed after each corporate action; and → Name of the exchange where the company's shares are listed. <i>Note: if the company does not have a chronology of the listing of shares, it must be disclosed.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: → Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; → Nilai penawaran efek lainnya; → Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan → Peringkat efek. <i>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan</i>	<i>Tidak menerbitkan dan/atau mencatat efek</i>	13. Chronology of issuance and / or recording of other securities from the beginning of the issuance until the end of the financial year Includes among others: → Name of other securities, year of issuance of other securities, interest rates / other securities rewards, and other securities maturity dates; → Value of other securities offering; → Name of the exchange where other securities are listed; and → Rating effects. <i>Note: if the company does not have a chronology of issuance and listing of other securities, so that it is disclosed</i>
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain: → Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; → Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan → Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.		14. Name and address of supporting institutions and / or professions Information includes: → Name and address of Registrar / party administering company shares; → Name and address of the Public Accounting Firm; and → Name and address of the rating agency.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: → Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; → Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; → Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan → Masa berlaku (untuk sertifikasi).	<i>Tidak menerima penghargaan</i>	15. Awards received in the last financial year and / or certifications that are still valid in the last financial year whether on a national or international scale Information includes: → Name of award and / or certification; → Years of awards and / or certifications; → Awarding and / or certifying bodies; and → Validity period (for certification).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: → Nama dan alamat entitas anak; dan → Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <i>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan</i>	<i>Tidak ada entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan</i>	16. Names and addresses of subsidiaries and / or branch offices or representative offices (if any) Loading information including: → Names and addresses of subsidiaries; and → Name and address of the branch / representative office. <i>Note: if the company does not have subsidiaries, branch offices and representative offices, it must be disclosed</i>

Kriteria & Penjelasan**Checklist****Criteria & Explanation****17. Informasi pada Website Perusahaan**

Meliputi paling kurang:

- a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
- b. Isi Kode Etik;
- c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS,
- d. dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;
- e. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
- f. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- g. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, dan Unit Audit Internal.

**17. Information on the Company Website**

Includes at least:

- a. Shareholder information up to individual final owners;
- b. Fill in the Code of Ethics;
- c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda material discussed in the GMS, summary of GMS minutes,
- d. and information on important dates, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS summons, the date of the GMS, the date of the summary of the minutes of a GMS announced;
- e. Separate annual financial statements (last 5 years);
- f. Profile of the Board of Commissioners and Directors; and
- g. Charter / Charter of the Board of Commissioners, Directors, Committees and Internal Audit Unit.

18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):

- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan

**18. Education and / or training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit**

Includes at least information (types and parties relevant to follow):

- Education and / or training for the Board of Commissioners;
- Education and / or training for Directors;
- Education and / or training for the Audit Committee;
- Education and / or training for the Nomination and Remuneration Committee;
- Education and / or training for Other Committees;
- Education and / or training for the Corporate Secretary; and
- Education and / or training for the Internal Audit Unit. followed in the financial year.

Note: if there is no education and / or training in the fiscal year, please disclose it

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
Analisis DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN. Management Discussion and Analysis of Company Performance		
1. Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: → Produksi; → Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; → Penjualan/pendapatan usaha; dan → Profitabilitas.		1. Overview of operations per business segment Contains descriptions of: a. Explanation of each business segment. b. Performance per business segment includes: → Production; → Increase / decrease in production capacity; → Sales / business revenue; and → Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: → Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; → Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; → Ekuitas; → Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan → Arus kas.		2. A description of the company's financial performance Financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of the increase / decrease in an account (in the form of narratives and tables), including among others: → Current assets, non-current assets, and total assets; → Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; → Equity; → Sales / operating revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period; and → Cash flow.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang: → Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan → Tingkat kolektibilitas piutang.		3. Discussion and analysis of the ability to pay debts and the level of collectibility of the company's receivables, by presenting relevant ratio calculations in accordance with the type of company industry Explanation of: → Ability to pay debts, both short term and long term; and → Receivable collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Penjelasan atas: → Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan → Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan → Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.		4. Discussion of capital structure and management policy on capital structure Explanation above: → Details of the capital structure (capital structure) consisting of interest-based debt / sukuk and equity; and → Management policies on capital structure (capital structure policies); and → Basis for the selection of management policies on capital structure.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: → Nama pihak yang melakukan ikatan; → Tujuan dari ikatan tersebut; → Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; → Mata uang yang menjadi denominasi; dan → Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <i>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</i>		5. Discussion of material commitments for investment in capital goods (not funding ties) in the last financial year Explanation of: → Names of the parties to the bond; → The purpose of the bond; → Sources of funds expected to fulfill these bonds; → Currency of denomination; and → Steps that are planned by the company to protect risks from the associated foreign currency positions. <i>Note: if the company does not have a bond related to investment of capital goods in the last fiscal year to be disclosed.</i>
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: → Jenis investasi barang modal; → Tujuan investasi barang modal; dan → Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <i>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</i>		6. Discussion on investment in capital goods which was realized in the last fiscal year Explanation of: → Types of investment in capital goods; → The purpose of investment in capital goods; and → The investment value of capital goods issued in the last financial year. <i>Note: if there is no investment realization of capital goods, please disclose it.</i>
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: → Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan → Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.		7. Comparative information between the target at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year regarding revenues, profits, and others deemed important to the company. Information includes: → Comparison between targets at the beginning of the financial year and the results achieved (realization); and → Targets or projections to be achieved in the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. <i>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</i>		8. Material information and facts that occur after the date of the accountant's report Description of important events after the date of the accountant's report including its impact on business performance and future risks. <i>Note: if there are no important events after the accountant's report date, please disclose it.</i>
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.		9. A description of the company's business prospects A description of the company's prospects related to industry and the economy in general accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
10. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/ atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	■	10. A description of the marketing aspects A description of the marketing aspects of the company's products and / or services, including marketing strategies and market share.
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian dividen; b. Total dividen yang dibagikan; c. Jumlah dividen kas per saham; d. Payout ratio; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. <i>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</i>	Perusahaan tidak membagi dividen	11. A description of the dividend policy and the amount of cash dividends per share and the amount of dividends per year announced or paid during the last 2 (two) financial years Contains descriptions of: a. Dividend distribution policy; b. Total dividends distributed; c. Amount of cash dividends per share; d. Payout ratio; and e. Date of announcement and payment of cash dividends. for each year. <i>Note: if there is no dividend distribution, the reasons must be disclosed.</i>
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; b. Jangka waktu; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga exercise. <i>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</i>	Tidak ada program ESOP	12. Employee and / or share ownership program by the company (ESOP / MSOP) that still exists until the financial year Contains descriptions of: a. Number of ESOP / MSOP shares and their realization; b. Period of time; c. Employee and / or management requirements entitled; and d. Price of exercise. <i>Note: if you do not have the intended program, please disclose it.</i>
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana; b. Rencana penggunaan dana; c. Rincian penggunaan dana; d. Saldo dana; dan e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <i>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</i>	Tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum,	13. Realization of the use of funds resulting from public offering (in the event that the company is still required to submit a report on the use of funds) Contains descriptions of: a. Total acquisition of funds; b. Planned use of funds; c. Details of the use of funds; d. Fund balance; and e. Date of AGM / RUPO approval of changes in use of funds (if any). <i>Note: if you do not have information on the use of proceeds from the public offering, please disclose it.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: - Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; - Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; - Alasan dilakukannya transaksi; - Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; - Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan - Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <i>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</i>	<i>Tidak memiliki transaksi yang mengandung</i>	14. Material transaction information that contains a conflict of interest and / or transaction with an affiliate Contains descriptions of: - Names of parties to the transaction and nature of the relationship affiliation; - A description of the reasonableness of the transaction; - The reason for the transaction; - Realization of transactions in the last fiscal year period; - Company policy related to the mechanism of review of transactions; and - Compliance with relevant rules and regulations. <i>Note: if you do not have the transaction, please disclose it.</i>
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang- undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: - Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan - Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <i>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</i>	<i>Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan</i>	15. A description of the changes in the legislation to the company in the last fiscal year The description includes: - Names of laws and regulations that have changed; and - Impact (quantitative and / or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact is not significant. <i>Note: if there are no changes in laws and regulations in the last financial year, please disclose it.</i>
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: - Perubahan kebijakan akuntansi; - Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan - Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <i>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</i>	<i>Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi</i>	16. Description of changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year The description includes: - Changes in accounting policies; - Reasons for changing accounting policies; and - The impact is quantitatively on the financial statements. <i>Note: if there are no changes in accounting policies in the last fiscal year, please disclose them.</i>
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: - Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; - Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan - Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <i>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</i>	■	17. Business continuity information Disclosure of information regarding: - Matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year; - Management assessment of matters in number 1; and - Assumptions used by management in conducting assessments. <i>Note: if there are no matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year, it is necessary to disclose the assumptions underlying management in believing that there are no matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Good Corporate Governance		
1. Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan c. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	■	1. Description of the Board of Commissioners The description includes: a. Description of the responsibilities of the Board of Commissioners; b. Evaluation of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis for the evaluation; and c. Disclosures about Board Charter (guidelines and work rules for the Board of Commissioners).
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: → Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan → Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Tidak memiliki komisaris independen	2. Independent Commissioners (total of at least 30% of the total Board of Commissioners) Includes among others: → Criteria for determining Independent Commissioners; and → Statement of the independence of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: → Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; → Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan → Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	■	3. Description of the Directors The description includes: → The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors; → Assessment of the performance of the committees under the Directors (if any); and → Disclosures about the Board Charter (guidelines and work rules for the Directors).
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; b. Pihak yang melakukan penilaian; c. Skor penilaian masing-masing kriteria; dan d. Rekomendasi hasil penilaian; dan e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <i>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan.</i>	■	4. Evaluation of GCG Implementation for the 2019 financial year which covers at least aspects of the Board of Commissioners and Directors Contains descriptions of: a. Criteria used in the assessment; b. The party conducting the assessment; c. Scoring score of each criterion; d. Recommendations on the results of the assessment; and e. Reasons for not / not implementing recommendations. <i>Note: if there is no assessment of GCG implementation for the 2019 fiscal year, please disclose it.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: - Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; - Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; - Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; - Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; - Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan - Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <i>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</i>	■	5. A description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors Includes among others: - Disclosure of the proposed procedure up to the determination of the Board of Commissioners' remuneration; - Disclosure of the proposed procedure up to the determination of the Board of Directors' remuneration; - Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners; - Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors; - Disclosure of indicators for determining the remuneration of the Directors; and - Disclosure of performance bonuses, non-performance bonuses, and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors (if any). <i>Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors, then disclose them.</i>
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain: - Tanggal Rapat; - Peserta Rapat; dan - Agenda Rapat. <i>Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</i>	■	6. Frequency and Attendance of Meetings attended by the majority of members at the Board of Commissioners' meeting (at least 1 time in 2 months), Directors' Meetings (at least 1 time in 1 month), and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors (at least 1 time in 4 months) Information includes: - Date of Meeting; - Meeting participants; and - Meeting agenda. <i>For each Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting, and joint meeting.</i>
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. <i>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</i>	■	7. Information regarding major and controlling shareholders, both directly and indirectly, reaches individual owners In the form of a scheme or diagram that separates major shareholders from controlling shareholders. <i>Note: What is meant by major shareholders is a party that, directly or indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting rights of all shares that have voting rights issued by a Company, but are not controlling shareholders.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. <i>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</i>		8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major Shareholders and / or controllers Includes among others: a. Affiliated relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors; b. Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; c. Affiliated relationship between members of the Board of Directors and the Major Shareholders and / or Controllers; d. Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and e. Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major Shareholders and / or Controllers. <i>Note: if you do not have an affiliation, you must disclose it.</i>
9. Komite Audit Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; c. Independensi anggota komite audit; d. Uraian tugas dan tanggung jawab; e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.		9. Audit Committee Includes among others: a. Name, position and term of office of the audit committee member; b. Educational history (Field of Study and Educational Institutions) and work experience (Position, Institution, and Serving Period) members of the audit committee; c. Independence of audit committee members; d. Description of duties and responsibilities; e. A description of the implementation of the audit committee's activities in the financial year; and f. The frequency of meetings and the attendance of the audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	<i>Tidak memiliki Komite Nominasi dan/atau remunerasi</i>	10. Nomination and / or Remuneration Committee Includes among others: a. Name, title and brief curriculum vitae of the members nomination and / or remuneration committee; b. Independence of the nominating and / or committee remuneration; c. Description of duties and responsibilities; d. A description of the implementation of the nomination committee's activities and / or remuneration in the financial year; e. Frequency of meetings and committee attendance nomination and / or remuneration; f. Statement of nomination committee guidelines and / or remuneration; and g. Policy regarding the succession of the Directors.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: → Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; → Independensi komite lain; → Uraian tugas dan tanggung jawab; → Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan → Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	■	11. Other committees under the Board of Commissioners owned by the company Includes among others: → Names, titles and brief biographies of other committee members; → Independence of other committees; → Description of duties and responsibilities; → A description of the implementation of the activities of other committees in the financial year; and → Frequency of meetings and attendance rates of other committees.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; b. Domisili; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	■	12. Job description and Function of the Corporate Secretary Includes among others: a. Name and brief history of the position of company secretary; b. Domicile; c. Description of duties and responsibilities; and d. A description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year.
13. Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: a. Nama ketua unit audit internal; b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	■	13. Description of the internal audit unit Includes among others: a. Name of head of internal audit unit; b. Number of employees (internal auditor) in the internal audit unit; c. Certification as an internal audit profession; d. Position of the internal audit unit in the company structure; e. A description of the implementation of the internal audit unit activities in the financial year; and f. The party who appoints and dismisses the head of the internal audit unit.
14. Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <i>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</i>	■	14. Public Accountant Information includes: a. The name and year of the public accountant who has audited the annual financial statements for the past 5 years; b. Name and year of the Public Accountant Firm that has audited the annual financial statements for the past 5 years; c. The amount of fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and d. Other services provided by the Public Accounting Firm and public accountant in addition to the annual financial statement audit services in the last financial year. <i>Note: if there are no other services referred to, so disclosed.</i>

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	■	15. Description of the company's risk management Includes among others: a. A description of the risk management system implemented by the company; b. A description of the results of the review conducted on the risk management system for the financial year; c. A description of the risks faced by the company; and d. Efforts to manage these risks.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - internal control framework); dan c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	■	16. Description of the internal control system Includes among others: a. A brief description of the internal control system, including but not limited to financial and operational controls; b. Explanation of the suitability of the internal control system with an internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and c. A description of the results of the review conducted on the implementation of the internal control system in the financial year.
17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial: a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial b. Informasi mengenai metode dan lingkup due diligence terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan c. Informasi tentang stakeholder penting yang berdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan d. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	■	17. Description of corporate social responsibility related to governance Social responsibility: a. Information commitment to social responsibility b. Information about the methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of the company's activities c. Information about important stakeholders who are affected or influence the impact of the company's activities d. Information about important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities e. Information about the scope of corporate social responsibility, both those which constitute obligations and those that exceed obligations f. Information about the company's strategy and work program in dealing with issues social, economic and environment in the effort of stakeholder engagement and increasing value for stakeholders and shareholders g. Information about various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business being run h. Information about financing and social responsibility budgets

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia → Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia → Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia → Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia → Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia → Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	<i>Tidak memiliki CSR terkait Hak Asasi Manusia</i>	18. Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights → Information about commitments and core responsibility social responsibility policies on Human Rights → Information on the formulation of corporate social responsibility core subject areas Human Rights → Information about corporate social responsibility planning in the field of Human Rights → Information about implementing CSR initiatives in the field of Human Rights → Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of Human Rights
19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	<i>Tidak memiliki CSR terkait bidang operasi yang adil</i>	19. Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair operations a. Information on commitments and core responsibility social responsibility policies for fair operations b. Information about the formulation of corporate social responsibility core subject in a fair operation c. Information about fair corporate social responsibility planning d. Information about implementing CSR initiatives in the field of fair operations e. Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of fair operations
20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang; a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan e. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	<i>Tidak memiliki CSR terkait lingkungan hidup</i>	20. Description of corporate social responsibility related to the environment, delivery of information about; a. Information about environmental commitments and policies b. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company c. Information about targets / planned activities on 2018 established by management; d. Information about activities carried out and related to environmental programs related to the company's operational activities e. Information about implementing CSR initiatives related to the environment f. Information about achieving quantitative impacts on the activity; and, such as the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy, the company's waste treatment system, the complaint mechanism environment, consideration of environmental aspects in granting credit to customers, and others. g. Certification in the environmental field owned.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
21. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang: → Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan → Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan → Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan → Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut → Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	<i>Tidak memiliki CSR terkait ketenagakerjaan</i>	21. Description of corporate social responsibility related to employment, health and work safety, including information on: → Corporate social responsibility policies and commitments core labor subject → Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of labor → Information related to targets / planned activities for 2018 set by management; and → Activities undertaken and quantitative impact on these activities → Information related to employment practices, health, and work safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and work safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, labor complaints mechanisms, and others.
22. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain: - Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan - Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut - Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	<i>Tidak memiliki CSR terkait tanggung jawab terhadap konsumen</i>	22. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers, including among others: - Targets / planned activities are for 2018 determined management; and - Activities undertaken and their impact - Related to product responsibilities, such as consumer health and safety, product information, facilities, number and countermeasures for consumer complaints, and others.
23. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang: → Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan → Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan → Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan → Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan → Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; → Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan → Biaya yang dikeluarkan → Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.		23. Description of corporate social responsibility related to social and community development, including information on: → Corporate social responsibility policies and commitments, core subject of social and community development → Information about social issues that are relevant to the company → Information about social risks managed by the company → Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development → Targets / activity plans for 2018 set by management; → Activities undertaken and their impact; and → Costs incurred → Regarding social and community development, such as the use of local labor, empowering communities around the company, improving social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication regarding anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: → Pokok perkara/gugatan; → Status penyelesaian perkara/gugatan; → Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal → Tuntutan/gugatan; dan → Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan → dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). <i>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</i>	<i>Tidak memiliki perkara penting</i>	24. Important cases that are being faced by the company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and members of the Directors who serve in the annual reporting period Includes among others: → Principal matters / lawsuit; → Status of case / lawsuit settlement; → Risks faced by the company and nominal value → Demands / lawsuits; and → Administrative sanctions imposed on companies, members of the Board of Commissioners and Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking → and others) in the last financial year (or there is a statement that there is no administrative sanction). <i>Note: in the case of the company, its subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors do not have important cases, to be disclosed.</i>
25. Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		25. Access information and company data A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through websites (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, analyst meetings, and so on.
26. Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: a. Pokok-pokok kode etik; b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; c. Penyebarluasan kode etik; d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <i>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</i>		26. Discussion on the code of ethics Containing descriptions include: a. Code of Ethics Principles; b. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of the organization; c. Dissemination of the code of ethics; d. Sanctions for each type of violation regulated in a code of conduct (normative); and e. Number of violations of the code of ethics along with sanctions imposed in the last financial year. <i>Note: if there is no violation of the code of ethics in the last fiscal year, please disclose it.</i>

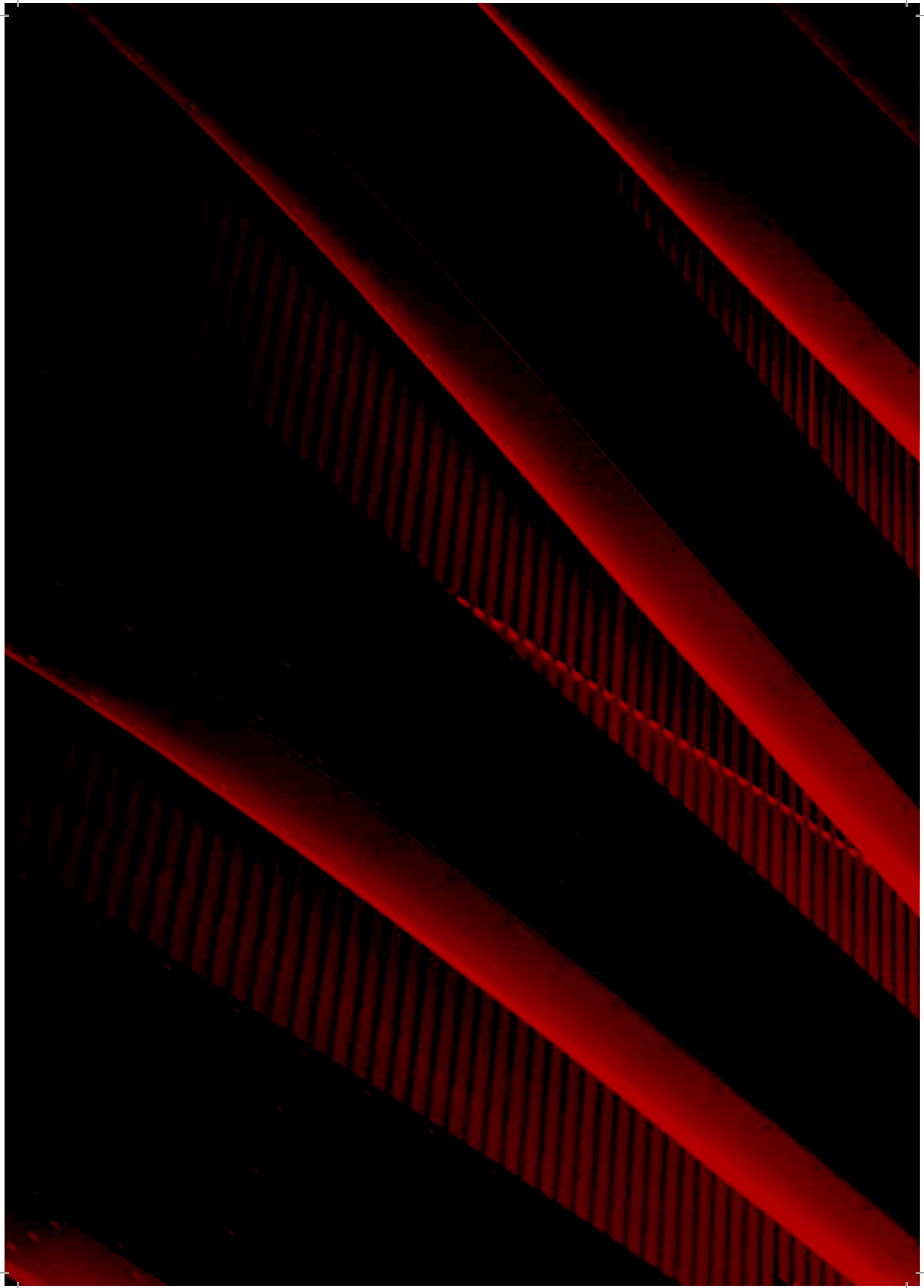
Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
27. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: a. Penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi whistleblower; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <i>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</i>	■	27. Disclosure of the whistleblowing system Contains a description of the whistleblowing system mechanism, including: a. Submission of violation reports; b. Protection for whistleblowers; c. The handling of complaints; d. The party that manages the complaint; and e. Number of complaints received and processed in the last financial year; and f. Sanctions / follow-up on complaints that have been processed in the financial year. <i>Note: if no complaints have been received and have been processed in the last financial year, they must be disclosed.</i>
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. <i>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</i>	■	28. Policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors Description of the Company's written policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. <i>Note: if there is no such policy, please state the reasons and considerations.</i>
INFORMASI KEUANGAN. Financial Information		
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	■	1. Statement of the Board of Directors and / or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements Compliance with relevant regulations regarding Responsibility for Financial Statements.
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	■	2. Independent auditor's opinion on the financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: → Nama dan tanda tangan; → Tanggal Laporan Audit; dan → Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	■	3. Description of the Independent Auditor in Opinion The description contains about: → Name and signature; → Date of Audit Report; and → KAP permit number and Public Accountant license number.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
4. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: → Laporan posisi keuangan; → Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; → Laporan perubahan ekuitas; → Laporan arus kas; → Catatan atas laporan keuangan; → Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan → Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	■	4. Complete financial statements Contains the full elements of the financial statements: → Statements of financial position; → Statements of profit or loss and other comprehensive income; → Statement of Changes in Equity; → Cash flow statement; → Notes to financial statements; → Comparative information about the previous period; and → Statements of financial position at the beginning of the previous period when an entity adopts an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items, or when an entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	■	5. Comparison of the level of profitability Comparison of current year's performance / profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; b. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	■	6. Cash Flow Statement Meet the following conditions: a. Grouping into three activity categories: operation, investment, and funding; b. Use the direct method to report cash flows from operating activities; c. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and d. Disclosures of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.
7. Cash Flow Statement Meet the following conditions: a. Grouping into three activity categories: operation, investment, and funding; b. Use the direct method to report cash flows from operating activities; c. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and d. Disclosures of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	■	7. Summary of Accounting Policies Includes at least: a. Statement of compliance with Indonesian GAAP; b. Basis of measurement and preparation of financial statements; c. Income tax; d. Employee benefits; and e. Financial Instruments.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: → Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; → Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan → Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	■	8. Disclosure of related party transactions Matters revealed include: → Names of related parties, as well as the nature and relationship with related parties; → Value of transactions and their percentage of total related revenues and expenses; and → The balance and the percentage of total related assets or liabilities.

Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: → Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; → Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; → Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; → Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan → Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	■	9. Disclosures related to taxation Things that must be disclosed: → Fiscal reconciliation and calculation of tax burden now; → Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit; → A statement that the taxable income (LKP) of the reconciliation results is the basis for filling the 2016 Annual Corporate Income Tax Return; → Details of deferred tax assets and liabilities recognized on the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized on the income statement if the amounts are not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position; and → Disclosure of whether or not there is a tax dispute.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	■	10. Disclosures relating to fixed assets Things that must be disclosed: a. Depreciation method used; b. A description of the accounting policies chosen between the revaluation model and the cost model; c. Significant methods and assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation models) or disclosures of fair values of fixed assets (for cost models); and d. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: → Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; → Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; → Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan → Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	■	11. Disclosures relating to operating segments Things that must be disclosed: → General information which includes the factors used to identify the reported segment; → Information about profit or loss, assets, and segment liabilities reported; → Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit and loss, segment assets, segment liabilities and other segment material elements to the related amount in the entity; and → Disclosure at entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and key customers.



Kriteria & Penjelasan	Checklist	Criteria & Explanation
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.		12. Disclosures relating to Financial Instruments Things that must be disclosed: a. Details of financial instruments owned based on its classification; b. Fair value and its hierarchy for each group of financial instruments; c. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; d. Risk management policy; and e. Risk analysis related to financial instruments in quantitative terms.
13. Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.		13. Issuance of financial statements Matters revealed include: a. The date the financial statements was authorized to be issued; and b. The party responsible for authorizing the financial statements.



**PT PENYELENGGARA
PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**

....

Indonesia Securities
Investor Protection Fund / Indonesia SIPF

....

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta, 12190 - Indonesia

P. +62 21 515 5553
F. +62 21 515 5556
E. helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id

INDONESIA SIPF 

@indonesiasipf 

@indonesiasipf 